



PUTUSAN
Nomor 2659 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut, diwakili H. Rudi Gunawan, S.H., M.H., M.P., Bupati Garut; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Lukman, S.H., M.Si, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015; Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi III dahulu Tergugat I/Pembanding I
2. **SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut;
3. **KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut; Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr. H. Lukman, S.H., M.Si, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015; Para Pemohon Kasasi II /Para Termohon Kasasi III dahulu Tergugat II, III/ Pembanding II, III;

L a w a n

1. **Drs. H. ADIN BURHANUDIN, M.Pd**, bertempat tinggal di Kampung Pasantren RT.03/RW.05 Desa Bungbulang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Ketua Kelompok I, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili kelompok nasabah yang menyimpan uangnya di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, dalam bentuk tabungan sebanyak 40 (empat puluh) orang;



2. **Ny Hj ENUNG MARIA**, bertempat tinggal di Kampung Darusalam RT.03/RW.06 Desa Bungbulang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Ketua Kelompok II, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili kelompok nasabah yang menyimpan uangnya di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut dalam bentuk deposito/simpanan berjangka sebanyak 507 (lima ratus tujuh) orang;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Jajang Herawan, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan, berkantor di Jalan Pembangunan Perum Bumi Jaya Asri I D-77 Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014;

Para Termohon Kasasi I,II /Pemohon Kasasi III dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **PIMPINAN PERUSAHAAN DAERAH BPR KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT**, yang berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185, Garut;
 2. **DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BPR KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT**, yang berkedudukan di Garut;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi I,II /Pemohon Kasasi III dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi III dahulu Tergugat I/Pembanding I dan Para Pemohon Kasasi II /Para Termohon Kasasi III dahulu Tergugat II, III/ Pembanding II,III serta Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut pada pokoknya atas dalil-dalil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugat Selaku Wakil Kelompok Dalam Kaitan Prosedural Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Actions*)

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Para Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai wakil kelompok-wakil kelompok yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan dengan kedudukan dan kepentingan sebagai berikut:

1. Bahwa wakil kelompok merupakan orang, sekaligus wakil dari sekelompok orang (anggota kelompok) yang sama-sama menderita kerugian/memiliki sifat dan kerugian yang sama, sebagai akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Garut, dalam hal ini PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, sebagai pelaku usaha dan penyedia jasa, sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) *juncto* Pasal 46 ayat (1) sub. b. yang dengan tegas menyatakan Pasal 1 ayat (3), Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”; Pasal 1 ayat (5), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, menentukan “jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”; Pasal 46 ayat (1) sub b, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, menentukan “sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”; Oleh karena itu, kejujuran dan kesungguhan Para Penggugat tidak diragukan lagi untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompoknya dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*);
2. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini terdiri dari wakil kelompok–wakil kelompok tidak dipersyaratkan mendapatkan kuasa khusus dari anggota kelompok sebagaimana ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi “untuk mewakili kepentingan

Halaman 3 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok”;

3. Bahwa gugatan dengan menggunakan mekanisme dan/atau prosedur gugatan perwakilan kelompok sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu prosedur gugatan dimana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili anggota kelompok yang jumlahnya banyak dengan menderita kerugian yang sama/memiliki sifat dan kerugian yang sama. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 butir (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
4. Bahwa korban/yang dirugikan sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat diperkirakan berjumlah 547 (lima ratus empat puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, dan 507 (lima ratus tujuh) orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito/simpanan berjangka;
5. Bahwa oleh karena ada kesamaan fakta dan dasar hukum serta kerugian yang sama dari para nasabah dengan jumlah kurang lebih 547 (lima ratus empat puluh tujuh) orang yang mengalami kerugian, maka dalam mengajukan gugatan digunakan prosedur gugatan perwakilan kelompok dengan maksud agar pelaksanaan gugatan atau penyelenggaraan peradilan menjadi sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
6. Bahwa sejak akhir Tahun 2007 sampai dengan sekarang, korban/yang dirugikan oleh PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut disebabkan karena para nasabah tidak dapat menarik/mencairkan uangnya yang disimpan di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito/simpanan berjangka;
7. Bahwa dengan tidak dipenuhi, dilindungi dan tidak diberikan layanan sebagaimana yang ditentukan oleh undang undang, akibat perbuatan dan kebijakan Para Tergugat, maka hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, sehingga bertentangan dengan hak orang lain, (*vide* pelanggaran hak-hak para konsumen oleh pelaku usaha sebagaimana maksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 huruf f Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999);

Halaman 4 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya kesamaan fakta (*question of fact*) berupa para nasabah tidak dapat menarik/mencairkan uangnya yang disimpan/ditabung, di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito/simpanan berjangka, dan adanya kesamaan dasar hukum (*question of law*) yang bersifat substansial serta adanya kerugian yang sama atau adanya kesamaan jenis tuntutan (*tipicality*), maka pengajuan melalui gugatan perwakilan kelompok ini adalah merupakan kepentingan orang banyak (*numerosity*) yang dalam hal ini diajukan dan atau diwakili oleh Para Penggugat, sehingga gugatan perwakilan kelompok ini telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa kepentingan dan kedudukan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok telah disinggung dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok telah mempertegas dan memperkuat adanya gugatan perwakilan kelompok yang sering digunakan dalam sistem peradilan dewasa ini, dengan membenarkan proses beracara yang telah disinggung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat juga didasarkan pada ketentuan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
 - a. Pasal 2 ayat (4), dengan tegas menentukan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”;
 - b. Pasal 4 ayat (2), dengan tegas menentukan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Halaman 5 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 5 ayat (1), dengan tegas menentukan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
 - d. Pasal 10 ayat (1), dengan tegas menentukan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;
 12. Bahwa keberadaan Para Penggugat yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum sebagai wakil kelompok-wakil kelompok dari anggota kelompoknya akan mengumumkan secara luas (notifikasi) lewat media cetak dan elektronik atau setidaknya disebarkan lewat selebaran, sehingga keberadaan Para Penggugat dan proses gugatan perwakilan kelompok dapat diikuti. Hal ini mengingat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
 13. Bahwa pilihan keluar akan dicantumkan dalam pemberitahuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut cq Majelis Hakim oleh anggota-anggota dari wakil kelompok-wakil kelompok yang menginginkan keluar. Adanya pernyataan keluar anggota-anggota dari wakil kelompoknya, berarti anggota-anggota tersebut secara hukum tidak lagi terikat dengan segala keputusan gugatan perwakilan kelompok yang dihasilkan, mengingat Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
 14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang disertai dengan alasan-alasan gugatan secara lengkap, maka Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Garut cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan agar gugatan perwakilan kelompok ini dapat ditetapkan dan dikabulkan, mengingat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
- II. Uraian Fakta-Fakta Hukum
1. Bahwa, PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 1996;

2. Bahwa, PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, didirikan atas dasar modal dari Pemerintah Kabupaten Garut, yang dipisahkan berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 7 huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut, maka PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut melakukan kegiatan jasa keuangan, yaitu diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito/simpanan berjangka;
4. Bahwa sejak didirikannya, PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut telah menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari Para Penggugat, baik berupa tabungan, maupun berupa deposito/simpanan berjangka, yang sampai saat ini telah mencapai keseluruhannya sebesar ± Rp4.078.223.227,00 (empat miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
5. Bahwa, sekitar bulan November Tahun 2007, simpanan para nasabah/Para Penggugat yang disimpan di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut tersebut, baik yang berupa tabungan maupun berupa deposito/simpanan berjangka, tidak bisa diambil/dicairkan dengan berbagai alasan yang tidak jelas, padahal simpanan Para Penggugat dimaksud adalah murni hak Para Penggugat yang dapat diambil/dicairkan kapan saja seperti simpanan berupa tabungan sedangkan simpanan berupa deposito/simpanan berjangka dapat diambil pada waktu yang telah ditentukan, yang mana seluruh simpanan tersebut tidak bisa siapa pun menahan hak milik Para Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas, karena hal tersebut berdampak pada pelanggaran hukum, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan kepada Para Penggugat;
6. Bahwa, untuk lebih jelasnya rincian simpanan Para Penggugat di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, baik dalam bentuk tabungan, maupun dalam bentuk deposito/simpanan berjangka, adalah sebagai berikut:
 - A. Simpanan dalam bentuk tabungan :

Halaman 7 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Nama | Alamat | Nomor Rekening | Jumlah Tabungan Rp. |
|----|------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | H. Adin Bahrudin, M.Pd | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21006106 | Rp18.844.327,00 |
| 2 | H. Ian/Hj. Cucum | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21104924 | Rp201.010.000,00 |
| 3 | Hj. Cucum | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | T.3213038 | Rp31.000.000,00 |
| 4 | Iis/H. Iyan | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21160172 | Rp1.400.000,00 |
| 5 | Engkus | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 4824 | Rp6.750.000,00 |
| 6 | Fajar | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 4823 | Rp9.400.000,00 |
| 7 | Hj. Enung/H. Agus | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | T. 21060132 | Rp24.750.500,00 |
| 8 | Jajang Masum | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 4819 | Rp3.310.000,00 |
| 9 | THT UPK Bungbulang | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21060219 | Rp1.000.000,00 |
| 10 | Guliran PPK | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21001620 | Rp17.271.382,00 |
| 11 | Dana Perlaya UPK Bbl | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21060220 | Rp6.025.748,00 |
| 12 | KUD Bungbulang | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 2103839 | Rp25.106.101,00 |
| 13 | Dedi Sudrajat | Kp. Cisurian Desa Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut | 21060082 | Rp5.043.047,00 |
| 14 | Hj. Cucu | Kp. Arjani Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | T. 3210.800 | R70.000,00 |
| 15 | Memet/Evis | Kp. Cicatur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21105456 | Rp10.360.000,00 |
| 16 | Maman | Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 211060188 | Rp70.000.000,00 |
| 17 | Oom | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | T. 32104984 | Rp410.000,00 |
| 18 | Mesjid Sempur | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | T.32104985 | Rp46.000,00 |
| 19 | Ilyus Suryana | Kp. Cislak Desa Hanjuang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21005105 | Rp3.349.291,00 |
| 20 | Zamzam | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 60081 | Rp200.000,00 |
| 21 | Melasari | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21104885 | Rp119.000,00 |
| 22 | Animah | Kp. Re.Teureup Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 4887 | Rp347.500,00 |
| 23 | Hasan | Kp.Citalahab Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab.Garut | 21060250 | Rp300.000,00 |
| 24 | Reni/Maman | Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 5244 | Rp1.210.000,00 |
| 25 | Ardi | Kp. Nempel Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | T 2100.60003 | Rp660.000,00 |
| 26 | Ade | Kp. Nempel Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | 2160044 | Rp672.000,00 |
| 27 | Ade Hidayat | Kp. Nempel Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21060204 | Rp25.000.000,00 |
| 28 | Empud | Kp.Cibuluh Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 21060017 | Rp8.324.409,00 |
| 29 | Jamilah | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 21005358 | Rp373.437,00 |
| 30 | Aseh | Kp. Bebedahan Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut | 21060135 | Rp2.500.000,00 |
| 31 | Ali | Kp. Tipar Desa Cihikeu Kecamatan Bungbulang Kab.Garut | 21105411 | Rp1.520.000,00 |
| 32 | Aring | Kp. Cicuka Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 21004802 | Rp511.580,00 |
| 33 | Moh. Nurulrizal/ Apud | Kp. Cisitua Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 21060127 | Rp956.869,00 |

Halaman 8 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------|----------------|--|----------|------------------|
| 35 | Empud | Kp. Cibuluh Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 21005317 | Rp1.545.367,00 |
| 36 | Bunbun | Kp. Liung Gunung Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kb. Garut | 21160237 | Rp930.500,00 |
| 37 | Hasan Mulyaman | Kp. Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan | 21006060 | Rp526.220,00 |
| 38 | Uum | Garut | 4989 | Rp996.000,00 |
| 49 | H. Cucu | Kp. Puncak Arjani | 321800 | Rp70.000,00 |
| 40 | Iyus Suryana | Kp. Cisalak Desa Cisalak | 21005105 | Rp1.168.289,00 |
| JUMLAH | | | | Rp478.923.227,00 |

B. Simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka :

| No | Nama | Alamat | Nomor Rekening | Jumlah Deposito Rp. |
|----|--------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | Hj. Enung | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0347/VII/2006 | Rp50.000.000,00 |
| 2 | Winda | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0281/VI/2006 | Rp5.000.000,0 |
| 3 | Mumu M. | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 05191/X/2006 | Rp7.500.000,00 |
| 4 | Winda | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000349 | Rp4.500.000,00 |
| 5 | Winda | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000693 | Rp7.500.000,00 |
| 6 | Winda | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000956 | Rp5.000.000,00 |
| 7 | Winda | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001199 | Rp1.000.000,00 |
| 8 | Drs. Adin B. M.Pd. | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0280/VI/2006 | Rp7.500.000,00 |
| 9 | Drs. Adin B. M.Pd. | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000881 | Rp7.500.000,00 |
| 10 | Neng Suci | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0911/V/2005 | Rp80.000.000,00 |
| 11 | Hj. Enung | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 01051/VI/2005 | Rp60.000.000,00 |
| 12 | Hj. Enung | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0300/III/2006 | Rp50.000.000,00 |
| 12 | Hj. Enung | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0300/III/2006 | Rp50.000.000,00 |
| 13 | Hj. Enung | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000098 | Rp50.000.000,00 |
| 14 | Hj. Enung | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000301 | Rp50.000.000,00 |
| 15 | Hj. Enung | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000419 | Rp30.000.000,00 |
| 16 | Hj. Enung | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000456 | Rp35.000.000,00 |
| 17 | Neng Suci | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000496 | Rp45.000.000,00 |
| 18 | Neng Suci | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000607 | Rp20.000.000,00 |
| 19 | Hj. Enung | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000713 | Rp30.000.000,00 |
| 20 | Hj. Enung | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000937 | Rp 50.000.000,00 |
| 21 | Neng Suci | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000939 | Rp40.000.000,00 |
| 22 | Hj. Enung | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001007 | Rp10.000.000,00 |
| 23 | Hj. Enung | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001097 | Rp20.000.000,- |
| 24 | H. Ishak Musa | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 0059/I/2006 | Rp7.500.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|------------------------------|---|--------------------|------------------|
| 25 | Hj. Aminah/ H. Ishak Musa | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 0060/I/2006 | Rp7.500.000,- |
| 26 | Rini/H. Ishak Musa | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 0061/I/2006 | Rp7.500.000,- |
| 27 | Rika/ H. Ishak Musa | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 0062/I/2006 | Rp7.500.000,00 |
| 28 | Alit/H. Ishak Musa | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 0063/I/2006 | Rp7.500.000,00 |
| 29 | Iwan/ H. Ishak Musa | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 0065/I/2006 | Rp5.000.000,00 |
| 30 | H. Ishak Musa | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 116/IV/2006 | Rp7.500.000,00 |
| 31 | Hj. Aminah | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 117/IV/2006 | Rp7.500.000,00 |
| 32 | Rini | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 118/IV/2006 | Rp7.500.000,00 |
| 33 | Rika | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 119/IV/2006 | Rp7.500.000,00 |
| 34 | Alit | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 120/IV/2006 | Rp7.500.000,00 |
| 35 | Deni | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 121/IV/2006 | Rp7.500.000,00 |
| 36 | Iwan | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 122/IV/2006 | Rp7.500.000,00 |
| 37 | Titin | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 123/IV/2006 | Rp7.500.000,00 |
| 38 | Beben | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 124/IV/2006 | Rp7.500.000,00 |
| 39 | Heri Hermawan | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 125/IV/2006 | Rp2.500.000,00 |
| 40 | H. Ishak Musa | Jl Sinom II Nomor 10 Lengkong Kota Bandung. | 0412/II/2005 | Rp100.000.000,00 |
| 41 | H. Engkus | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001035 | Rp3.000.000,00 |
| 42 | H. Engkus | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000952 | Rp5.000.000,00 |
| 43 | Parhan Fariza | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0936/VI/200 3 | Rp1.500.000,00 |
| 44 | Hj. Iyam | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000905 | Rp7.500.000,00 |
| 45 | H. Maolani | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000906 | Rp7.500.000,00 |
| 46 | Riyan | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000907 | Rp7.500.000,00 |
| 47 | Yusep | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000908 | Rp7.500.000,00 |
| 48 | Adi | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000909 | Rp5.000.000,00 |
| 49 | Ai Hilda | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000910 | Rp5.000.000,00 |
| 50 | Hj. Iyam | Kp. Darusalam Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001154 | Rp50.000.000,00 |
| 51 | Hj. Solihat | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0265/VI/200 6 | Rp2.000.000,00 |
| 52 | Hj. Solihat | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1114/VIII/20 04 | Rp7.000.000,00 |
| 53 | Hj. Solihat | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1614/XI/200 4 | Rp7.500.000,00 |
| 54 | Hj. Solihat | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 01095/VI/20 05 | Rp2.000.000,00 |
| 55 | Hj. Solihat | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1545/IX/200 5 | Rp2.000.000,00 |
| 56 | Hj. Solihat | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1837/XI/200 5 | Rp4.000.000,00 |
| 56 | Hj. Solihat | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1837/XI/200 5 | Rp4.000.000,00 |
| 57 | Hj. Solihat | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 2109/XII/200 5 | Rp1.500.000,00 |
| 58 | Hj. Solihat | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0137/I/2006 | Rp1.500.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| 59 | Hj. Solihat | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0277/II/2006 | Rp1.500.000,00 |
| 60 | Hj. Solihat | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000376 | Rp1.000.000,00 |
| 61 | H. Anan | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0230/II/2006 | Rp15.000.000,00 |
| 62 | H. Anan | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000592 | Rp10.000.000,00 |
| 63 | Hari/Dadan | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 01006/VI/20 05 | Rp7.500.000,00 |
| 64 | Tutti/Dadan | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 01007/VI/20 05 | Rp5.000.000,00 |
| 65 | Tutti/Dadan | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 01008/VI/20 05 | Rp7.500.000,00 |
| 66 | Ira Nurpaidah/ Dadan | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 01009/VI/20 05 | Rp7.500.000,00 |
| 67 | Enung/Dadan | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 01010/VI/20 05 | Rp7.500.000,00 |
| 68 | Rudi/Dadan | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 01011/VI/20 05 | Rp7.500.000,00 |
| 69 | Dadan Ramdani | Kp. Rajawali Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 01012/VI/20 05 | Rp7.500.000,00 |
| 70 | Apong | Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1892/XI/200 5 | Rp2.000.000,00 |
| 71 | Apong/Ia | Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0449/III/200 6 | Rp3.000.000,00 |
| 72 | Apong/Iya | Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000484 | Rp6.000.000,00 |
| 73 | Apong/Iya | Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000652 | Rp4.000.000,00 |
| 74 | Yayah | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000853 | Rp4.000.000,00 |
| 75 | Yayah Juariah | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000911 | Rp2.000.000,00 |
| 76 | Muhammad Basuni Alwi | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1480/IX/200 5 | Rp7.500.000,00 |
| 77 | Lida Nurparida/ M. Basuni Alwi | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1439/VIII/20 05 | Rp4.000.000,00 |
| 78 | Lia Badriah | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1669/X/2005 | Rp3.500.000,00 |
| 79 | Lia Badriah | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0381/III/200 6 | Rp5.000.000,00 |
| 80 | Lia Badriah | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0201/II/2006 | Rp1.500.000,00 |
| 81 | Lilis Sulastr/ Tedi Z. E | Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001167 | Rp6.000.000,00 |
| 82 | Lilis Sulastr/ Tedi Z. E | Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001168 | Rp6.000.000,00 |
| 83 | Hj. Maeni | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000108 | Rp7.000.000,00 |
| 84 | Hj. Maeni/ H. Aonad | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000109 | Rp7.000.000,00 |
| 85 | H. Aonadin/ Hj. Maeni | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000110 | Rp6.000.000,00 |
| 86 | Hj. Maeni | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000253 | Rp6.000.000,00 |
| 87 | H. Ao. M | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000254 | Rp3.000.000,00 |
| 88 | Hj. Maeni | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000342 | Rp3.000.000,00 |
| 89 | Hj. Maeni | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000377 | Rp2.000.000,00 |
| 90 | Hj. Maeni | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000382 | Rp4.000.000,00 |
| 91 | H. Ao M. | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000383 | Rp2.000.000,00 |
| 92 | Hj. Maeni | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000384 | Rp4.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|------------|----------------|
| 93 | Hj. Patimah | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000671 | Rp1.900.000,00 |
| 94 | H. Ao M. | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000679 | Rp2.000.000,00 |
| 95 | Hj. Maeni | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000680 | Rp5.000.000,00 |
| 96 | Ripa/Hj. Maeni | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000681 | Rp5.000.000,00 |
| 97 | Hj. Maeni | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000793 | Rp7.000.000,00 |
| 98 | H. Ao M. | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000852 | Rp3.000.000,00 |
| 99 | Hj. Maeni | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000914 | Rp5.500.000,00 |
| 100 | H. Ao | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000915 | Rp5.500.000,00 |
| 101 | H. Aonadin | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001039 | Rp7.000.000,00 |
| 102 | Ripa/Hj. Maeni | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001040 | Rp6.000.000,00 |
| 103 | Hj. Maeni | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001041 | Rp7.000.000,00 |
| 104 | Unung Saepulloh | Kp. Sembah Desa Wangunjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000890 | Rp5.000.000,00 |
| 105 | Sumarni/ Unung Saepulloh | Kp. Sembah Desa Wangunjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000891 | Rp4.000.000,00 |
| 106 | Amin | Kp. Joho Desa Wangunjaya Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000634 | Rp5.000.000,00 |
| 107 | Asoh/Amin | Kp. Joho Desa Wangunjaya Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000635 | Rp5.000.000,00 |
| 108 | Ahmad Sutisna, S.Pd. | Kp. Galonggong Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46001251 | Rp5.000.000,00 |
| 109 | Sopia Nurhasanah | Kp. Galonggong Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46001250 | Rp5.000.000,00 |
| 110 | Enja | Kp. Naringgul Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000975 | Rp5.500.000,00 |
| 111 | Memet Sunarya | Kp. Cicatur Desa Bungbulang Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 193/I/2000 | Rp3.000.000,00 |
| 112 | Dedi Sudrajat | Kp. Cisurian Desa Talagawangi Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46001231 | Rp5.000.000,00 |
| 113 | Oni/M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000022 | Rp6.500.000,00 |
| 114 | M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000414 | Rp7.000.000,00 |
| 115 | Oni/M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000415 | Rp5.000.000,00 |
| 116 | Dimdim/M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000416 | Rp5.000.000,00 |
| 117 | Riska/M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000455 | Rp5.000.000,00 |
| 118 | Nanai/M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000534 | Rp4.500.000,00 |
| 119 | Triwanda/M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000732 | Rp7.000.000,00 |
| 120 | Mulkiano/M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000733 | Rp5.000.000,00 |
| 121 | M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000834 | Rp5.000.000,00 |
| 122 | N. Penti/M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000957 | Rp7.000.000,00 |
| 123 | N. Desi/M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000958 | Rp7.000.000,00 |
| 124 | N. Gina/M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000959 | Rp7.000.000,00 |
| 125 | N. Nisa/M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000960 | Rp7.000.000,00 |
| 126 | N. Erna/M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000961 | Rp 7.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|---------------|-----------------|
| 127 | Royan/M. Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000994 | Rp 5.000.000,- |
| 128 | Sopyani/Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46001108 | Rp 5.000.000,- |
| 129 | Holimah/Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46001110 | Rp 7.500.000,- |
| 130 | Taryana/Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46001111 | Rp 7.500.000,- |
| 131 | Epa/Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46001112 | Rp 7.000.000,- |
| 132 | Fadli/Enuh | Kp. Tegalega Desa Tegalega Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46001162 | Rp 7.500.000,- |
| 133 | Engkom | Kp. Kondang Rege, Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kab. Garut | 1278/VII/2005 | Rp 7.500.000,- |
| 134 | Oneng/Jana | Kp. Linggar Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut | 46000040 | Rp 5.000.000,- |
| 135 | Dian/Jana | Kp. Linggar Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut | 46000039 | Rp 5.000.000,- |
| 136 | Jana | Kp. Linggar Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut | 027/II/2006 | Rp 2.500.000,- |
| 137 | Jana | Kp. Linggar Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut | 46000038 | Rp 7.500.000,- |
| 138 | Jana | Kp. Linggar Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut | 2077/XII/2005 | Rp 2.000.000,- |
| 139 | Jana | Kp. Linggar Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut | 1826/XI/2005 | Rp 4.000.000,- |
| 140 | Bunyamin | Kp. Babakan Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut | 46000140 | Rp 7.000.000,- |
| 141 | Emi Yuliani | Kp. Babakan Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kab. Garut | 46000141 | Rp 7.000.000,- |
| 142 | Ogi | Kp. Dangiing Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu Kab. Garut | 0720/IV/2005 | Rp 7.500.000,- |
| 143 | Supardi | Kp. Ciseda Desa Cilawu Kecamatan Cilawu Kab. Garut | 46000294 | Rp 25.000.000,- |
| 144 | Cicin, S.Pd. | Kp. Pasangrahan Desa Pasangrahan Kecamatan Cilawu Kab. Garut | 46000684 | 1.000.000,- |
| 145 | Dede Tatang | Kp. Ciseda Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu Kab. Garut | 46001115 | 7.500.000,- |
| 146 | Opi | Kp. Ciseda Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu Kab. Garut | 46001116 | 7.500.000,- |
| 147 | Juan | Kp. Ciseda Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu Kab. Garut | 46001117 | 7.500.000,- |
| 148 | Azka | Kp. Ciseda Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu Kab. Garut | 46001118 | 2.500.000,- |
| 149 | Mae/Moh. Yusep | Kp. Cikuwiwi Desa Dangiing Kecamatan Cilawu Kab. Garut | 46001235 | 7.500.000,- |
| 150 | Moh. Yusep | Kp. Cikuwiwi Desa Dangiing Kecamatan Cilawu Kab. Garut | 46001236 | 5.000.000,- |
| 151 | Dede Nidong/ M. Yusep | Kp. Cikuwiwi Desa Dangiing Kecamatan Cilawu Kab. Garut | 46001237 | 5.000.000,- |
| 152 | Toto | Kp. Nagrak Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000882 | 7.500.000,- |
| 153 | Hanapi | Kp. Ciloa Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000883 | 7.500.000,- |
| 154 | Gaos | Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000884 | 7.500.000,- |
| 155 | Gungun | Kp. Ciloa Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000885 | 7.500.000,- |
| 156 | Asep | Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000886 | 7.500.000,- |
| 157 | Ade Mulyana | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000887 | 5.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|----------------------|--|----------------|---------------|
| 158 | Entin | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001048 | 2.000.000,- |
| 159 | Herwin | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001123 | 2.000.000,- |
| 160 | Herwin | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000694 | 7.000.000,- |
| 161 | Herwin | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001211 | 1.000.000,- |
| 162 | Herwin | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001119 | 5.000.000,- |
| 163 | Herwin | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001153 | 1.500.000,- |
| 164 | Sani Mutiani | Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1666/X/2005 | 7.500.000,- |
| 165 | Lilis | Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000668 | 7.500.000,- |
| 166 | Hj. Cucu | Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1695/X/2005 | 5.500.000,- |
| 167 | H. Nana/Hj. Cucu | Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1696/X/2005 | 5.500.000,- |
| 168 | Hj. Cucu | Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0097/II/2006 | 7.000.000,- |
| 169 | Hj. Cucu | Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000991 | 7.000.000,- |
| 170 | H. Nana/Hj. Cucu | Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000992 | 7.000.000,- |
| 171 | Hj. Cucu | Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1203/VIII/2004 | 1.500.000,- |
| 172 | H. Nana Rusmana | Kp. Puncakapari Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 048/IV/2006 | 7.000.000,- |
| 173 | Iling Iskandar | Kp. Puncakarjani Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 047/IV/2006 | 7.000.000,- |
| 174 | Hj. Nani Sri Mulyani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0392/II/2005 | 7.500.000,- |
| 175 | Hj. Nani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000840 | 100.000.000,- |
| 176 | Hj. Nani Sri Mulyani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0387/II/2005 | 7.500.000,- |
| 177 | Hj. Nani Sri Mulyani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0389/II/2005 | 7.500.000,- |
| 178 | Hj. Nani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000656 | 7.500.000,- |
| 179 | Hj. Nani Sri Mulyani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1694/XI/2004 | 7.500.000,- |
| 180 | Hj. Nani/Dimas | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1614/X/2005 | 7.500.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|----------------------|---|---------------|--------------|
| 181 | Hj. Nani Sri Mulyani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1544/IX/2005 | 7.500.000,- |
| 182 | Hj. Nani Sri Mulyani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0583/IV/2004 | 7.000.000,- |
| 183 | Hj. Nani Sri Mulyani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0584/IV/2004 | 7.000.000,- |
| 184 | Hj. Nani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000230 | 5.000.000,- |
| 185 | Hj. Nani Sri Mulyani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1070/VII/2004 | 7.000.000,- |
| 186 | Hj. Nani Sri Mulyani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0391/II/2005 | 5.000.000,- |
| 187 | Hj. Nani Sri Mulyani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0585/IV/2004 | 7.000.000,- |
| 188 | Hj. Nani Sri Mulyani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1907/XI/2005 | 5.000.000,- |
| 189 | Hj. Nani Sri Mulyani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1908/XI/2005 | 5.000.000,- |
| 190 | Sulastri | Kp. Cibalubur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000626 | 7.000.000,- |
| 191 | Abdul Gopar | Kp. Cibalubur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000627 | 7.000.000,- |
| 192 | Nursetiabudi | Kp. Cibalubur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000628 | 7.000.000,- |
| 193 | H. Nana | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0386/II/2005 | 7.500.000,- |
| 194 | H. Nana | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0388/II/2005 | 7.500.000,- |
| 195 | H. Nana A. Mulyana | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0390/II/2005 | 7.500.000,- |
| 196 | H. Nana | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1695/XI/2004 | 7.500.000,- |
| 197 | H. Nana | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000231 | 5.000.000,- |
| 198 | H. Nana | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1071/VII/2004 | 7.000.000,- |
| 199 | Dimas Rauditia | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1543/IX/2005 | 7.500.000,- |
| 200 | Dimas | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1613/X/2005 | 7.500.000,- |
| 201 | Dimas/Hj. Nani | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000657 | 7.500.000,- |
| 202 | Euis Susilawati | Kp. Babakan Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1074/IX/2003 | 10.000.000,- |
| 203 | Dedeng Sukmana | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1506/IX/2005 | 5.000.000,- |
| 204 | Ida Siti Nurlaela | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1505/IX/2005 | 5.000.000,- |

Halaman 15 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-------------------|--|---------------------|--------------|
| 205 | Ida Siti Nurlaela | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1962/XI/2005 | 5.000.000,- |
| 206 | Ida Siti Nurlaela | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1963/XI/2005 | 5.000.000,- |
| 207 | Papat | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001249 | 7.000.000,- |
| 208 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1835/XI/2005 | 5.000.000,- |
| 209 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0290/II/2005 | 6.000.000,- |
| 210 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000517 | 4.000.000,- |
| 211 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1163/VII/BP R/ 2005 | 5.000.000,- |
| 212 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000889 | 5.000.000,- |
| 213 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001088 | 5.000.000,- |
| 214 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000692 | 5.000.000,- |
| 215 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000990 | 5.000.000,- |
| 216 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1996/XII/2005 | 49.000.000,- |
| 217 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0347/III/2006 | 6.000.000,- |
| 218 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0644/IV/2005 | 5.000.000,- |
| 219 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1836/XI/2005 | 5.000.000,- |
| 220 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0835/V/2005 | 4.000.000,- |
| 221 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0172/II/2006 | 7.000.000,- |
| 222 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000612 | 5.000.000,- |
| 223 | Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001150 | 5.000.000,- |
| 224 | Samsudin/Maesih | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000518 | 4.000.000,- |
| 225 | Bunbun | Kp. Liung Gunung Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001059 | 1.000.000,- |
| 226 | Bunbun | Kp. Liung Gunung Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001212 | 3.500.000,- |
| 227 | Bunbun | Kp. Liung Gunung Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001030 | 2.000.000,- |

Halaman 16 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------------|--|---------------|--------------|
| 228 | Bunbun H. | Kp. Liung Gunung Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000982 | 2.000.000,- |
| 229 | Wahyudin Zamiat | Kp. Pasir Kihyang Desa Margalaksana Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001024 | 7.000.000,- |
| 230 | Wahyudin Zamiat | Kp. Pasir Kihyang Desa Margalaksana Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000243 | 3.000.000,- |
| 231 | Wahyudin Zamiat | Kp. Pasir Kihyang Desa Margalaksana Kec. Bungbulang Kab. Garut | 149/I/2005 | 3.000.000,- |
| 232 | Wahyudin Zamiat | Kp. Pasir Kihyang Desa Margalaksana Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1333/IX/2004 | 6.000.000,- |
| 234 | Wahyudin Zamiat | Kp. Pasir Kihyang Desa Margalaksana Kec. Bungbulang Kab. Garut | 180/V/2006 | 2.000.000,- |
| 235 | Pipih | Kp. Tegal Laja Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001093 | 5.000.000,- |
| 236 | Solihin | Kp. Cipandan Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1856/XII/2004 | 3.000.000,- |
| 237 | Didi | Kp. Cipandan Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0467/III/2006 | 4.000.000,- |
| 238 | Didi | Kp. Cipandan Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1560/X/2004 | 6.000.000,- |
| 238 | Didi | Kp. Cipandan Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000563 | 4.000.000,- |
| 239 | Didi | Kp. Cipandan Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1844/XI/2003 | 4.000.000,- |
| 240 | Sarimanah | Kp. Banjar Sari Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000649 | 7.500.000,- |
| 241 | A.Zaqi/Sarimanah | Kp. Banjar Sari Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000650 | 7.500.000,- |
| 242 | Aip | Kp. Banjar Sari Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000744 | 5.000.000,- |
| 243 | Aip/Sarimanah | Kp. Banjar Sari Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000651 | 2.500.000,- |
| 245 | Rukmini | Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 084/IV/2006 | 5.000.000,- |
| 246 | Wahyu/Rukmini | Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0283/II/2004 | 11.000.000,- |
| 247 | Wahyu | Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001102 | 1.000.000,- |
| 248 | Tati | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1821/XI/2005 | 7.000.000,- |
| 249 | Tati/Agus | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 8004/XI/2005 | 7.000.000,- |
| 250 | Tati | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0098/I/2006 | 7.500.000,- |
| 251 | Tati | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0326/III/2006 | 6.000.000,- |
| 252 | Tati | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0343/III/2006 | 7.500.000,- |
| 253 | Tati | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 144/V/2006 | 7.500.000,- |
| 254 | Tati | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000553 | 6.000.000,- |

Halaman 17 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|----------------|-------------|
| 255 | Nahro/Tati | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000554 | 6.000.000,- |
| 256 | Tati/Nahro | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000754 | 5.000.000,- |
| 257 | Nahro/Tati | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000755 | 5.000.000,- |
| 258 | Tati | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001241 | 5.000.000,- |
| 259 | Nahro/Tati | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001242 | 5.000.000,- |
| 260 | Darsih | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1824/XI/2005 | 7.500.000,- |
| 261 | Agus | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1825/XI/2005 | 7.500.000,- |
| 262 | Darsih/Agus | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1859/XI/2005 | 7.500.000,- |
| 263 | Darsih/Agus | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000150 | 7.500.000,- |
| 264 | Darsih/Agus | Kp. Cihike Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000552 | 7.500.000,- |
| 265 | Entin R. | Kp. Cileueur Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0819/V/2005 | 2.000.000,- |
| 266 | Suryana. S.Pd. | Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 2050/XII/2005 | 7.500.000,- |
| 267 | Wawan/Suryana. S.Pd. | Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 2051/XII/2005 | 7.500.000,- |
| 268 | Jumaeli/Suryana. S.Pd. | Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 2052/XII/2005 | 7.500.000,- |
| 269 | Suryana. S.Pd. | Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0092/I/2006 | 3.000.000,- |
| 270 | Wawan Setiawan | Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0208/II/2006 | 6.000.000,- |
| 271 | Suryana. S.Pd. | Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0209/II/2006 | 6.000.000,- |
| 272 | Suryana. S.Pd. | Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 2050/XII/2005 | 3.000.000,- |
| 273 | Uneh/Empuy | Kp. Cipicung Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0085/I/2006 | 5.000.000,- |
| 274 | Iyus Suryana | Kp. Cisalak Desa Hanjuang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 2048/XII/2005 | 3.000.000,- |
| 275 | Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 1595/X/2005 | 2.000.000,- |
| 276 | Muliadi K/ Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 053/IV/2006 | 3.000.000,- |
| 277 | Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 0891/V/2005 | 5.000.000,- |
| 278 | Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 1309/IX/2004 | 7.000.000,- |
| 279 | Mulyadi/ Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 1677/X/2005 | 7.000.000,- |
| 280 | Andika/ Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 1392/VIII/2005 | 5.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------------------|--|----------------|-------------|
| 281 | Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 01100/VI/2005 | 7.500.000,- |
| 282 | Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 0395/II/2005 | 2.000.000,- |
| 283 | Mulyadi/ Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 1390/VIII/2005 | 7.000.000,- |
| 284 | Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 173/V/2006 | 3.000.000,- |
| 285 | Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 1861/XI/2005 | 5.000.000,- |
| 286 | Mulyadi/ Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 1310/IX/2004 | 7.500.000,- |
| 287 | Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 0613/IV/2004 | 7.000.000,- |
| 288 | Ita/Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 1391/VIII/2005 | 7.000.000,- |
| 289 | Mulyadi/ Ika Surastika | Kp. Cikadut Kidul Bandung | 46001171 | 7.000.000,- |
| 290 | Marita/ Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 1678/X/2005 | 7.000.000,- |
| 291 | Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 1389/VIII/2005 | 7.000.000,- |
| 292 | Muliadi K/ Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 0184/I/2005 | 3.500.000,- |
| 293 | Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 1676/X/2005 | 6.000.000,- |
| 294 | Ika Surastika | Gg. Sukabakti Dalam I No. 48 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung | 01213/VII/2005 | 7.500.000,- |
| 295 | Hj. Marhaya | Kp. Ranca Genggong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1325/VIII/2003 | 1.500.000,- |
| 296 | Hj. Marhaya | Kp. Ranca Genggong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1406/VIII/2005 | 2.000.000,- |
| 297 | Hj. Marhaya | Kp. Ranca Genggong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0188/II/2006 | 2.500.000,- |
| 298 | Solohat | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0359/III/2006 | 3.000.000,- |
| 299 | Dedeng Sukmana/ Ida Siti N. | Kp. Sukamanis Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 176/IX/2005 | 5.000.000,- |
| 300 | Orid | Kp. Cikuwiwi Desa Cilawu Kec. Cilawu Kab. Garut | 46001234 | 7.500.000,- |
| 301 | Anirah | Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0863/V/2005 | 3.000.000,- |
| 302 | Anirah | Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1860/XI/2005 | 1.000.000,- |
| 303 | Anirah/Rokayah | Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000153 | 1.000.000,- |
| 304 | Anirah | Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001152 | 5.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------------|---|----------------|--------------|
| 305 | Atam/Utik | Kp. Ranca Teureup Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0077/II/2006 | 2.000.000,- |
| 306 | Rahman Karyadi | Kp. Ciawitali Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0340/II/2005 | 7.500.000,- |
| 307 | Rahman Karyadi | Kp. Ciawitali Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0255/II/2005 | 2.500.000,- |
| 308 | Omoh | Kp. Bekong Desa Gunamekar Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1654/XI/2004 | 2.500.000,- |
| 309 | Nina/Agus | Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000604 | 7.500.000,- |
| 310 | Agus | Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000599 | 7.500.000,- |
| 311 | Galih/Agus | Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000602 | 7.500.000,- |
| 312 | Ai Alawiyah/Agus | Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000603 | 7.500.000,- |
| 313 | Ambar/Agus | Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000605 | 5.000.000,- |
| 314 | Suriani/Agus | Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000600 | 7.500.000,- |
| 315 | Opik/Agus | Kp. Pamungguan Desa Pamungguan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000601 | 7.500.000,- |
| 316 | Desi/M. Yunus | Kp. Niagara Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 4600126 | 7.500.000,- |
| 317 | Wahyudin | Kp. Babakan Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0791/V/2005 | 4.000.000,- |
| 318 | Wahyudin | Kp. Babakan Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0157/V/2005 | 3.000.000,- |
| 319 | Ijan Romansah | Kp. Babakan Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000781 | 6.000.000,- |
| 320 | Ijan Romansah | Kp. Babakan Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46001143 | 6.500.000,- |
| 321 | Ade Hidayat | Kp. Nempel Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000614 | 6.500.000,- |
| 322 | Koni Ginarti | Kp. Simpang Jaya Desa Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0475/IX/2006 | 5.000.000,- |
| 323 | Syarif Hidayat | Kp. Simpang Jaya Desa Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0476/IX/2006 | 3.000.000,- |
| 324 | Jejen A. | Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0349/II/2005 | 5.000.000,- |
| 325 | Jejen Abidin | Kp. Cibarengkok Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0350/II/2005 | 5.000.000,- |
| 326 | H. Muchtar | Kp. Cisela Utara Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1476/IX/2005 | 5.000.000,- |
| 327 | H. Muchtar | Kp. Cisela Utara Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000685 | 5.000.000,- |
| 328 | Somad | Kp. Ciparat Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1522/VIII/2002 | 10.000.000,- |

Halaman 20 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------------|--|---------------------------|-------------|
| 329 | Somadin/Hj. Iloh | Kp. Ciparat Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0359/VII/2006 | 5.000.000,- |
| 330 | Somadin | Kp. Ciparat Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 46000728 | 5.000.000,- |
| 331 | Ajun | Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000502 | 7.500.000,- |
| 332 | Ajun | Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 131/V/2006 | 6.000.000,- |
| 333 | Ajun | Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 14/I/2006 | 6.000.000,- |
| 334 | Ajun | Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0796/V/2005 | 6.000.000,- |
| 335 | Ajun | Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0010/I/05 | 5.000.000,- |
| 336 | Ajun | Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1390/X/2004 | 3.000.000,- |
| 337 | Ajun | Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1802/XI/2005 | 2.000.000,- |
| 338 | Bubun/Ajun | Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000503 | 7.000.000,- |
| 339 | Lilis/Ajun | Kp. Puncakkenanga Ds. Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000504 | 7.000.000,- |
| 340 | Kayah/Uju | Kp. Datarawi Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0467/III/2005 | 7.500.000,- |
| 341 | Uju | Kp. Datarawi Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0466/III/2005 | 7.500.000,- |
| 342 | Uju/Kayah | Kp. Datarawi Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0319/III/2006 | 5.000.000,- |
| 343 | Ining/Ridwan | Kp. Cibitung Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0442/III/2006 | 5.000.000,- |
| 344 | Inin/Engkos | Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0412/III/2003 | 4.500.000,- |
| 345 | Inin/Engkos | Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 1595/X/2003 | 5.000.000,- |
| 346 | Inin/Engkos | Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 1755/XI/2003 | 7.000.000,- |
| 347 | Inin/Engkos | Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 1892/XII/2003 | 3.000.000,- |
| 348 | Inin/Engkos | Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 023/I/2004 | 5.000.000,- |
| 349 | Inin | Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0432/III/2005 | 7.500.000,- |
| 350 | Engkos/Inin | Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0433/III/2005 | 7.500.000,- |
| 351 | Aceng/Inin | Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0434/III/2005 | 5.000.000,- |
| 352 | Inin | Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0805/V/2005 | 4.500.000,- |
| 353 | Inin | Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 1139/VII/BP R/ 2003 | 3.000.000,- |
| 354 | Inin | Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46001205 | 6.000.000,- |
| 355 | Engkos/Inin | Kp. Cibungur Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46001206 | 6.000.000,- |
| 356 | Apud/Wanti | Kp. Cibuluh Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46000509 | 5.000.000,- |
| 357 | Wanti | Kp. Cibuluh Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46000508 | 5.000.000,- |
| 358 | Wanti/Apud | Kp. Cibuluh Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46000510 | 7.000.000,- |
| 359 | Apud | Kp. Cibuluh Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46000701 | 3.000.000,- |
| 360 | Mulyana/Empuy | Kp. Pasir Pulus Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46000324 | 2.000.000,- |
| 361 | Ria M/Encep | Kp. Sukatani Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46001101 | 1.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-------------------------|--|--------------------|--------------|
| 362 | Ria Maryanti | Kp. Sukatani Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46000810 | 1.000.000,- |
| 363 | Ria M/Encep | Kp. Sukatani Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46000155 | 5.000.000,- |
| 364 | Heni Herlina | Kp. Sukatani Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46001259 | 5.000.000,- |
| 365 | Ondin | Kp. Amrun Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 2062/XII/200 5 | 7.000.000,- |
| 366 | Ondin | Kp. Amrun Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0258/VI/200 6 | 6.000.000,- |
| 367 | Galih Sonia/ Asep O. | Kp. Margahayu Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0457/III/2005 | 7.000.000,- |
| 368 | Karina R./Asep O. | Kp. Margahayu Desa Caringin Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0456/III/2005 | 7.000.000,- |
| 369 | Ucep | Kp. Cileunca Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kab. Garut | 0505IX/2006 | 2.000.000,- |
| 370 | Supendi | Kp. Bbk Limus Desa Purbayani Kec. Caringin Kab. Garut | 0187/V/2006 | 7.500.000,- |
| 371 | Oting/Supendi | Kp. Bbk Limus Desa Purbayani Kec. Caringin Kab. Garut | 188/V/2006 | 7.500.000,- |
| 372 | Suryana/Supendi | Kp. Bbk Limus Desa Purbayani Kec. Caringin Kab. Garut | 189/V/2006 | 7.500.000,- |
| 373 | Odin/Supendi | Kp. Bbk Limus Desa Purbayani Kec. Caringin Kab. Garut | 190/V/2006 | 7.500.000,- |
| 374 | Atmanah | Kp. Cileunca Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kab. Garut | 1309/VII/200 5 | 5.000.000,- |
| 375 | Hedah/Ayet | Kp. Margahayu Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kab. Garut | 46001201 | 5.000.000,- |
| 376 | Watnuji | Kp. Cileunca Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kab. Garut | 0292/III/2006 | 6.000.000,- |
| 377 | Nurhayati | Kp. Batu Maseuk Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kab. Garut | 1014/VI/200 3 | 10.000.000,- |
| 378 | Nurhayati | Kp. Batu Maseuk Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0687/V/2004 | 10.000.000,- |
| 379 | Nurhayati | Kp. Batu Maseuk Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kab. Garut | 1185/VIII/20 04 | 12.000.000,- |
| 380 | Nurhayati | Kp. Batu Maseuk Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0435/VIII/20 06 | 10.000.000,- |
| 381 | Royani | Kp. Pasir Laja Desa Indralayang Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46000817 | 5.000.000,- |
| 382 | Darson | Kp. Pasir Laja Desa Indralayang Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46001018 | 4.000.000,- |
| 383 | Ikar | Kp. Cimesung Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46001009 | 7.500.000,- |
| 384 | Atikah/Ikar | Kp. Cimesung Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46001010 | 7.500.000,- |
| 385 | Rasnawati/Ikar | Kp. Cimesung Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46001011 | 5.000.000,- |
| 386 | Ani/Ikar | Kp. Cimesung Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46001012 | 5.000.000,- |
| 387 | Aminah/Suminar | Kp. Jolokwaru Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46000912 | 79.000.000,- |
| 388 | Saep/Suminar | Kp. Jolokwaru Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46000913 | 16.000.000,- |
| 389 | Saep/Suminar | Kp. Jolokwaru Desa Cimahi Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46001008 | 5.000.000,- |
| 390 | Jamilah | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 1240/IX/200 4 | 7.000.000,- |
| 391 | Jamilah | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 1239/IX/200 4 | 7.000.000,- |
| 392 | Agus Dedi | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 1238/IX/200 4 | 6.000.000,- |
| 393 | Jamilah | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 0797/V/2005 | 7.000.000,- |
| 394 | Agus Dedi | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 0966/V/2005 | 6.000.000,- |
| 395 | Jamilah | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 0224/VI/200 6 | 6.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------|---|------------------------|-------------|
| 395 | Jamilah | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 0224/VI/2006 | 6.000.000,- |
| 396 | Agus Dedi | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000285 | 6.000.000,- |
| 397 | Jamilah | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000404 | 7.000.000,- |
| 398 | Jamilah | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000865 | 6.000.000,- |
| 399 | Agus Dedi | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000866 | 6.000.000,- |
| 400 | lik Taofiqoh | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000588 | 5.000.000,- |
| 401 | Unan | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 0511/X/2006 | 6.500.000,- |
| 402 | Unan | Kp. Cangkudu Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000719 | 3.000.000,- |
| 403 | Idrus | Kp. Gadog Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000809 | 5.000.000,- |
| 404 | Rasmaya | Kp. Gadog Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000807 | 6.000.000,- |
| 405 | Mamah | Kp. Gadog Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000808 | 5.000.000,- |
| 406 | Rukmini | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1604/X/BPR/ 2005 | 5.000.000,- |
| 407 | Rukmini | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1661/X/2005 | 5.000.000,- |
| 408 | Rukmini | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000989 | 4.000.000,- |
| 409 | Aring | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1732/XII/2004 | 6.500.000,- |
| 410 | Jumaenah/Aring | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1734/XII/2004 | 6.000.000,- |
| 411 | Aring | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 020/I/2006 | 3.000.000,- |
| 412 | Aring | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0294/III/2006 | 1.500.000,- |
| 413 | Ajuh/Aring | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0295/III/2006 | 1.500.000,- |
| 414 | Aring | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0482/III/2006 | 4.000.000,- |
| 415 | Aring | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 215/VI/2006 | 1.500.000,- |
| 416 | Aring | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0393/VIII/2006 | 3.500.000,- |
| 417 | Aring/Suryana | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0394/VIII/2006 | 1.000.000,- |
| 418 | Aring | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0554/X/2006 | 1.500.000,- |
| 419 | Aring | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000767 | 2.500.000,- |
| 420 | Arin/Suryana | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 460000768 | 4.500.000,- |
| 421 | Suryana/Aring | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 460000769 | 4.500.000,- |
| 422 | Aring | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 460000857 | 5.000.000,- |
| 423 | Aring/Jumaena | Kp. Cikuya Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 460001071 | 2.000.000,- |
| 424 | Dudung/Entin | Kp. Babakan Garut, Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000703 | 5.000.000,- |
| 425 | Iros/Entin Kartini | Kp. Warung Mindi Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1141/VII/BP R/ 2005 | 6.000.000,- |
| 426 | N. Nasrodin/Iros | Kp. Warung Mindi Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000074 | 5.000.000,- |
| 427 | Iros | Kp. Warung Mindi Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1509/IX/2005 | 2.000.000,- |
| 428 | Neni/Agus N. | Kp. Tenjolaut Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001190 | 5.000.000,- |
| 429 | Agus Nandang | Kp. Tenjolaut Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001189 | 5.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| 430 | Hasan | Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001163 | 2.000.000,- |
| 431 | Ikin S. | Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000488 | 7.000.000,- |
| 432 | Dessy | Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000497 | 4.000.000,- |
| 433 | Dessy | Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001060 | 3.000.000,- |
| 434 | Siti N. | Jalan Patriot Garut | 46001079 | 7.500.000,- |
| 435 | Lukman | Jalan Patriot Garut | 46001080 | 7.500.000,- |
| 436 | Agus | Jalan Patriot Garut | 46001081 | 7.500.000,- |
| 437 | Neni S. | Jalan Patriot Garut | 46001078 | 7.500.000,- |
| 438 | Siti Maesaroh | Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001228 | 6.000.000,- |
| 439 | Dika/Siti Maesaroh | Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001229 | 5.500.000,- |
| 440 | Titin Patimah/ Ridwan | Kp.Cibitung, Desa Sukarame Kabupaten Garut | 0443/III/2006 | 5.000.000,00 |
| 441 | Ajun | Kp. Puncak Kananga Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0155/II/2006 | 2.000.000,00 |
| 442 | Kusnadi | Kp.Hegarmahan Desa Caringin Kec. Caringin Kabupaten Garut | 0103/I/2006 | 2.000.000,00 |
| 443 | Kusnadi | Kp.Hegarmahan Desa Caringin Kec. Caringin Kabupaten Garut | 0356/VII/2006 | 2.000.000,00 |
| 444 | Lili/Kusnadi | Kp.Hegarmahan Desa Caringin Kec. Caringin Kabupaten Garut | 46000057 | 5.000.000,00 |
| 445 | Lili/Kusnadi | Kp.Hegarmahan Desa Caringin Kec. Caringin Kabupaten Garut | 46000058 | 5.000.000,00 |
| 446 | Kurniasih/Kusnadi | Kp.Hegarmahan Desa Caringin Kec. Caringin Kabupaten Garut | 46000059 | 7.500.000,00 |
| 447 | Artika/Maman S | Kp. Gupitan, Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut | 0270/VI/2006 | 3.000.000,00 |
| 448 | Dedi | Kp.Margahayu Desa Sukajaya Cisewu Kab. Garut | 46001122 | 3.000.000,00 |
| 449 | Dedi | Kp.Margahayu Desa Sukajaya Cisewu Kab. Garut | 0389/VII/2006 | 3.000.000,00 |
| 450 | Nani/Asep | Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 0315/III/2006 | 6.000.000,00 |
| 451 | Nani/Ruhiat | Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 0622/IV/2006 | 2.000.000,00 |
| 452 | Nani/Asep | Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 46000511 | 3.000.000,00 |
| 453 | Nani/Erot | Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 0241/II/2005 | 5.000.000,00 |
| 454 | Nani/Asep | Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 1136/VII/BP R/2005 | 2.000.000,00 |
| 455 | Asep/Nani | Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 0316/III/2006 | 3.000.000,00 |
| 456 | Nani/Erot | Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 460000773 | 1.000.000,00 |
| 457 | Ruhiat/Nani | Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 1905/XI/2006 | 10.000.000,00 |
| 458 | Osih/Ohin | Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 0595/III/2005 | 7.500.000,00 |
| 459 | Odin/Ohin | Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 0594/III/2005 | 7.500.000,00 |
| 460 | Ohin | Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 2130/XII/2006 | 7.500.000,00 |
| 461 | Dirman/Ohin | Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 0597/III/2005 | 7.500.000,00 |
| 462 | Ipah/Ohin | Kp. Cigebang Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut | 0596/III/2005 | 7.500.000,00 |
| 463 | Ani | Kp. Batumaseuk Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46000590 | 4.000.000,00 |
| 464 | Nandang | Kp. Batumaseuk Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kab. Garut | 46000589 | 4.000.000,00 |
| 465 | Unan | Kp. Cangkudu Desa Depok Kec.Pakenjeng Kab. Garut | 0511/IX/2006 | 6.500.000,00 |
| 466 | Unan | Kp. Cangkudu Desa Depok Kec.Pakenjeng Kab. Garut | 46000719 | 3.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|--------------------|--------------|
| 467 | Komar/Jojob | Kp. Cibeureum Desa Wangunjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0632/IV/2004 | 6.000.000,00 |
| 468 | Jojob | Kp. Cibeureum Desa Wangunjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0681/V/2004 | 7.000.000,00 |
| 469 | Jojob | Kp. Cibeureum Desa Wangunjaya Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 0708/IV/2005 | 2.000.000,00 |
| 470 | Maemunah | Kp. Manguneng Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1174/VII/2003 | 2.500.000,00 |
| 471 | Maemunah | Kp. Manguneng Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1336/VIII/2005 | 1.500.000,00 |
| 472 | Maemunah | Kp. Manguneng Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0784/V/2005 | 2.000.000,00 |
| 473 | Maemunah/Pandi | Kp. Manguneng Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1644/XI/2004 | 3.000.000,00 |
| 374 | Maemunah | Kp. Manguneng Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1131/VII/BP R/2005 | 2.500.000,00 |
| 475 | Lilis K | Kp. Sukamaju Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 46001125 | 3.000.000,00 |
| 476 | Nurhabib | Kp. Sukamaju Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 1399/VIII/2005 | 2.000.000,00 |
| 477 | Maman/Risris R | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0357/II/2005 | 7.000.000,00 |
| 478 | Risris R/ Maman | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0358/II/2005 | 7.000.000,00 |
| 479 | Risris R/Marhamah | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0360/II/2005 | 7.000.000,00 |
| 480 | Risris Riswandi | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0554/III/2005 | 2.500.000,00 |
| 481 | Risris Riswandi | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0937/V/2005 | 3.000.000,00 |
| 482 | Risris Riswandi | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 1772/X/2005 | 3.500.000,00 |
| 483 | Risris /Yanti | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0100/I/2006 | 7.000.000,00 |
| 484 | Yanti/Risris R | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0245/II/2006 | 4.000.000,00 |
| 485 | Risris R./Yanti | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0246/II/2006 | 4.000.000,00 |
| 486 | Risris Riswandi | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0291/II/2006 | 3.000.000,00 |
| 487 | Yanti Nurmayanti/ Risris | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0238/VI/2006 | 4.000.000,00 |
| 488 | Risris R/Yanti | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0543/X/2006 | 3.000.000,00 |
| 489 | Risris Riswandi | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 48000237 | 7.000.000,00 |
| 490 | Risris Riswandi | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 46000585 | 2.500.000,00 |
| 491 | Risris Riswandi | Kp. Cikaro Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 46000499 | 2.000.000,00 |
| 492 | Unang Supardi | Kp. Puncak Arjani Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0199/II/2006 | 2.500.000,00 |
| 493 | Een Suhaenah | Kp. Puncak Arjani Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000596 | 5.000.000,00 |
| 494 | Een Suhaenah | Kp. Puncak Arjani Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000597 | 1.400.000,00 |
| 495 | Een Suhaenah | Kp. Puncak Arjani Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000856 | 2.000.000,00 |
| 496 | Suminar | Kp. Cijangkar Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0138/V/2006 | 5.000.000,00 |
| 497 | Emis | Kp. Cipeuteuy Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | | 7.000.000,00 |

Halaman 25 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



| | | | | |
|--------|----------------|--|--------------------|------------------|
| 498 | Dedeh | Kp.Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 1561/X/2003 | 3.000.000,00 |
| 499 | Dedeh | Kp.Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0011/I/2004 | 1.500.000,00 |
| 500 | Dedeh/Kohar | Kp.Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 1561/X/2004 | 5.000.000,00 |
| 501 | Dedeh/Dewi | Kp.Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0927/V/2005 | 3.000.000,00 |
| 502 | Dedeh | Kp.Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 0178/I/2004 | 2.000.000,00 |
| 503 | Dedeh/Dewi | Kp.Cikanyere Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kab. Garut | 1674/X/2005 | 6.000.000,00 |
| 504 | Padli/H. Hadis | Kp. Zanzibar Desa Cihikeu Kecamatan Bungbulang Kab. Garut. | 0328/III/2006 | 1.000.000,- |
| 505 | Suryana, SPD | Kp. Neglasari Desa Cihike Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 1322/VIII/20 05 | 3.000.000,00 |
| 506 | Desy | Kp. Citalahab Desa Mekarjaya Kec.Bungbulang Kab. GARut | 46001050 | 3.000.000,00 |
| 507 | Rumini/Enuh | Kp. Tegal Lega Kec. Tegal Lega Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001109 | 5.000.000,00 |
| JUMLAH | | | | 3.599.300.000,00 |

Jadi jumlah keseluruhan atas simpanan dalam bentuk tabungan dan simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka adalah sebesar \pm Rp.4.078.223.227,00 (empat miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

7. Bahwa lagi pula Para Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat tersebut, maka atas seluruh buku tabungan dan seluruh *bilyet* deposito/simpanan berjangka atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa dengan demikian atas perbuatan Para Tergugat tersebut yaitu dengan tidak menepati janjinya atau tidak melaksanakan kewajibannya yaitu untuk mengembalikan seluruh simpanan baik dalam bentuk tabungan dan simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka milik Para Penggugat kepada Para Penggugat, adalah jelas menunjukkan atau merupakan perbuatan yang ingkar janji (wanprestasi) yang berakibat merugikan kepada Para Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan yang ingkar janji (wanprestasi) sehingga Para Tergugat dinyatakan mempunyai kewajiban pokok berupa simpanan dalam bentuk tabungan adalah sebesar \pm Rp478.923.227,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan kewajiban pokok berupa simpanan dalam bentuk deposito/simpanan



berjangka sebesar \pm Rp3.599.300.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat, sehingga Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan/membayar atas seluruh kewajibannya tersebut kepada Para Penggugat yaitu sebesar \pm Rp4.078.223.227,00 (empat miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

10. Bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut yang telah melakukan perbuatan yang ingkar janji (wanprestasi) tersebut, maka Para Penggugat telah menderita kerugian baik kerugian secara materil maupun secara immateril yang sangatlah besar, karenanya Para Penggugat berhak menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil maupun immateril, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1239 KUHPerdara *juncto* Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf f dan g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka Para Penggugat berhak untuk menuntut kepada Para Tergugat atas pengembalian seluruh tabungan dan deposito/simpanan berjangka milik Para Penggugat yang belum dibayar dan ganti rugi kerugian lainnya kepada Para Penggugat baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

11. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu telah melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian materil kepada Para Tergugat tersebut baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus berupa bunga atau jasa pinjaman yang telah diperjanjikan, (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1239 KUHPerdara *juncto* Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf f dan g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999), yaitu dengan perincian adalah sebagai berikut:

a. Kerugian atas bunga tabungan, sejak disimpannya uang hingga PD BPR Bungbulang Kabupaten Garut dinyatakan dicabut izinnya oleh Bank Indonesia yaitu pada tanggal 20 September 2007, yaitu dengan perincian:

| NO | REKENING | POKOK | SUKU BUNGA (%) | LAMA SIMPANAN | | Jml. Hari | JUMLAH BUNGA (Rp) |
|----|----------|---------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|
| | | | | Tgl. Awal | Tgl. Akhir | | |
| 1 | 21006106 | 18.844.327,00 | 6% | 16 November 2007 | 20 November 2007 | 4 | 12.390,79 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|----|-------------------|------------------|-----|--------------|
| 2 | 21104924 | 201.010.000,00 | 6% | 19 November 2007 | 20 November 2007 | 1 | 33.042,74 |
| 3 | T.3213038 | 31.000.000,00 | 6% | 18 November 2007 | 20 November 2007 | 2 | 10.191,78 |
| 4 | 21160172 | 1.400.000,00 | 6% | 19 September 2007 | 20 November 2007 | 62 | 14.268,49 |
| 5 | 4824 | 6.750.000,00 | 6% | 18 November 2007 | 20 November 2007 | 2 | 2.219,18 |
| 6 | 4823 | 9.400.000,00 | 6% | 18 November 2007 | 20 November 2007 | 2 | 3.090,41 |
| 7 | T. 21060132 | 24.750.500,00 | 6% | 7 November 2007 | 20 November 2007 | 13 | 52.891,48 |
| 8 | 4819 | 3.310.000,00 | 6% | 18 November 2007 | 20 November 2007 | 2 | 1.088,22 |
| 9 | 21060219 | 1.000.000,00 | 6% | 16 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 96 | 15.780,82 |
| 10 | 21001620 | 17.271.382,00 | 6% | 31 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 20 | 56.782,63 |
| 11 | 21060220 | 6.025.748,00 | 6% | 14 November 2007 | 20 November 2007 | 6 | 5.943,20 |
| 12 | 2103839 | 25.106.101,00 | 6% | 19 November 2007 | 20 November 2007 | 1 | 4.127,03 |
| 13 | 21060082 | 5.043.047,00 | 6% | 19 November 2007 | 20 November 2007 | 1 | 828,99 |
| 14 | T. 3210.800 | 70.000,00 | 6% | 2 Maret 2006 | 20 November 2007 | 628 | 7.226,30 |
| 15 | 21105456 | 10.360.000,00 | 6% | 15 November 2007 | 20 November 2007 | 5 | 8.515,07 |
| 16 | 211060188 | 70.000.000,00 | 6% | 20 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 31 | 356.712,33 |
| 17 | T. 32104984 | 410.000,00 | 6% | 18 November 2007 | 20 November 2007 | 2 | 134,79 |
| 18 | T.32104985 | 46.000,00 | 6% | 6 September 2006 | 20 November 2007 | 440 | 3.327,12 |
| 19 | 21005105 | 3.349.291,00 | 6% | 30 September 2007 | 20 November 2007 | 51 | 28.078,99 |
| 20 | 60081 | 200.000,00 | 6% | 1 Juli 2007 | 20 November 2007 | 142 | 4.668,49 |
| 21 | 21104885 | 119.000,00 | 6% | 14 September 2007 | 20 November 2007 | 67 | 1.310,63 |
| 22 | 4887 | 347.500,00 | 6% | 7 November 2007 | 20 November 2007 | 13 | 742,60 |
| 23 | 21060250 | 300.000,00 | 6% | 18 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 33 | 1.627,40 |
| 24 | 5244 | 1.210.000,00 | 6% | 16 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 96 | 19.094,79 |
| 25 | 2100.60003 | 660.000,00 | 6% | 2 November 2007 | 20 November 2007 | 18 | 1.952,88 |
| 26 | 2160044 | 672.000,00 | 6% | 2 November 2007 | 20 November 2007 | 18 | 1.988,38 |
| 27 | 21060204 | 25.000.000,00 | 6% | 26 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 86 | 353.424,66 |
| 28 | 21060017 | 8.324.409,00 | 6% | 30 September 2007 | 20 November 2007 | 51 | 69.788,00 |
| 29 | 21005358 | 373.437,00 | 6% | 5 September 2007 | 20 November 2007 | 76 | 4.665,40 |
| 30 | 21060135 | 2.500.000,00 | 6% | 16 April 2007 | 20 November 2007 | 218 | 89.589,04 |
| 31 | 21105411 | 1.520.000,00 | 6% | 18 November 2007 | 20 November 2007 | 2 | 499,73 |
| 32 | 21004802 | 511.580,00 | 6% | 2 November 2007 | 20 November 2007 | 18 | 1.513,72 |
| 33 | T21006101 | 500.000,00 | 6% | 01 September 2007 | 20 November 2007 | 80 | 6.575,34 |
| 34 | 21105151 | 168.158,00 | 6% | 28 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 23 | 635,78 |
| 35 | 21005317 | 1.541.367,00 | 6% | 10 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 41 | 10.388,39 |
| 36 | 21160237 | 930.500,00 | 6% | 17 November 2007 | 20 November 2007 | 3 | 458,88 |
| 37 | 21006060 | 526.220,00 | 6% | 31 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 81 | 7.006,66 |
| 38 | 21060127 | 956.869,00 | 6% | 7 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 44 | 6.920,92 |
| 39 | 321800 | 70.000,00 | 6% | 2 Maret 2006 | 20 November 2007 | 630 | 7.249,00 |
| 40 | 21005105 | 1.168.289,00 | 6% | 29 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 66 | 12.675,00 |
| Jumlah Total | | 478.923.227,00 | | | | | 1.218.990,32 |

- b. Kerugian atas bunga deposito/simpanan berjangka sejak disimpannya uang hingga PD. BPR Bungbulang Kab. Garut dinyatakan dicabut izinnya oleh Bank Indonesia yaitu pada tanggal 20 September 2007, yaitu dengan perincian :

Halaman 28 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | REKENING | POKOK DEPOSITO (Rp) | BUNGA/T H (% p.a.) | LAMA SIMPANAN | | Jml. Hari | JUMLAH BUNGA (Rp) |
|----|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|
| | | | | Tgl. Awal | Tgl. Akhir | | |
| 1 | 0347/VII/2006 | 50.000.000,00 | 24% | 14 Juli 2006 | 20 November 2007 | 494 | 16.241.095,89 |
| 2 | 0281/VI/2006 | 5.000.000,00 | 17% | 22 Juni 2006 | 20 November 2007 | 516 | 1.201.643,84 |
| 3 | 05191/X/2006 | 7.500.000,00 | 16% | 17 September 2006 | 20 November 2007 | 429 | 1.410.410,96 |
| 4 | 46000349 | 4.500.000,00 | 14% | 17 Januari 2007 | 20 November 2007 | 307 | 529.890,41 |
| 5 | 46000693 | 7.500.000,00 | 18% | 7 Mei 2007 | 20 November 2007 | 197 | 728.630,14 |
| 6 | 46000956 | 5.000.000,00 | 18% | 30 Juli 2007 | 20 November 2007 | 113 | 278.630,14 |
| 7 | 46001199 | 1.000.000,00 | 18% | 31 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 20 | 9.863,01 |
| 8 | 0280/VI/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 22 Januari 2006 | 20 November 2007 | 667 | 2.329.931,51 |
| 9 | 46000881 | 7.500.000,00 | 20% | 8 Juli 2007 | 20 November 2007 | 135 | 565.890,41 |
| 10 | 0911/V/2005 | 80.000.000,00 | 24% | 18 Mei 2005 | 20 November 2007 | 916 | 48.184.109,59 |
| 11 | 01051/VI/2005 | 60.000.000,00 | 24% | 15 Juni 2005 | 20 November 2007 | 888 | 35.033.424,66 |
| 12 | 0300/III/2006 | 50.000.000,00 | 24% | 3 Maret 2006 | 20 November 2007 | 627 | 20.613.698,63 |
| 13 | 46000098 | 50.000.000,00 | 24% | 29 Oktober 2006 | 20 November 2007 | 387 | 12.723.287,67 |
| 14 | 46000301 | 50.000.000,00 | 24% | 7 Januari 2007 | 20 November 2007 | 317 | 10.421.917,81 |
| 15 | 46000419 | 30.000.000,00 | 24% | 7 Februari 2007 | 20 November 2007 | 286 | 5.641.643,84 |
| 16 | 46000456 | 35.000.000,00 | 24% | 15 Februari 2007 | 20 November 2007 | 278 | 6.397.808,22 |
| 17 | 46000496 | 45.000.000,00 | 24% | 28 Februari 2007 | 20 November 2007 | 265 | 7.841.095,89 |
| 18 | 46000607 | 20.000.000,00 | 24% | 7 April 2007 | 20 November 2007 | 227 | 2.985.205,48 |
| 19 | 46000713 | 30.000.000,00 | 24% | 10 Mei 2007 | 20 November 2007 | 194 | 3.826.849,32 |
| 20 | 46000937 | 50.000.000,00 | 24% | 21 Juli 2007 | 20 November 2007 | 122 | 4.010.958,90 |
| 21 | 46000939 | 40.000.000,00 | 24% | 22 Juli 2007 | 20 November 2007 | 121 | 3.182.465,75 |
| 22 | 46001007 | 10.000.000,00 | 24% | 12 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 100 | 657.534,25 |
| 23 | 46001097 | 20.000.000,00 | 24% | 12 September 2007 | 20 November 2007 | 69 | 907.397,26 |
| 24 | 0059/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 9 Januari 2006 | 20 November 2007 | 680 | 3.353.424,66 |
| 25 | 0060/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 9 Januari 2006 | 20 November 2007 | 680 | 3.353.424,66 |
| 26 | 0061/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 9 Januari 2006 | 20 November 2007 | 680 | 3.353.424,66 |
| 27 | 0062/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 9 Januari 2006 | 20 November 2007 | 680 | 3.353.424,66 |
| 28 | 0063/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 9 Januari 2006 | 20 November 2007 | 680 | 3.353.424,66 |
| 29 | 0065/I/2006 | 5.000.000,00 | 24% | 9 Januari 2006 | 20 November 2007 | 680 | 2.235.616,44 |
| 30 | 116/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 30 April 2006 | 20 November 2007 | 569 | 2.034.369,86 |
| 31 | 117/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 30 April 2006 | 20 November 2007 | 569 | 2.034.369,86 |
| 32 | 118/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 30 April 2006 | 20 November 2007 | 569 | 2.034.369,86 |
| 33 | 119/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 30 April 2006 | 20 November 2007 | 569 | 2.034.369,86 |
| 34 | 120/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 30 April 2006 | 20 November 2007 | 569 | 2.034.369,86 |
| 35 | 121/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 30 April 2006 | 20 November 2007 | 569 | 2.034.369,86 |
| 36 | 122/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 30 April 2006 | 20 November 2007 | 569 | 2.034.369,86 |
| 37 | 123/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 30 April 2006 | 20 November 2007 | 569 | 2.034.369,86 |

Halaman 29 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-----|-------------------|------------------|------|---------------|
| 38 | 124/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 30 April 2006 | 20 November 2007 | 569 | 2.034.369,86 |
| 39 | 125/IV/2006 | 2.500.000,00 | 17% | 30 April 2006 | 20 November 2007 | 569 | 678.123,29 |
| 40 | 0412/II/2005 | 100.000.000,00 | 24% | 24 Februari 2005 | 20 November 2007 | 999 | 65.687.671,23 |
| 41 | 46001035 | 3.000.000,00 | 14% | 19 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 93 | 107.013,70 |
| 42 | 46000952 | 5.000.000,00 | 12% | 28 Juli 2007 | 20 November 2007 | 115 | 189.041,10 |
| 43 | 0936/VI/2003 | 1.500.000,00 | 24% | 4 Juni 2003 | 20 November 2007 | 1630 | 1.607.671,23 |
| 44 | 46000905 | 7.500.000,00 | 18% | 13 Juli 2007 | 20 November 2007 | 130 | 480.821,92 |
| 45 | 46000906 | 7.500.000,00 | 18% | 13 Juli 2007 | 20 November 2007 | 130 | 480.821,92 |
| 46 | 46000907 | 7.500.000,00 | 18% | 13 Juli 2007 | 20 November 2007 | 130 | 480.821,92 |
| 47 | 46000908 | 7.500.000,00 | 18% | 13 Juli 2007 | 20 November 2007 | 130 | 480.821,92 |
| 48 | 46000909 | 5.000.000,00 | 18% | 13 Juli 2007 | 20 November 2007 | 130 | 320.547,95 |
| 49 | 46000910 | 5.000.000,00 | 18% | 13 Juli 2007 | 20 November 2007 | 130 | 320.547,95 |
| 50 | 46001154 | 50.000.000,00 | 20% | 10 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 41 | 1.145.753,42 |
| 51 | 0265/VI/2006 | 2.000.000,00 | 17% | 17 Juni 2006 | 20 November 2007 | 521 | 485.315,07 |
| 52 | 1114/VIII/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 7 Agustus 2004 | 20 November 2007 | 1200 | 4.694.794,52 |
| 53 | 1614/XI/2004 | 7.500.000,00 | 20% | 6 November 2004 | 20 November 2007 | 1109 | 4.648.684,93 |
| 54 | 01095/VI/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 25 Juni 2005 | 20 November 2007 | 878 | 981.435,62 |
| 55 | 1545/IX/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 18 September 2005 | 20 November 2007 | 793 | 886.421,92 |
| 56 | 1837/XI/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 9 November 2005 | 20 November 2007 | 741 | 1.656.591,78 |
| 57 | 2109/XII/2005 | 1.500.000,00 | 20% | 26 Desember 2005 | 20 November 2007 | 694 | 581.819,18 |
| 58 | 0137/I/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 28 Januari 2006 | 20 November 2007 | 661 | 554.153,42 |
| 59 | 0277/II/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 25 Februari 2006 | 20 November 2007 | 633 | 530.679,45 |
| 60 | 46000376 | 1.000.000,00 | 14% | 27 Januari 2007 | 20 November 2007 | 297 | 113.917,81 |
| 61 | 0230/II/2006 | 15.000.000,00 | 24% | 16 Februari 2006 | 20 November 2007 | 642 | 6.332.054,79 |
| 62 | 46000592 | 10.000.000,00 | 24% | 4 April 2007 | 20 November 2007 | 230 | 1.512.328,77 |
| 63 | 01006/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 9 Juni 2005 | 20 November 2007 | 894 | 4.408.767,12 |
| 64 | 01007/VI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 9 Juni 2005 | 20 November 2007 | 894 | 2.939.178,08 |
| 65 | 01008/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 9 Juni 2005 | 20 November 2007 | 894 | 4.408.767,12 |
| 66 | 01009/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 9 Juni 2005 | 20 November 2007 | 894 | 4.408.767,12 |
| 67 | 01010/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 9 Juni 2005 | 20 November 2007 | 894 | 4.408.767,12 |
| 68 | 01011/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 9 Juni 2005 | 20 November 2007 | 894 | 4.408.767,12 |
| 69 | 01012/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 9 Juni 2005 | 20 November 2007 | 894 | 4.408.767,12 |
| 70 | 1892/XI/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 16 November 2005 | 20 November 2007 | 734 | 820.471,23 |
| 71 | 0449/III/2006 | 3.000.000,00 | 18% | 22 Maret 2006 | 20 November 2007 | 608 | 899.506,85 |
| 72 | 46000484 | 6.000.000,00 | 18% | 21 Februari 2007 | 20 November 2007 | 272 | 804.821,92 |
| 73 | 46000652 | 4.000.000,00 | 14% | 22 April 2007 | 20 November 2007 | 212 | 325.260,27 |
| 74 | 46000853 | 4.000.000,00 | 14% | 20 Juni 2007 | 20 November 2007 | 153 | 234.739,73 |
| 75 | 46000911 | 2.000.000,00 | 14% | 13 Juli 2007 | 20 November 2007 | 130 | 99.726,03 |
| 76 | 1480/IX/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 5 September 2005 | 20 November 2007 | 806 | 3.378.575,34 |
| 77 | 1439/VIII/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 31 Agustus 2005 | 20 November 2007 | 811 | 1.813.084,93 |

Halaman 30 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|-----|------------------|------------------|------|--------------|
| 78 | 1669/X/2005 | 3.500.000,00 | 20% | 8 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 773 | 1.512.115,07 |
| 79 | 0381/III/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 12 Maret 2006 | 20 November 2007 | 618 | 1.727.013,70 |
| 80 | 0201/II/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 10 Februari 2006 | 20 November 2007 | 648 | 543.254,79 |
| 81 | 46001167 | 6.000.000,00 | 14% | 18 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 33 | 75.945,21 |
| 82 | 46001168 | 6.000.000,00 | 14% | 18 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 33 | 75.945,21 |
| 83 | 46000108 | 7.000.000,00 | 20% | 1 November 2006 | 20 November 2007 | 384 | 1.502.334,25 |
| 84 | 46000109 | 7.000.000,00 | 20% | 1 November 2006 | 20 November 2007 | 384 | 1.502.334,25 |
| 85 | 46000110 | 6.000.000,00 | 20% | 1 November 2006 | 20 November 2007 | 384 | 1.287.715,07 |
| 86 | 46000253 | 6.000.000,00 | 18% | 27 Desember 2006 | 20 November 2007 | 328 | 970.520,55 |
| 87 | 46000254 | 3.000.000,00 | 18% | 27 Desember 2006 | 20 November 2007 | 328 | 485.260,27 |
| 88 | 46000342 | 3.000.000,00 | 20% | 15 Januari 2007 | 20 November 2007 | 309 | 518.104,11 |
| 89 | 46000377 | 2.000.000,00 | 20% | 27 Januari 2007 | 20 November 2007 | 297 | 331.989,04 |
| 90 | 46000382 | 4.000.000,00 | 20% | 29 Januari 2007 | 20 November 2007 | 295 | 659.506,85 |
| 91 | 46000383 | 2.000.000,00 | 20% | 29 Januari 2007 | 20 November 2007 | 295 | 329.753,42 |
| 92 | 46000384 | 4.000.000,00 | 20% | 29 Januari 2007 | 20 November 2007 | 295 | 659.506,85 |
| 93 | 46000671 | 1.900.000,00 | 20% | 30 April 2007 | 20 November 2007 | 204 | 216.631,23 |
| 94 | 46000679 | 2.000.000,00 | 20% | 2 Mei 2007 | 20 November 2007 | 202 | 225.797,26 |
| 95 | 46000680 | 5.000.000,00 | 20% | 2 Mei 2007 | 20 November 2007 | 202 | 564.493,15 |
| 96 | 46000681 | 5.000.000,00 | 20% | 2 Mei 2007 | 20 November 2007 | 202 | 564.493,15 |
| 97 | 46000793 | 7.000.000,00 | 20% | 9 Juni 2007 | 20 November 2007 | 164 | 641.621,92 |
| 98 | 46000852 | 3.000.000,00 | 20% | 27 Juni 2007 | 20 November 2007 | 146 | 244.800,00 |
| 99 | 46000914 | 5.500.000,00 | 20% | 14 Juli 2007 | 20 November 2007 | 129 | 396.542,47 |
| 100 | 46000915 | 5.500.000,00 | 20% | 14 Juli 2007 | 20 November 2007 | 129 | 396.542,47 |
| 101 | 46001039 | 7.000.000,00 | 14% | 20 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 92 | 254.071,23 |
| 102 | 46001040 | 6.000.000,00 | 14% | 20 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 92 | 217.775,34 |
| 103 | 46001041 | 7.000.000,00 | 14% | 20 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 92 | 254.071,23 |
| 104 | 46000890 | 5.000.000,00 | 14% | 9 Juli 2007 | 20 November 2007 | 134 | 256.986,30 |
| 105 | 46000891 | 4.000.000,00 | 14% | 9 Juli 2007 | 20 November 2007 | 134 | 205.589,04 |
| 106 | 46000634 | 5.000.000,00 | 14% | 18 April 2007 | 20 November 2007 | 216 | 414.246,58 |
| 107 | 46000635 | 5.000.000,00 | 14% | 18 April 2007 | 20 November 2007 | 216 | 414.246,58 |
| 108 | 46001251 | 5.000.000,00 | 14% | 15 November 2007 | 20 November 2007 | 5 | 9.863,01 |
| 109 | 46001250 | 5.000.000,00 | 14% | 15 November 2007 | 20 November 2007 | 5 | 9.863,01 |
| 110 | 46000975 | 5.500.000,00 | 14% | 4 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 108 | 227.835,62 |
| 111 | 193/I/2000 | 3.000.000,00 | 24% | 23 Januari 2000 | 20 November 2007 | 2858 | 5.637.698,63 |
| 112 | 46001231 | 5.000.000,00 | 11% | 8 November 2007 | 20 November 2007 | 12 | 18.082,19 |
| 113 | 46000022 | 6.500.000,00 | 13% | 11 Oktober 2006 | 20 November 2007 | 405 | 937.602,74 |
| 114 | 46000414 | 7.000.000,00 | 13% | 05 Februari 2007 | 20 November 2007 | 288 | 718.027,40 |
| 115 | 46000415 | 5.000.000,00 | 13% | 5 Februari 2007 | 20 November 2007 | 288 | 512.876,71 |
| 116 | 46000416 | 5.000.000,00 | 13% | 5 Februari 2007 | 20 November 2007 | 288 | 512.876,71 |
| 117 | 46000455 | 5.000.000,00 | 13% | 14 Februari 2007 | 20 November 2007 | 279 | 496.849,32 |

Halaman 31 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-----|--------------|
| 118 | 46000534 | 4.500.000,00 | 13% | 12 Maret 2007 | 20 November 2007 | 253 | 405.493,15 |
| 119 | 46000732 | 7.000.000,00 | 12% | 20 Mei 2007 | 20 November 2007 | 184 | 423.452,05 |
| 120 | 46000733 | 5.000.000,00 | 12% | 20 Mei 2007 | 20 November 2007 | 184 | 302.465,75 |
| 121 | 46000834 | 5.000.000,00 | 12% | 20 Juni 2007 | 20 November 2007 | 153 | 251.506,85 |
| 122 | 46000957 | 7.000.000,00 | 12% | 1 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 111 | 255.452,05 |
| 123 | 46000958 | 7.000.000,00 | 12% | 1 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 111 | 255.452,05 |
| 124 | 46000959 | 7.000.000,00 | 12% | 1 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 111 | 255.452,05 |
| 125 | 46000960 | 7.000.000,00 | 12% | 1 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 111 | 255.452,05 |
| 126 | 46000961 | 7.000.000,00 | 12% | 1 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 111 | 255.452,05 |
| 127 | 46000994 | 5.000.000,00 | 12% | 9 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 103 | 169.315,07 |
| 128 | 46001108 | 5.000.000,00 | 12% | 15 September 2007 | 20 November 2007 | 66 | 108.493,15 |
| 129 | 46001110 | 7.500.000,00 | 12% | 16 September 2007 | 20 November 2007 | 65 | 160.273,97 |
| 130 | 46001111 | 7.500.000,00 | 12% | 16 September 2007 | 20 November 2007 | 65 | 160.273,97 |
| 131 | 46001112 | 7.000.000,00 | 12% | 16 September 2007 | 20 November 2007 | 65 | 149.589,04 |
| 132 | 46001162 | 7.500.000,00 | 12% | 18 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 33 | 81.369,86 |
| 133 | 1278/VII/2005 5 | 7.500.000,00 | 20% | 31 Juli 2005 | 20 November 2007 | 842 | 3.529.479,45 |
| 134 | 46000040 | 5.000.000,00 | 20% | 15 Oktober 2006 | 20 November 2007 | 401 | 1.120.602,74 |
| 135 | 46000039 | 5.000.000,00 | 20% | 15 Oktober 2006 | 20 November 2007 | 401 | 1.120.602,74 |
| 136 | 027/I/2006 | 2.500.000,00 | 20% | 04 Januari 2006 | 20 November 2007 | 685 | 957.123,29 |
| 137 | 46000038 | 7.500.000,00 | 20% | 15 Oktober 2006 | 20 November 2007 | 401 | 1.680.904,11 |
| 138 | 2077/XII/2005 5 | 2.000.000,00 | 20% | 18 Desember 2005 | 20 November 2007 | 702 | 784.701,37 |
| 139 | 1826/XI/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 9 November 2005 | 20 November 2007 | 741 | 1.656.591,78 |
| 140 | 46000140 | 7.000.000,00 | 12% | 8 November 2006 | 20 November 2007 | 377 | 867.616,44 |
| 141 | 46000141 | 7.000.000,00 | 12% | 8 November 2006 | 20 November 2007 | 377 | 867.616,44 |
| 142 | 0720/IV/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 17 April 2005 | 20 November 2007 | 947 | 3.969.616,44 |
| 143 | 46000294 | 25.000.000,00 | 24% | 5 Januari 2007 | 20 November 2007 | 319 | 5.243.835,62 |
| 144 | 46000684 | 1.000.000,00 | 18% | 04 Mei 2007 | 20 November 2007 | 200 | 98.630,14 |
| 145 | 46001115 | 7.500.000,00 | 18% | 16 September 2007 | 20 November 2007 | 65 | 240.410,96 |
| 146 | 46001116 | 7.500.000,00 | 18% | 16 September 2007 | 20 November 2007 | 65 | 240.410,96 |
| 147 | 46001117 | 7.500.000,00 | 18% | 16 September 2007 | 20 November 2007 | 65 | 240.410,96 |
| 148 | 46001118 | 2.500.000,00 | 18% | 16 September 2007 | 20 November 2007 | 65 | 80.136,99 |
| 149 | 46001235 | 7.500.000,00 | 14% | 10 November 2007 | 20 November 2007 | 10 | 28.767,12 |
| 150 | 46001236 | 5.000.000,00 | 14% | 10 November 2007 | 20 November 2007 | 10 | 19.178,08 |
| 151 | 46001237 | 5.000.000,00 | 14% | 10 November 2007 | 20 November 2007 | 10 | 19.178,08 |
| 152 | 46000882 | 7.500.000,00 | 20% | 8 Juli 2007 | 20 November 2007 | 135 | 565.890,41 |
| 153 | 46000883 | 7.500.000,00 | 20% | 8 Juli 2007 | 20 November 2007 | 135 | 565.890,41 |
| 154 | 46000884 | 7.500.000,00 | 20% | 8 Juli 2007 | 20 November 2007 | 135 | 565.890,41 |
| 155 | 46000885 | 7.500.000,00 | 20% | 8 Juli 2007 | 20 November 2007 | 135 | 565.890,41 |
| 156 | 46000886 | 7.500.000,00 | 20% | 8 Juli 2007 | 20 November 2007 | 135 | 565.890,41 |
| 157 | 46000887 | 5.000.000,00 | 20% | 8 Juli 2007 | 20 November 2007 | 135 | 377.260,27 |

Halaman 32 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|-----|-------------------|------------------|------|--------------|
| 158 | 46001048 | 2.000.000,00 | 12% | 23 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 89 | 58.520,55 |
| 159 | 46001123 | 2.000.000,00 | 18% | 20 September 2007 | 20 November 2007 | 61 | 60.164,38 |
| 160 | 46000694 | 7.000.000,00 | 18% | 7 Mei 2007 | 20 November 2007 | 197 | 680.054,79 |
| 161 | 46001211 | 1.000.000,00 | 18% | 3 November 2007 | 20 November 2007 | 17 | 8.383,56 |
| 162 | 46001119 | 5.000.000,00 | 18% | 16 September 2007 | 20 November 2007 | 65 | 160.273,97 |
| 163 | 46001153 | 1.500.000,00 | 18% | 10 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 41 | 30.328,77 |
| 164 | 1666/X/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 8 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 773 | 3.812.054,79 |
| 165 | 46000668 | 7.500.000,00 | 18% | 27 April 2007 | 20 November 2007 | 207 | 765.616,44 |
| 66 | 1695/X/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 13 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 768 | 2.524.931,51 |
| 167 | 1696/X/2005 | 5.500.000,00 | 24% | 13 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 768 | 2.777.424,66 |
| 168 | 0097/II/2006 | 7.000.000,00 | 24% | 15 Januari 2006 | 20 November 2007 | 674 | 3.102.246,58 |
| 169 | 46000991 | 7.000.000,00 | 12% | 8 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 104 | 239.342,47 |
| 170 | 46000992 | 7.000.000,00 | 12% | 8 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 104 | 239.342,47 |
| 171 | 1203/VIII/2004 | 1.500.000,00 | 20% | 26 Agustus 2004 | 20 November 2007 | 1181 | 990.098,63 |
| 172 | 048/IV/2006 | 7.000.000,00 | 17% | 12 April 2006 | 20 November 2007 | 587 | 1.958.810,96 |
| 173 | 047/IV/2006 | 7.000.000,00 | 17% | 12 April 2006 | 20 November 2007 | 587 | 1.958.810,96 |
| 174 | 0392/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 20 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1003 | 4.946.301,37 |
| 175 | 46000840 | 100.000.000,00 | 24% | 21 Juni 2007 | 20 November 2007 | 152 | 9.994.520,55 |
| 176 | 0387/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 20 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1003 | 4.946.301,37 |
| 177 | 0389/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 20 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1003 | 4.946.301,37 |
| 178 | 46000656 | 7.500.000,00 | 24% | 24 April 2007 | 20 November 2007 | 210 | 1.035.616,44 |
| 179 | 1694/XI/2004 | 7.500.000,00 | 24% | 25 November 2004 | 20 November 2007 | 1090 | 5.375.342,47 |
| 180 | 1614/X/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 2 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 779 | 3.841.643,84 |
| 181 | 1544/IX/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 18 September 2005 | 20 November 2007 | 793 | 3.910.684,93 |
| 182 | 0583/IV/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 12 April 2004 | 20 November 2007 | 1317 | 6.061.808,22 |
| 183 | 0584/IV/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 12 April 2004 | 20 November 2007 | 1317 | 6.061.808,22 |
| 184 | 46000230 | 5.000.000,00 | 24% | 14 Desember 2006 | 20 November 2007 | 341 | 1.121.095,89 |
| 185 | 1070/VII/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 26 Juli 2004 | 20 November 2007 | 1212 | 5.578.520,55 |
| 186 | 0391/II/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 20 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1003 | 3.297.534,25 |
| 187 | 0585/IV/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 12 April 2004 | 20 November 2007 | 1317 | 6.061.808,22 |
| 188 | 1907/XI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 16 November 2005 | 20 November 2007 | 734 | 2.413.150,68 |
| 189 | 1908/XI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 16 November 2005 | 20 November 2007 | 734 | 2.413.150,68 |
| 190 | 46000626 | 7.000.000,00 | 14% | 14 April 2007 | 20 November 2007 | 220 | 607.561,64 |
| 191 | 46000627 | 7.000.000,00 | 14% | 14 April 2007 | 20 November 2007 | 220 | 607.561,64 |
| 192 | 46000628 | 7.000.000,00 | 14% | 14 April 2007 | 20 November 2007 | 220 | 607.561,64 |
| 193 | 0386/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 20 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1003 | 4.946.301,37 |
| 194 | 0388/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 20 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1003 | 4.946.301,37 |
| 195 | 0390/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 25 November 2004 | 20 November 2007 | 1090 | 5.375.342,47 |
| 196 | 1695/XI/2004 | 7.500.000,00 | 24% | 20 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1003 | 4.946.301,37 |
| 197 | 46000231 | 5.000.000,00 | 24% | 14 Desember 2006 | 20 November 2007 | 341 | 1.121.095,89 |

Halaman 33 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|------|---------------|
| 198 | 1071/VII/2004 4 | 7.000.000,00 | 24% | 26 Juli 2004 | 20 November 2007 | 1212 | 5.578.520,55 |
| 199 | 1543/IX/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 18 September 2005 | 20 November 2007 | 793 | 3.910.684,93 |
| 200 | 1613/X/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 2 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 779 | 3.841.643,84 |
| 201 | 46000657 | 7.500.000,00 | 24% | 20 April 2007 | 20 November 2007 | 214 | 1.055.342,47 |
| 202 | 1074/IX/2003 | 10.000.000,00 | 24% | 12 September 2003 | 20 November 2007 | 1530 | 10.060.273,97 |
| 203 | 1506/IX/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 11 September 2005 | 20 November 2007 | 800 | 2.630.136,99 |
| 204 | 1505/IX/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 11 September 2005 | 20 November 2007 | 800 | 2.630.136,99 |
| 205 | 1962/XI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 27 November 2005 | 20 November 2007 | 723 | 2.376.986,30 |
| 206 | 1963/XI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 27 November 2005 | 20 November 2007 | 723 | 2.376.986,30 |
| 207 | 46001249 | 7.000.000,00 | 11% | 14 November 2007 | 20 November 2007 | 6 | 12.657,53 |
| 208 | 1835/XI/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 9 November 2005 | 20 November 2007 | 741 | 2.070.739,73 |
| 209 | 0290/II/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 6 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1017 | 3.410.432,88 |
| 210 | 46000517 | 4.000.000,00 | 14% | 4 Maret 2007 | 20 November 2007 | 261 | 400.438,36 |
| 211 | 1163/VII/BP R/05 | 5.000.000,00 | 20% | 6 Juli 2005 | 20 November 2007 | 867 | 2.422.849,32 |
| 212 | 46000889 | 5.000.000,00 | 14% | 8 Juli 2007 | 20 November 2007 | 135 | 266.301,37 |
| 213 | 46001088 | 5.000.000,00 | 14% | 7 September 2007 | 20 November 2007 | 74 | 141.917,81 |
| 214 | 46000692 | 5.000.000,00 | 14% | 6 Mei 2007 | 20 November 2007 | 198 | 390.575,34 |
| 215 | 46000990 | 5.000.000,00 | 14% | 18 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 94 | 180.273,97 |
| 216 | 1996/XII/2005 5 | 49.000.000,00 | 24% | 4 Desember 2005 | 20 November 2007 | 716 | 23.068.931,51 |
| 217 | 0347/III/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 8 Maret 2006 | 20 November 2007 | 622 | 2.085.830,14 |
| 218 | 0644/IV/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 6 April 2005 | 20 November 2007 | 958 | 2.677.150,68 |
| 219 | 1836/XI/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 9 November 2005 | 20 November 2007 | 741 | 2.070.739,73 |
| 220 | 0835/V/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 6 Mei 2005 | 20 November 2007 | 928 | 2.074.652,05 |
| 221 | 0172/II/2006 | 7.000.000,00 | 20% | 5 Februari 2006 | 20 November 2007 | 653 | 2.554.750,68 |
| 222 | 46000612 | 5.000.000,00 | 14% | 8 April 2007 | 20 November 2007 | 226 | 433.424,66 |
| 223 | 46001150 | 5.000.000,00 | 14% | 7 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 44 | 84.383,56 |
| 224 | 46000518 | 4.000.000,00 | 14% | 4 Maret 2007 | 20 November 2007 | 261 | 400.438,36 |
| 225 | 46001059 | 1.000.000,00 | 14% | 25 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 87 | 33.369,86 |
| 226 | 46001212 | 3.500.000,00 | 14% | 3 November 2007 | 20 November 2007 | 17 | 22.821,92 |
| 227 | 46001030 | 2.000.000,00 | 14% | 18 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 94 | 72.109,59 |
| 228 | 46000982 | 2.000.000,00 | 14% | 6 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 106 | 81.315,07 |
| 229 | 46001024 | 7.000.000,00 | 14% | 15 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 97 | 260.438,36 |
| 230 | 46000243 | 3.000.000,00 | 11% | 15 Desember 2006 | 20 November 2007 | 340 | 307.397,26 |
| 231 | 149/I/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 16 Januari 2005 | 20 November 2007 | 1038 | 1.740.427,40 |
| 232 | 1333/IX/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 15 September 2004 | 20 November 2007 | 1161 | 3.893.326,03 |
| 233 | 180/V/2006 | 2.000.000,00 | 17% | 15 Mei 2006 | 20 November 2007 | 554 | 528.197,26 |
| 234 | 46001093 | 5.000.000,00 | 11% | 10 September 2007 | 20 November 2007 | 71 | 106.986,30 |
| 235 | 1856/XII/2004 4 | 3.000.000,00 | 20% | 26 Desember 2004 | 20 November 2007 | 1059 | 1.775.638,36 |
| 236 | 0467/III/2006 | 4.000.000,00 | 18% | 27 Maret 2006 | 20 November 2007 | 603 | 1.189.479,45 |
| 237 | 1560/X/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 25 Oktober 2004 | 20 November 2007 | 1121 | 3.759.189,04 |

Halaman 34 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|-----|-------------------|------------------|------|--------------|
| 238 | 46000563 | 4.000.000,00 | 14% | 25 Maret 2007 | 20 November 2007 | 240 | 368.219,18 |
| 239 | 1844/XI/2003 | 4.000.000,00 | 21% | 23 November 2003 | 20 November 2007 | 1458 | 3.275.506,85 |
| 240 | 46000649 | 7.500.000,00 | 14% | 21 April 2007 | 20 November 2007 | 213 | 612.739,73 |
| 241 | 46000650 | 7.500.000,00 | 14% | 21 April 2007 | 20 November 2007 | 213 | 612.739,73 |
| 242 | 46000744 | 5.000.000,00 | 14% | 23 Mei 2007 | 20 November 2007 | 181 | 347.123,29 |
| 243 | 46000651 | 2.500.000,00 | 14% | 21 April 2007 | 20 November 2007 | 213 | 204.246,58 |
| 244 | 46000951 | 5.000.000,00 | 12% | 27 Juli 2007 | 20 November 2007 | 116 | 190.684,93 |
| 245 | 084/IV/2006 | 5.000.000,00 | 12% | 19 April 2006 | 20 November 2007 | 580 | 953.424,66 |
| 246 | 0283/II/2004 | 11.000.000,00 | 24% | 15 Februari 2004 | 20 November 2007 | 1374 | 9.937.972,60 |
| 247 | 46001102 | 1.000.000,00 | 11% | 13 September 2007 | 20 November 2007 | 68 | 20.493,15 |
| 248 | 1821/XI/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 9 November 2005 | 20 November 2007 | 741 | 2.899.035,62 |
| 249 | 8004/XI/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 9 November 2005 | 20 November 2007 | 741 | 2.899.035,62 |
| 250 | 0098/I/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 15 Januari 2006 | 20 November 2007 | 674 | 2.825.260,27 |
| 251 | 0326/III/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 5 Maret 2006 | 20 November 2007 | 625 | 2.095.890,41 |
| 252 | 0343/III/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 8 Maret 2006 | 20 November 2007 | 622 | 2.607.287,67 |
| 253 | 144/V/2006 | 7.500.000,00 | 12% | 6 Mei 2006 | 20 November 2007 | 563 | 1.388.219,18 |
| 254 | 46000553 | 6.000.000,00 | 18% | 21 Maret 2007 | 20 November 2007 | 244 | 721.972,60 |
| 255 | 46000554 | 6.000.000,00 | 18% | 21 Maret 2007 | 20 November 2007 | 244 | 721.972,60 |
| 256 | 46000754 | 5.000.000,00 | 18% | 21 Maret 2007 | 20 November 2007 | 244 | 601.643,84 |
| 257 | 46000755 | 5.000.000,00 | 18% | 21 Maret 2007 | 20 November 2007 | 244 | 601.643,84 |
| 258 | 46001241 | 5.000.000,00 | 18% | 11 November 2007 | 20 November 2007 | 9 | 22.191,78 |
| 259 | 46001242 | 5.000.000,00 | 18% | 11 November 2007 | 20 November 2007 | 9 | 22.191,78 |
| 260 | 1824/XI/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 9 November 2005 | 20 November 2007 | 741 | 3.106.109,59 |
| 261 | 1825/XI/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 9 November 2005 | 20 November 2007 | 741 | 3.106.109,59 |
| 262 | 1859/XI/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 11 November 2005 | 20 November 2007 | 739 | 3.097.726,03 |
| 263 | 46000150 | 7.500.000,00 | 15% | 9 November 2006 | 20 November 2007 | 376 | 1.158.904,11 |
| 264 | 46000552 | 7.500.000,00 | 18% | 21 Maret 2007 | 20 November 2007 | 244 | 902.465,75 |
| 265 | 0819/V/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 04 Mei 2005 | 20 November 2007 | 930 | 1.039.561,64 |
| 266 | 2050/XII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 14 Desember 2005 | 20 November 2007 | 706 | 2.959.397,26 |
| 267 | 2051/XII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 14 Desember 2005 | 20 November 2007 | 706 | 2.959.397,26 |
| 268 | 2052/XII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 14 Desember 2005 | 20 November 2007 | 706 | 2.959.397,26 |
| 269 | 0092/I/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 14 Desember 2005 | 20 November 2007 | 706 | 1.183.758,90 |
| 270 | 0208/II/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 12 Februari 2006 | 20 November 2007 | 646 | 2.166.312,33 |
| 271 | 0209/II/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 12 Februari 2006 | 20 November 2007 | 646 | 2.166.312,33 |
| 272 | 2050/XII/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 4 Agustus 2005 | 20 November 2007 | 838 | 1.405.084,93 |
| 273 | 0085/I/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 13 Januari 2006 | 20 November 2007 | 676 | 1.889.095,89 |
| 274 | 2048/XII/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 14 Desember 2005 | 20 November 2007 | 706 | 1.183.758,90 |
| 275 | 1595/X/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 1 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 780 | 871.890,41 |
| 276 | 053/IV/2006 | 3.000.000,00 | 17% | 12 April 2006 | 20 November 2007 | 587 | 839.490,41 |
| 277 | 0891/V/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 14 Mei 2005 | 20 November 2007 | 920 | 2.570.958,90 |

Halaman 35 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|-----|-------------------|------------------|------|--------------|
| 278 | 1309/IX/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 11 September 2004 | 20 November 2007 | 1165 | 4.557.863,01 |
| 279 | 1677/X/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 9 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 772 | 3.020.317,81 |
| 280 | 1392/VIII/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 18 Agustus 2005 | 20 November 2007 | 824 | 2.302.684,93 |
| 281 | 01100/VI/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 26 Juni 2005 | 20 November 2007 | 877 | 3.676.191,78 |
| 282 | 0395/II/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1002 | 1.120.043,84 |
| 283 | 1390/VIII/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 18 Agustus 2005 | 20 November 2007 | 824 | 3.223.758,90 |
| 284 | 173/V/2006 | 3.000.000,00 | 15% | 12 Mei 2006 | 20 November 2007 | 557 | 686.712,33 |
| 285 | 1861/XI/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 11 November 2005 | 20 November 2007 | 739 | 2.065.150,68 |
| 286 | 1310/IX/2004 | 7.500.000,00 | 20% | 11 September 2004 | 20 November 2007 | 1165 | 4.883.424,66 |
| 287 | 0613/IV/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 21 April 2004 | 20 November 2007 | 1308 | 5.117.326,03 |
| 288 | 1391/VIII/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 18 Agustus 2005 | 20 November 2007 | 824 | 3.223.758,90 |
| 289 | 46001171 | 7.000.000,00 | 12% | 19 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 32 | 73.643,84 |
| 290 | 1678/X/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 9 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 772 | 3.020.317,81 |
| 291 | 1389/VIII/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 18 Agustus 2005 | 20 November 2007 | 824 | 3.223.758,90 |
| 292 | 0184/I/2005 | 3.500.000,00 | 20% | 23 Januari 2005 | 20 November 2007 | 1031 | 2.016.805,48 |
| 293 | 1676/X/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 9 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 772 | 2.588.843,84 |
| 294 | 01213/VII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 17 Juli 2005 | 20 November 2007 | 856 | 3.588.164,38 |
| 295 | 1325/VIII/2003 | 1.500.000,00 | 24% | 20 Agustus 2003 | 20 November 2007 | 1553 | 1.531.726,03 |
| 296 | 1406/VIII/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21 Agustus 2005 | 20 November 2007 | 821 | 917.720,55 |
| 297 | 0188/II/2006 | 2.500.000,00 | 20% | 8 Februari 2006 | 20 November 2007 | 650 | 908.219,18 |
| 298 | 0359/III/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 10 Maret 2006 | 20 November 2007 | 620 | 1.039.561,64 |
| 299 | 176/IX/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 11 September 2005 | 20 November 2007 | 800 | 2.630.136,99 |
| 300 | 46001234 | 7.500.000,00 | 14% | 10 November 2007 | 20 November 2007 | 10 | 28.767,12 |
| 301 | 0863/V/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 11 Mei 2005 | 20 November 2007 | 923 | 1.547.605,48 |
| 302 | 1860/XI/2005 | 1.000.000,00 | 20% | 11 November 2005 | 20 November 2007 | 739 | 413.030,14 |
| 303 | 46000153 | 1.000.000,00 | 15% | 12 November 2006 | 20 November 2007 | 373 | 153.287,67 |
| 304 | 46001152 | 5.000.000,00 | 14% | 8 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 43 | 82.465,75 |
| 305 | 0077/II/2006 | 2.000.000,00 | 20% | 12 Januari 2006 | 20 November 2007 | 677 | 756.756,16 |
| 306 | 0340/II/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 14 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1009 | 4.229.506,85 |
| 307 | 0255/II/2005 | 2.500.000,00 | 20% | 20 Februari 2006 | 20 November 2007 | 638 | 891.452,05 |
| 308 | 1654/XI/2004 | 2.500.000,00 | 20% | 12 November 2004 | 20 November 2007 | 1103 | 1.541.178,08 |
| 309 | 46000604 | 7.500.000,00 | 20% | 7 April 2007 | 20 November 2007 | 227 | 951.534,25 |
| 310 | 46000599 | 7.500.000,00 | 20% | 7 April 2007 | 20 November 2007 | 227 | 951.534,25 |
| 311 | 46000602 | 7.500.000,00 | 20% | 7 April 2007 | 20 November 2007 | 227 | 951.534,25 |
| 312 | 46000603 | 7.500.000,00 | 20% | 7 April 2007 | 20 November 2007 | 227 | 951.534,25 |
| 313 | 46000605 | 5.000.000,00 | 20% | 7 April 2007 | 20 November 2007 | 227 | 634.356,16 |
| 314 | 46000600 | 7.500.000,00 | 20% | 7 April 2007 | 20 November 2007 | 227 | 951.534,25 |
| 315 | 46000601 | 7.500.000,00 | 20% | 7 April 2007 | 20 November 2007 | 227 | 951.534,25 |
| 316 | 4600126 | 7.500.000,00 | 12% | 16 November 2007 | 20 November 2007 | 4 | 9.863,01 |
| 317 | 0791/V/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 2 Mei 2005 | 20 November 2007 | 932 | 2.083.594,52 |

Halaman 36 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|-----|------------------|------------------|------|---------------|
| 318 | 0157/V/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 2 Februari 2006 | 20 November 2007 | 656 | 1.099.923,29 |
| 319 | 46000701 | 6.000.000,00 | 16% | 6 Juni 2007 | 20 November 2007 | 167 | 428.252,05 |
| 320 | 46001143 | 6.500.000,00 | 14% | 3 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 48 | 119.671,23 |
| 321 | 46000614 | 6.500.000,00 | 18% | 8 April 2007 | 20 November 2007 | 226 | 724.438,36 |
| 322 | 0475/IX/2006 | 5.000.000,00 | 14% | 2 September 2006 | 20 November 2007 | 444 | 851.506,85 |
| 323 | 0476/IX/2006 | 3.000.000,00 | 14% | 2 September 2006 | 20 November 2007 | 444 | 510.904,11 |
| 324 | 0349/II/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 16 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1007 | 2.814.082,19 |
| 325 | 0350/II/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 16 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1007 | 2.814.082,19 |
| 326 | 1476/IX/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 5 September 2005 | 20 November 2007 | 806 | 2.252.383,56 |
| 327 | 46000685 | 5.000.000,00 | 14% | 4 Mei 2007 | 20 November 2007 | 200 | 383.561,64 |
| 328 | 1522/VIII/2002 | 10.000.000,00 | 24% | 18 Agustus 2002 | 20 November 2007 | 1920 | 12.624.657,53 |
| 329 | 0359/VII/2006 | 5.000.000,00 | 12% | 19 Juli 2006 | 20 November 2007 | 489 | 803.835,62 |
| 330 | 46000728 | 5.000.000,00 | 12% | 19 Mei 2007 | 20 November 2007 | 185 | 304.109,59 |
| 331 | 46000502 | 7.500.000,00 | 14% | 2 Maret 2007 | 20 November 2007 | 263 | 756.575,34 |
| 332 | 131/V/2006 | 6.000.000,00 | 17% | 3 Mei 2006 | 20 November 2007 | 566 | 1.618.915,07 |
| 333 | 14/II/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 2 Januari 2006 | 20 November 2007 | 687 | 2.303.802,74 |
| 334 | 0796/V/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 2 Mei 2005 | 20 November 2007 | 932 | 3.125.391,78 |
| 335 | 0010/I/05 | 5.000.000,00 | 20% | 2 Januari 2005 | 20 November 2007 | 1052 | 2.939.835,62 |
| 336 | 1390/X/2004 | 3.000.000,00 | 20% | 1 Oktober 2004 | 20 November 2007 | 1145 | 1.919.835,62 |
| 337 | 1802/XI/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 9 November 2005 | 20 November 2007 | 741 | 828.295,89 |
| 338 | 46000503 | 7.000.000,00 | 14% | 2 Maret 2007 | 20 November 2007 | 263 | 706.136,99 |
| 339 | 46000504 | 7.000.000,00 | 14% | 2 Maret 2007 | 20 November 2007 | 263 | 706.136,99 |
| 340 | 0467/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 6 Maret 2005 | 20 November 2007 | 989 | 4.145.671,23 |
| 341 | 0466/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 6 Maret 2005 | 20 November 2007 | 989 | 4.145.671,23 |
| 342 | 0319/III/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 5 Maret 2006 | 20 November 2007 | 625 | 1.746.575,34 |
| 343 | 0442/III/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 22 Maret 2006 | 20 November 2007 | 608 | 1.699.068,49 |
| 344 | 0412/III/2003 | 4.500.000,00 | 24% | 9 Maret 2003 | 20 November 2007 | 1717 | 5.080.438,36 |
| 345 | 1595/X/2003 | 5.000.000,00 | 24% | 5 Oktober 2003 | 20 November 2007 | 1507 | 4.954.520,55 |
| 346 | 1755/XI/2003 | 7.000.000,00 | 21% | 5 November 2003 | 20 November 2007 | 1476 | 5.802.904,11 |
| 347 | 1892/XII/2003 | 3.000.000,00 | 20% | 3 Desember 2003 | 20 November 2007 | 1448 | 2.392.175,34 |
| 348 | 023/I/2004 | 5.000.000,00 | 20% | 5 Januari 2005 | 20 November 2007 | 1049 | 2.931.452,05 |
| 349 | 0432/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 2 Maret 2005 | 20 November 2007 | 993 | 4.162.438,36 |
| 350 | 0433/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 2 Maret 2005 | 20 November 2007 | 993 | 4.162.438,36 |
| 351 | 0434/III/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 2 Maret 2005 | 20 November 2007 | 993 | 2.774.958,90 |
| 352 | 0805/V/2005 | 4.500.000,00 | 20% | 4 Mei 2005 | 20 November 2007 | 930 | 2.339.013,70 |
| 353 | 1139/VII/BP R/03 | 3.000.000,00 | 20% | 3 Juli 2005 | 20 November 2007 | 870 | 1.458.739,73 |
| 354 | 46001205 | 6.000.000,00 | 14% | 1 November 2007 | 20 November 2007 | 19 | 43.726,03 |
| 355 | 46001206 | 6.000.000,00 | 14% | 1 November 2007 | 20 November 2007 | 19 | 43.726,03 |
| 356 | 46000509 | 5.000.000,00 | 14% | 4 Maret 2007 | 20 November 2007 | 261 | 500.547,95 |
| 357 | 46000508 | 5.000.000,00 | 14% | 4 Maret 2007 | 20 November 2007 | 261 | 500.547,95 |

Halaman 37 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|-----|-------------------|------------------|------|---------------|
| 358 | 46000510 | 7.000.000,00 | 14% | 4 Maret 2007 | 20 November 2007 | 261 | 700.767,12 |
| 359 | 46000701 | 3.000.000,00 | 12% | 8 Mei 2007 | 20 November 2007 | 196 | 193.315,07 |
| 360 | 46000324 | 2.000.000,00 | 14% | 12 Januari 2007 | 20 November 2007 | 312 | 239.342,47 |
| 361 | 46001101 | 1.000.000,00 | 11% | 12 September 2007 | 20 November 2007 | 69 | 20.794,52 |
| 362 | 46000810 | 1.000.000,00 | 12% | 13 Juni 2007 | 20 November 2007 | 160 | 52.602,74 |
| 363 | 46000155 | 5.000.000,00 | 12% | 13 November 2006 | 20 November 2007 | 372 | 611.506,85 |
| 364 | 46001259 | 5.000.000,00 | 11% | 17 November 2007 | 20 November 2007 | 3 | 4.520,55 |
| 365 | 2062/XII/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 15 Desember 2005 | 20 November 2007 | 705 | 2.758.191,78 |
| 366 | 0258/VI/2006 | 6.000.000,00 | 17% | 15 Januari 2006 | 20 November 2007 | 674 | 1.883.506,85 |
| 367 | 0457/III/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 4 Maret 2005 | 20 November 2007 | 991 | 3.877.117,81 |
| 368 | 0456/III/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 4 Maret 2005 | 20 November 2007 | 991 | 3.877.117,81 |
| 369 | 0505IX/2006 | 2.000.000,00 | 14% | 11 September 2006 | 20 November 2007 | 435 | 333.698,63 |
| 370 | 0187/V/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 20 Mei 2006 | 20 November 2007 | 549 | 2.301.287,67 |
| 371 | 188/V/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 20 Mei 2006 | 20 November 2007 | 549 | 2.301.287,67 |
| 372 | 189/V/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 20 Mei 2006 | 20 November 2007 | 549 | 2.301.287,67 |
| 373 | 190/V/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 20 Mei 2006 | 20 November 2007 | 549 | 2.301.287,67 |
| 374 | 1309/VIII/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 1 Agustus 2005 | 20 November 2007 | 841 | 2.350.191,78 |
| 375 | 46001201 | 5.000.000,00 | 14% | 31 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 20 | 38.356,16 |
| 376 | 0292/III/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 2 Maret 2006 | 20 November 2007 | 628 | 2.105.950,68 |
| 377 | 1014/VI/2003 | 10.000.000,00 | 24% | 16 Juni 2003 | 20 November 2007 | 1618 | 10.638.904,11 |
| 378 | 0687/V/2004 | 10.000.000,00 | 20% | 5 Mei 2004 | 20 November 2007 | 1294 | 7.232.219,18 |
| 379 | 1185/VIII/2004 | 12.000.000,00 | 20% | 22 Agustus 2004 | 20 November 2007 | 1185 | 7.947.616,44 |
| 380 | 0435/VIII/2006 | 10.000.000,00 | 16% | 19 Agustus 2006 | 20 November 2007 | 458 | 2.007.671,23 |
| 381 | 46000817 | 5.000.000,00 | 14% | 15 Juni 2007 | 20 November 2007 | 158 | 303.013,70 |
| 382 | 46001018 | 4.000.000,00 | 14% | 15 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 97 | 148.821,92 |
| 383 | 46001009 | 7.500.000,00 | 14% | 13 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 99 | 284.794,52 |
| 384 | 46001010 | 7.500.000,00 | 14% | 13 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 99 | 284.794,52 |
| 385 | 46001011 | 5.000.000,00 | 14% | 13 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 99 | 189.863,01 |
| 386 | 46001012 | 5.000.000,00 | 14% | 13 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 99 | 189.863,01 |
| 387 | 46000912 | 79.000.000,00 | 24% | 13 Juli 2007 | 20 November 2007 | 130 | 6.752.876,71 |
| 388 | 46000913 | 16.000.000,00 | 18% | 13 Juli 2007 | 20 November 2007 | 130 | 1.025.753,42 |
| 389 | 46001008 | 5.000.000,00 | 14% | 12 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 100 | 191.780,82 |
| 390 | 1240/IX/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 2 September 2004 | 20 November 2007 | 1174 | 4.593.073,97 |
| 391 | 1239/IX/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 2 September 2004 | 20 November 2007 | 1174 | 4.593.073,97 |
| 392 | 1238/IX/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 2 September 2004 | 20 November 2007 | 1174 | 3.936.920,55 |
| 393 | 0797/V/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 2 Mei 2005 | 20 November 2007 | 932 | 3.646.290,41 |
| 394 | 0966/V/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 2 Juni 2005 | 20 November 2007 | 901 | 3.021.435,62 |
| 395 | 0224/VI/2006 | 6.000.000,00 | 17% | 3 Juni 2006 | 20 November 2007 | 535 | 1.495.068,49 |
| 396 | 46000285 | 6.000.000,00 | 14% | 1 Januari 2007 | 20 November 2007 | 323 | 743.342,47 |
| 397 | 46000404 | 7.000.000,00 | 14% | 3 Februari 2007 | 20 November 2007 | 290 | 778.630,14 |

Halaman 38 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|-----|-------------------|------------------|------|--------------|
| 398 | 46000865 | 6.000.000,00 | 15% | 4 Juli 2007 | 20 November 2007 | 139 | 342.739,73 |
| 399 | 46000866 | 6.000.000,00 | 15% | 4 Juli 2007 | 20 November 2007 | 139 | 342.739,73 |
| 400 | 46000588 | 5.000.000,00 | 12% | 4 April 2007 | 20 November 2007 | 230 | 378.082,19 |
| 401 | 0511/X/2006 | 6.500.000,00 | 12% | 13 September 2006 | 20 November 2007 | 433 | 925.315,07 |
| 402 | 46000719 | 3.000.000,00 | 11% | 13 Mei 2007 | 20 November 2007 | 191 | 172.684,93 |
| 403 | 46000809 | 5.000.000,00 | 20% | 13 Juni 2007 | 20 November 2007 | 160 | 447.123,29 |
| 404 | 46000807 | 6.000.000,00 | 20% | 13 Juni 2007 | 20 November 2007 | 160 | 536.547,95 |
| 405 | 46000808 | 5.000.000,00 | 20% | 13 Juni 2007 | 20 November 2007 | 160 | 447.123,29 |
| 406 | 1604/X/BPR/05 | 5.000.000,00 | 20% | 2 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 779 | 2.176.931,51 |
| 407 | 1661/X/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 7 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 774 | 2.162.958,90 |
| 408 | 46000989 | 4.000.000,00 | 14% | 8 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 104 | 159.561,64 |
| 409 | 1732/XII/2004 | 6.500.000,00 | 20% | 3 Desember 2004 | 20 November 2007 | 1082 | 3.930.772,60 |
| 410 | 1734/XII/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 2 Desember 2004 | 20 November 2007 | 1083 | 3.631.758,90 |
| 411 | 020/I/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 4 Januari 2006 | 20 November 2007 | 685 | 1.148.547,95 |
| 412 | 0294/III/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 2 Maret 2006 | 20 November 2007 | 628 | 526.487,67 |
| 413 | 0295/III/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 2 Maret 2006 | 20 November 2007 | 628 | 526.487,67 |
| 414 | 0482/III/2006 | 4.000.000,00 | 17% | 29 Maret 2006 | 20 November 2007 | 601 | 1.146.016,44 |
| 415 | 215/VI/2006 | 1.500.000,00 | 17% | 2 Juni 2006 | 20 November 2007 | 536 | 383.276,71 |
| 416 | 0393/VIII/2006 | 3.500.000,00 | 16% | 2 Agustus 2006 | 20 November 2007 | 475 | 728.767,12 |
| 417 | 0394/VIII/2006 | 1.000.000,00 | 16% | 2 Agustus 2006 | 20 November 2007 | 475 | 208.219,18 |
| 418 | 0554/X/2006 | 1.500.000,00 | 12% | 2 Oktober 2006 | 20 November 2007 | 414 | 204.164,38 |
| 419 | 46000767 | 2.500.000,00 | 12% | 2 Juni 2007 | 20 November 2007 | 171 | 140.547,95 |
| 420 | 46000768 | 4.500.000,00 | 12% | 2 Juni 2007 | 20 November 2007 | 171 | 252.986,30 |
| 421 | 46000769 | 4.500.000,00 | 12% | 2 Juni 2007 | 20 November 2007 | 171 | 252.986,30 |
| 422 | 46000857 | 5.000.000,00 | 12% | 2 Juni 2007 | 20 November 2007 | 171 | 281.095,89 |
| 423 | 460001071 | 2.000.000,00 | 14% | 1 September 2007 | 20 November 2007 | 80 | 61.369,86 |
| 424 | 46000703 | 5.000.000,00 | 14% | 8 Mei 2007 | 20 November 2007 | 196 | 375.890,41 |
| 425 | 1141/VII/BPR/05 | 6.000.000,00 | 20% | 3 Juli 2005 | 20 November 2007 | 870 | 2.917.479,45 |
| 426 | 46000074 | 5.000.000,00 | 12% | 3 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 109 | 179.178,08 |
| 427 | 1509/IX/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 12 September 2005 | 20 November 2007 | 799 | 893.128,77 |
| 428 | 46001190 | 5.000.000,00 | 14% | 24 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 27 | 51.780,82 |
| 429 | 46001189 | 5.000.000,00 | 14% | 24 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 27 | 51.780,82 |
| 430 | 46001163 | 2.000.000,00 | 12% | 18 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 33 | 21.698,63 |
| 431 | 46000488 | 7.000.000,00 | 18% | 23 Februari 2007 | 20 November 2007 | 270 | 932.054,79 |
| 432 | 46000497 | 4.000.000,00 | 18% | 28 Februari 2007 | 20 November 2007 | 265 | 522.739,73 |
| 433 | 46001060 | 3.000.000,00 | 18% | 23 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 89 | 131.671,23 |
| 434 | 46001079 | 7.500.000,00 | 18% | 5 September 2007 | 20 November 2007 | 76 | 281.095,89 |
| 435 | 46001080 | 7.500.000,00 | 18% | 5 September 2007 | 20 November 2007 | 76 | 281.095,89 |
| 436 | 46001081 | 7.500.000,00 | 18% | 5 September 2007 | 20 November 2007 | 76 | 281.095,89 |
| 437 | 46001078 | 7.500.000,00 | 18% | 5 September 2007 | 20 November 2007 | 76 | 281.095,89 |

Halaman 39 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|------|---------------|
| 438 | 46001228 | 6.000.000,00 | 11% | 8 November 2007 | 20 November 2007 | 12 | 21.698,63 |
| 439 | 46001229 | 5.500.000,00 | 11% | 8 November 2007 | 20 November 2007 | 12 | 19.890,41 |
| 440 | 0443/III/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 22 Maret 2006 | 20 November 2007 | 608 | 1.699.068,49 |
| 441 | 0155/II/2006 | 2.000.000,00 | 20% | 2 Februari 2006 | 20 November 2007 | 656 | 733.282,19 |
| 442 | 0103/I/2006 | 2.000.000,00 | 20% | 15 Januari 2006 | 20 November 2007 | 674 | 753.402,74 |
| 443 | 0356/VII/2006 | 2.000.000,00 | 17% | 19 Juli 2006 | 20 November 2007 | 489 | 455.506,85 |
| 444 | 46000057 | 5.000.000,00 | 15% | 19 Oktober 2006 | 20 November 2007 | 397 | 815.753,42 |
| 445 | 46000058 | 5.000.000,00 | 15% | 19 Oktober 2006 | 20 November 2007 | 397 | 815.753,42 |
| 446 | 46000059 | 7.500.000,00 | 15% | 19 Oktober 2006 | 20 November 2007 | 397 | 1.223.630,14 |
| 447 | 0270/VI/2006 | 3.000.000,00 | 17% | 19 Juni 2006 | 20 November 2007 | 519 | 725.178,08 |
| 448 | 46001122 | 3.000.000,00 | 12% | 19 September 2007 | 20 November 2007 | 62 | 61.150,68 |
| 449 | 0389/VII/2006 | 3.000.000,00 | 16% | 31 Juli 2006 | 20 November 2007 | 477 | 627.287,67 |
| 450 | 0315/III/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 5 Maret 2006 | 20 November 2007 | 625 | 2.095.890,41 |
| 451 | 0622/IV/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 3 April 2005 | 20 November 2007 | 961 | 1.074.213,70 |
| 452 | 46000511 | 3.000.000,00 | 11% | 4 Maret 2007 | 20 November 2007 | 261 | 235.972,60 |
| 453 | 0241/II/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 2 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1021 | 2.853.205,48 |
| 454 | 1136/VII/BP R/05 | 2.000.000,00 | 20% | 3 Juni 2005 | 20 November 2007 | 900 | 1.006.027,40 |
| 455 | 0316/III/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 9 Maret 2006 | 20 November 2007 | 621 | 1.041.238,36 |
| 456 | 460000773 | 1.000.000,00 | 12% | 3 Juni 2007 | 20 November 2007 | 170 | 55.890,41 |
| 457 | 1905/XI/2002 | 10.000.000,00 | 24% | 1 November 2002 | 20 November 2007 | 1845 | 12.131.506,85 |
| 458 | 0595/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 30 Maret 2005 | 20 November 2007 | 965 | 4.045.068,49 |
| 459 | 0594/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 30 Maret 2005 | 20 November 2007 | 965 | 4.045.068,49 |
| 460 | 2130/XII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 31 Desember 2005 | 20 November 2007 | 689 | 2.831.506,85 |
| 461 | 0597/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 30 Maret 2005 | 20 November 2007 | 965 | 4.045.068,49 |
| 462 | 0596/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 30 Maret 2005 | 20 November 2007 | 965 | 4.045.068,49 |
| 463 | 46000590 | 4.000.000,00 | 14% | 4 April 2007 | 20 November 2007 | 230 | 352.876,71 |
| 464 | 46000589 | 4.000.000,00 | 14% | 4 April 2007 | 20 November 2007 | 230 | 352.876,71 |
| 465 | 0511/IX/2006 | 6.500.000,00 | 12% | 13 September 2006 | 20 November 2007 | 433 | 925.315,07 |
| 466 | 46000719 | 3.000.000,00 | 11% | 13 Mei 2007 | 20 November 2007 | 191 | 172.684,93 |
| 467 | 0632/IV/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 25 April 2004 | 20 November 2007 | 1304 | 4.372.865,75 |
| 468 | 0681/V/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 05 Mei 2004 | 20 November 2007 | 1294 | 5.062.553,42 |
| 469 | 0708/IV/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 16 April 2005 | 20 November 2007 | 948 | 1.059.682,19 |
| 470 | 1174/VII/2003 | 2.500.000,00 | 24% | 16 Juli 2003 | 20 November 2007 | 1588 | 2.610.410,96 |
| 471 | 1336/VIII/2005 | 1.500.000,00 | 20% | 7 Agustus 2005 | 20 November 2007 | 835 | 700.027,40 |
| 472 | 0784/V/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 1 Mei 2005 | 20 November 2007 | 933 | 1.042.915,07 |
| 473 | 1644/XI/2004 | 3.000.000,00 | 20% | 10 November 2004 | 20 November 2007 | 1105 | 1.852.767,12 |
| 474 | 1131/VII/BP R/05 | 2.500.000,00 | 20% | 3 Juli 2005 | 20 November 2007 | 870 | 1.215.616,44 |
| 475 | 46001125 | 3.000.000,00 | 11% | 21 September 2007 | 20 November 2007 | 60 | 54.246,58 |
| 476 | 1399/VIII/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 20 Agustus 2005 | 20 November 2007 | 822 | 918.838,36 |
| 477 | 0357/II/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 17 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1006 | 3.935.802,74 |

Halaman 40 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------|----------------|------------------|-----|-------------------|------------------|------|------------------|
| 478 | 0358/II/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 17 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1006 | 3.935.802,74 |
| 479 | 0360/II/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 17 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1006 | 3.935.802,74 |
| 480 | 0554/III/2005 | 2.500.000,00 | 20% | 19 Maret 2005 | 20 November 2007 | 976 | 1.363.726,03 |
| 481 | 0937/V/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 26 Mei 2005 | 20 November 2007 | 908 | 1.522.454,79 |
| 482 | 1772/X/2005 | 3.500.000,00 | 20% | 26 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 755 | 1.476.904,11 |
| 483 | 0100/I/2006 | 7.000.000,00 | 20% | 15 Januari 2006 | 20 November 2007 | 674 | 2.636.909,59 |
| 484 | 0245/II/2006 | 4.000.000,00 | 20% | 18 Februari 2006 | 20 November 2007 | 640 | 1.430.794,52 |
| 485 | 0246/II/2006 | 4.000.000,00 | 20% | 18 Februari 2006 | 20 November 2007 | 640 | 1.430.794,52 |
| 486 | 0291/II/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 1 Maret 2006 | 20 November 2007 | 629 | 1.054.652,05 |
| 487 | 0238/VI/2006 | 4.000.000,00 | 17% | 08 Mei 2006 | 20 November 2007 | 561 | 1.045.150,68 |
| 488 | 0543/X/2006 | 3.000.000,00 | 16% | 29 September 2006 | 20 November 2007 | 417 | 548.383,56 |
| 489 | 48000237 | 7.000.000,00 | 14% | 16 Desember 2006 | 20 November 2007 | 339 | 910.191,78 |
| 490 | 46000585 | 2.500.000,00 | 14% | 2 April 2007 | 20 November 2007 | 232 | 222.465,75 |
| 491 | 46000499 | 2.000.000,00 | 14% | 1 Maret 2007 | 20 November 2007 | 264 | 202.520,55 |
| 492 | 0199/II/2006 | 2.500.000,00 | 20% | 9 Februari 2006 | 20 November 2007 | 649 | 906.821,92 |
| 493 | 46000596 | 5.000.000,00 | 14% | 5 April 2007 | 20 November 2007 | 229 | 439.178,08 |
| 494 | 46000597 | 1.400.000,00 | 14% | 5 April 2007 | 20 November 2007 | 229 | 122.969,86 |
| 495 | 46000856 | 2.000.000,00 | 12% | 1 Juli 2007 | 20 November 2007 | 142 | 93.369,86 |
| 496 | 0138/V/2006 | 5.000.000,00 | 12% | 3 Mei 2006 | 20 November 2007 | 566 | 930.410,96 |
| 497 | | 7.000.000,00 | 20% | 4 Desember 2005 | 20 November 2007 | 716 | 2.801.227,40 |
| 498 | 1561/X/2003 | 3.000.000,00 | 24% | 1 Oktober 2003 | 20 November 2007 | 1511 | 2.980.602,74 |
| 499 | 0011/I/2004 | 1.500.000,00 | 20% | 3 Januari 2004 | 20 November 2007 | 1417 | 1.187.950,68 |
| 500 | 1561/X/2004 | 5.000.000,00 | 20% | 25 Oktober 2004 | 20 November 2007 | 1121 | 3.132.657,53 |
| 501 | 0927/V/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 22 Mei 2005 | 20 November 2007 | 912 | 1.529.161,64 |
| 502 | 0178/I/2004 | 2.000.000,00 | 20% | 25 Januari 2004 | 20 November 2007 | 1395 | 1.559.342,47 |
| 503 | 1674/X/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 9 Oktober 2005 | 20 November 2007 | 772 | 2.588.843,84 |
| 504 | 0328/III/2006 | 1.000.000,00 | 20% | 5 Maret 2006 | 20 November 2007 | 625 | 349.315,07 |
| 505 | 1322/VIII/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 4 Agustus 2005 | 21 November 2007 | 839 | 1.406.761,64 |
| 506 | 46001050 | 3.000.000,00 | 18% | 23 Agustus 2007 | 22 November 2007 | 91 | 134.630,14 |
| 507 | 46001109 | 5.000.000,00 | 12% | 15 September 2007 | 24 November 2007 | 70 | 115.068,49 |
| JUMLAH | | 3.599.300.000,00 | | | | | 1.081.175.601,10 |

12. Bahwa lagi pula akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu telah melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian immateril kepada Para Tergugat tersebut baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus, yang mana Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya usaha Para Penggugat karena Para Penggugat tersebut adalah seorang petani dan pedagang, yang mana petani dan pedagang



tersebut tidak bisa bertani dan berdagang karena modalnya tertahan di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, serta nasabah yang ingin berangkat ke tanah suci yang pada akhirnya tidak jadi berangkat karena uangnya tertahan di PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, dan banyak anak-anak Para Penggugat yang putus sekolah karena tidak bisa membayar biaya sekolah tersebut sehubungan uangnya tertahan di PD BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, dimana kerugian tersebut yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Para Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu apabila dinilai dengan uang (*vide* Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999) yaitu dengan perincian adalah sebagai berikut:

12.1. Perhitungan kerugian immateril berdasarkan tabungan adalah:

| NO | REKENING | POKOK | SUKU BUNGA (%) | LAMA SIMPANAN | | Jml. Hari | JUMLAH BUNGA (Rp) |
|----|-----------------|----------------|----------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | | Tgl. Awal | Tgl. Akhir | | |
| 1 | 21006106 | 18.844.327,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.236.221,57 |
| 2 | 21104924 | 201.010.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 77.187.840,00 |
| 3 | T.3213038 | 31.000.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.904.000,00 |
| 4 | 21160172 | 1.400.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 537.600,00 |
| 5 | 4824 | 6.750.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.592.000,00 |
| 6 | 4823 | 9.400.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.609.600,00 |
| 7 | T. 21060132 | 24.750.500,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.504.192,00 |
| 8 | 4819 | 3.310.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.271.040,00 |
| 9 | 21060219 | 1.000.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 384.000,00 |
| 10 | 21001620 | 17.271.382,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.632.210,69 |
| 11 | 21060220 | 6.025.748,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.313.887,23 |
| 12 | 2103839 | 25.106.101,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.640.742,78 |
| 13 | 21060082 | 5.043.047,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.936.530,05 |
| 14 | T. 3210.800 | 70.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 26.880,00 |
| 15 | 21105456 | 10.360.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.978.240,00 |
| 16 | T. 211060188 | 70.000.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 26.880.000,00 |
| 17 | 32104984 | 410.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 157.440,00 |
| 18 | T.32104985 | 46.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 17.664,00 |
| 19 | 21005105 | 3.349.291,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.286.127,74 |
| 20 | 60081 | 200.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 76.800,00 |
| 21 | 21104885 | 119.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 45.696,00 |
| 22 | 4887 | 347.500,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 133.440,00 |
| 23 | 21060250 | 300.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 115.200,00 |
| 24 | 5244 | 1.210.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 464.640,00 |
| 25 | 2100.60003 | 660.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 253.440,00 |
| 26 | 2160044 | 672.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 258.048,00 |
| 27 | 21060204 | 25.000.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|----|------------------|---------------|------|----------------|
| 28 | 21060017 | 8.324.409,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 508.573,06 |
| 29 | 21005358 | 373.437,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 143.399,81 |
| 30 | 21060135 | 2.500.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 960.000,00 |
| 31 | 21105411 | 1.520.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 583.680,00 |
| 32 | 21004802 | 511.580,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 196.446,72 |
| 33 | T21006101 | 500.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 192.000,00 |
| 34 | 21105151 | 168.158,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 64.572,67 |
| 35 | 21005317 | 1.541.367,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 591.884,93 |
| 36 | 21160237 | 930.500,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 357.312,00 |
| 37 | 21006060 | 526.220,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 202.068,48 |
| 38 | 21060127 | 956.869,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 367.437,70 |
| 39 | 321800 | 70.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 26.880,00 |
| 40 | 21005105 | 1.168.289,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 448.621,00 |
| Jumlah Total | | 478.923.227,00 | | | | | 182.686.356,42 |

12.1. Perhitungan kerugian immateril berdasarkan deposito/simpanan berjangka adalah:

| NO | REKENING | POKOK DEPOSITO (Rp) | BUN GA /THN (% p.a.) | LAMA SIMPANAN | | Jml. Hari | JUMLAH BUNGA (Rp) |
|----|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | | | Tgl. Awal | Tgl. Akhir | | |
| 1 | 0347/VII/2006 | 50.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 76.800.000,00 |
| 2 | 0281/VI/2006 | 5.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.440.000,00 |
| 3 | 05191/X/2006 | 7.500.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 4 | 46000349 | 4.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.032.000,00 |
| 5 | 46000693 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 6 | 46000956 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 7 | 46001199 | 1.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.152.000,00 |
| 8 | 0280/VI/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.160.000,00 |
| 9 | 46000881 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 10 | 0911/V/2005 | 80.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 122.880.000,00 |
| 11 | 01051/VI/2005 | 60.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 92.160.000,00 |
| 12 | 0300/III/2006 | 50.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 76.800.000,00 |
| 13 | 46000098 | 50.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 76.800.000,00 |
| 14 | 46000301 | 50.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 76.800.000,00 |
| 15 | 46000419 | 30.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 46.080.000,00 |
| 16 | 46000456 | 35.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 53.760.000,00 |
| 17 | 46000496 | 45.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 69.120.000,00 |
| 18 | 46000607 | 20.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 30.720.000,00 |
| 19 | 46000713 | 30.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 46.080.000,00 |
| 20 | 46000937 | 50.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 76.800.000,00 |
| 21 | 46000939 | 40.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 61.440.000,00 |
| 22 | 46001007 | 10.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.360.000,00 |
| 23 | 46001097 | 20.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 30.720.000,00 |
| 24 | 0059/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 25 | 0060/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-----|-------------|---------------|------|----------------|
| 26 | 0061/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 27 | 0062/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 28 | 0063/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 29 | 0065/I/2006 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 30 | 116/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.352.000,00 |
| 31 | 117/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.352.000,00 |
| 32 | 118/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.352.000,00 |
| 33 | 119/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.352.000,00 |
| 34 | 120/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.352.000,00 |
| 35 | 121/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.352.000,00 |
| 36 | 122/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.352.000,00 |
| 37 | 123/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.352.000,00 |
| 38 | 124/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.352.000,00 |
| 39 | 125/IV/2006 | 2.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.784.000,00 |
| 40 | 0412/II/2005 | 100.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 153.600.000,00 |
| 41 | 46001035 | 3.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.688.000,00 |
| 42 | 46000952 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 43 | 0936/VI/2003 | 1.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.304.000,00 |
| 44 | 46000905 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 45 | 46000906 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 46 | 46000907 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 47 | 46000908 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 48 | 46000909 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 49 | 46000910 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 50 | 46001154 | 50.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 65.280.000,00 |
| 51 | 0265/VI/2006 | 2.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.176.000,00 |
| 52 | 1114/VIII/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 53 | 1614/XI/2004 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 54 | 01095/VI/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 55 | 1545/IX/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 56 | 1837/XI/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.222.400,00 |
| 57 | 2109/XII/2005 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.958.400,00 |
| 58 | 0137/I/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.958.400,00 |
| 59 | 0277/II/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.958.400,00 |
| 60 | 46000376 | 1.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 896.000,00 |
| 61 | 0230/II/2006 | 15.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 23.040.000,00 |
| 62 | 46000592 | 10.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.360.000,00 |
| 63 | 01006/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 64 | 01007/VI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 65 | 01008/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 66 | 01009/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 67 | 01010/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 68 | 01011/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |

Halaman 44 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|
| 69 | 01012/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 70 | 1892/XI/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 71 | 0449/III/2006 | 3.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.456.000,00 |
| 72 | 46000484 | 6.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.912.000,00 |
| 73 | 46000652 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 74 | 46000853 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 75 | 46000911 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 76 | 1480/IX/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 77 | 1439/VIII/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.222.400,00 |
| 78 | 1669/X/2005 | 3.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.569.600,00 |
| 79 | 0381/III/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 80 | 0201/II/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.958.400,00 |
| 81 | 46001167 | 6.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 82 | 46001168 | 6.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 83 | 46000108 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 84 | 46000109 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 85 | 46000110 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 86 | 46000253 | 6.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.912.000,00 |
| 87 | 46000254 | 3.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.456.000,00 |
| 88 | 46000342 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 89 | 46000377 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 90 | 46000382 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.222.400,00 |
| 91 | 46000383 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 92 | 46000384 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.222.400,00 |
| 93 | 46000671 | 1.900.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.480.640,00 |
| 94 | 46000679 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 95 | 46000680 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 96 | 46000681 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 97 | 46000793 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 98 | 46000852 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 99 | 46000914 | 5.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.180.800,00 |
| 100 | 46000915 | 5.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.180.800,00 |
| 101 | 46001039 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.451.200,00 |
| 102 | 46001040 | 6.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.529.600,00 |
| 103 | 46001041 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.451.200,00 |
| 104 | 46000890 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 105 | 46000891 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 106 | 46000634 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 107 | 46000635 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 108 | 46001251 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.608.000,00 |

Halaman 45 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|
| 109 | 46001250 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.608.000,00 |
| 110 | 46000975 | 5.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.928.000,00 |
| 111 | 193/I/2000 | 3.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.608.000,00 |
| 112 | 46001231 | 5.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.520.000,00 |
| 113 | 46000022 | 6.500.000,00 | 13% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.408.000,00 |
| 114 | 46000414 | 7.000.000,00 | 13% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.824.000,00 |
| 115 | 46000415 | 5.000.000,00 | 13% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.160.000,00 |
| 116 | 46000416 | 5.000.000,00 | 13% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.160.000,00 |
| 117 | 46000455 | 5.000.000,00 | 13% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.160.000,00 |
| 118 | 46000534 | 4.500.000,00 | 13% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.744.000,00 |
| 119 | 46000732 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 120 | 46000733 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 121 | 46000834 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 122 | 46000957 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 123 | 46000958 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 124 | 46000959 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 125 | 46000960 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 126 | 46000961 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 127 | 46000994 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 128 | 46001108 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 129 | 46001110 | 7.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 130 | 46001111 | 7.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 131 | 46001112 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 132 | 46001162 | 7.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 133 | 1278/VII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 134 | 46000040 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 135 | 46000039 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 136 | 027/I/2006 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 137 | 46000038 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 138 | 2077/XII/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 139 | 1826/XI/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.222.400,00 |
| 140 | 46000140 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 141 | 46000141 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 142 | 0720/IV/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 143 | 46000294 | 25.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 38.400.000,00 |
| 144 | 46000684 | 1.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.152.000,00 |
| 145 | 46001115 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 146 | 46001116 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 147 | 46001117 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 148 | 46001118 | 2.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.880.000,00 |

Halaman 46 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|-----|-------------|---------------|------|----------------|
| 149 | 46001235 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 150 | 46001236 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 151 | 46001237 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 152 | 46000882 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 153 | 46000883 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 154 | 46000884 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 155 | 46000885 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 156 | 46000886 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 157 | 46000887 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 158 | 46001048 | 2.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.536.000,00 |
| 159 | 46001123 | 2.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.304.000,00 |
| 160 | 46000694 | 7.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.064.000,00 |
| 161 | 46001211 | 1.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.152.000,00 |
| 162 | 46001119 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 163 | 46001153 | 1.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.728.000,00 |
| 164 | 1666/X/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 165 | 46000668 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 166 | 1695/X/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 167 | 1696/X/2005 | 5.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.448.000,00 |
| 168 | 0097/II/2006 | 7.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.752.000,00 |
| 169 | 46000991 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 170 | 46000992 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 171 | 1203/VIII/2004 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.958.400,00 |
| 172 | 048/IV/2006 | 7.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.795.200,00 |
| 173 | 047/IV/2006 | 7.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.795.200,00 |
| 174 | 0392/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 175 | 46000840 | 100.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 153.600.000,00 |
| 176 | 0387/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 177 | 0389/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 178 | 46000656 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 179 | 1694/XI/2004 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 180 | 1614/X/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 181 | 1544/IX/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 182 | 0583/IV/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.752.000,00 |
| 183 | 0584/IV/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.752.000,00 |
| 184 | 46000230 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 185 | 1070/VII/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.752.000,00 |
| 186 | 0391/II/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 187 | 0585/IV/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.752.000,00 |
| 188 | 1907/XI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |

Halaman 47 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|
| 189 | 1908/XI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 190 | 46000626 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.451.200,00 |
| 191 | 46000627 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.451.200,00 |
| 192 | 46000628 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.451.200,00 |
| 193 | 0386/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 194 | 0388/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 195 | 0390/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 196 | 1695/XI/2004 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 197 | 46000231 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 198 | 1071/VII/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.752.000,00 |
| 199 | 1543/IX/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 200 | 1613/X/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 201 | 46000657 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 202 | 1074/IX/2003 | 10.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.360.000,00 |
| 203 | 1506/IX/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 204 | 1505/IX/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 205 | 1962/XI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 206 | 1963/XI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 207 | 46001249 | 7.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.928.000,00 |
| 208 | 1835/XI/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 209 | 0290/II/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 210 | 46000517 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 211 | 1163/VII/BPR/05 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 212 | 46000889 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.608.000,00 |
| 213 | 46001088 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 214 | 46000692 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.608.000,00 |
| 215 | 46000990 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 216 | 1996/XII/2005 | 49.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 75.264.000,00 |
| 217 | 0347/III/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 218 | 0644/IV/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 219 | 1836/XI/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 220 | 0835/V/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.222.400,00 |
| 221 | 0172/II/2006 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 222 | 46000612 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 223 | 46001150 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 224 | 46000518 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 225 | 46001059 | 1.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 896.000,00 |
| 226 | 46001212 | 3.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.136.000,00 |
| 227 | 46001030 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 228 | 46000982 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |

Halaman 48 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|
| 229 | 46001024 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 230 | 46000243 | 3.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.112.000,00 |
| 231 | 149/I/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 232 | 1333/IX/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 233 | 180/V/2006 | 2.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.227.200,00 |
| 234 | 46001093 | 5.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.520.000,00 |
| 235 | 1856/XII/2004 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 236 | 0467/III/2006 | 4.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.608.000,00 |
| 237 | 1560/X/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 238 | 46000563 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 239 | 1844/XI/2003 | 4.000.000,00 | 21% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.248.000,00 |
| 240 | 46000649 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 241 | 46000650 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 242 | 46000744 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 243 | 46000651 | 2.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.240.000,00 |
| 244 | 46000951 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 245 | 084/IV/2006 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 246 | 0283/II/2004 | 11.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 16.896.000,00 |
| 247 | 46001102 | 1.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 704.000,00 |
| 248 | 1821/XI/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 249 | 8004/XI/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 250 | 0098/I/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 251 | 0326/III/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 252 | 0343/III/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 253 | 144/V/2006 | 7.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 254 | 46000553 | 6.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.912.000,00 |
| 255 | 46000554 | 6.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.912.000,00 |
| 256 | 46000754 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 257 | 46000755 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 258 | 46001241 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 259 | 46001242 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 260 | 1824/XI/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 261 | 1825/XI/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 262 | 1859/XI/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 263 | 46000150 | 7.500.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.200.000,00 |
| 264 | 46000552 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 265 | 0819/V/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 266 | 2050/XII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 267 | 2051/XII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 268 | 2052/XII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |

Halaman 49 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|-----|-------------|---------------|------|--------------|
| 269 | 0092/I/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 270 | 0208/II/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 271 | 0209/II/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 272 | 2050/XII/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 273 | 0085/I/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 274 | 2048/XII/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 275 | 1595/X/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 276 | 053/IV/2006 | 3.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.340.800,00 |
| 277 | 0891/V/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 278 | 1309/IX/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 279 | 1677/X/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 280 | 1392/VIII/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 281 | 01100/VI/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 282 | 0395/II/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 283 | 1390/VIII/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 284 | 173/V/2006 | 3.000.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.880.000,00 |
| 285 | 1861/XI/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 286 | 1310/IX/2004 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 287 | 0613/IV/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 288 | 1391/VIII/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 289 | 46001171 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 290 | 1678/X/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 291 | 1389/VIII/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 292 | 0184/I/2005 | 3.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.569.600,00 |
| 293 | 1676/X/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 294 | 01213/VII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 295 | 1325/VIII/2003 | 1.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.304.000,00 |
| 296 | 1406/VIII/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 297 | 0188/II/2006 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 298 | 0359/III/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 299 | 176/IX/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 300 | 46001234 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 301 | 0863/V/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 302 | 1860/XI/2005 | 1.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.305.600,00 |
| 303 | 46000153 | 1.000.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 960.000,00 |
| 304 | 46001152 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 305 | 0077/I/2006 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 306 | 0340/II/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 307 | 0255/II/2005 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 308 | 1654/XI/2004 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |

Halaman 50 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|
| 309 | 46000604 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 310 | 46000599 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 311 | 46000602 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 312 | 46000603 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 313 | 46000605 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 314 | 46000600 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 315 | 46000601 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 316 | 4600126 | 7.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 317 | 0791/V/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.222.400,00 |
| 318 | 0157/V/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 319 | 46000701 | 6.000.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.990.400,00 |
| 320 | 46001143 | 6.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.824.000,00 |
| 321 | 46000614 | 6.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.488.000,00 |
| 322 | 0475/IX/2006 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 323 | 0476/IX/2006 | 3.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.688.000,00 |
| 324 | 0349/II/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 325 | 0350/II/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 326 | 1476/IX/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 327 | 46000685 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 328 | 1522/VIII/2002 | 10.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.360.000,00 |
| 329 | 0359/VII/2006 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 330 | 46000728 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 331 | 46000502 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 332 | 131/V/2006 | 6.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.681.600,00 |
| 333 | 14/I/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 334 | 0796/V/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 335 | 0010/I/05 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 336 | 1390/X/2004 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 337 | 1802/XI/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 338 | 46000503 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 339 | 46000504 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 340 | 0467/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 341 | 0466/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 342 | 0319/III/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 343 | 0442/III/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 344 | 0412/III/2003 | 4.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.912.000,00 |
| 345 | 1595/X/2003 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 346 | 1755/XI/2003 | 7.000.000,00 | 21% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.184.000,00 |
| 347 | 1892/XII/2003 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.859.200,00 |
| 348 | 023/I/2004 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |

Halaman 51 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|----------------|
| 349 | 0432/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 350 | 0433/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 351 | 0434/III/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 352 | 0805/V/2005 | 4.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.875.200,00 |
| 353 | 1139/VII/BPR/03 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 354 | 46001205 | 6.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 355 | 46001206 | 6.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 356 | 46000509 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 357 | 46000508 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 358 | 46000510 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 359 | 46000701 | 3.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.304.000,00 |
| 360 | 46000324 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 361 | 46001101 | 1.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 704.000,00 |
| 362 | 46000810 | 1.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 768.000,00 |
| 363 | 46000155 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 364 | 46001259 | 5.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.520.000,00 |
| 365 | 2062/XII/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 366 | 0258/VI/2006 | 6.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 367 | 0457/III/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 368 | 0456/III/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 369 | 0505IX/2006 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 370 | 0187/V/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 371 | 188/V/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 372 | 189/V/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 373 | 190/V/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 374 | 1309/VII/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 375 | 46001201 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 376 | 0292/III/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 377 | 1014/VI/2003 | 10.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.360.000,00 |
| 378 | 0687/V/2004 | 10.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 13.056.000,00 |
| 379 | 1185/VIII/2004 | 12.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.667.200,00 |
| 380 | 0435/VIII/2006 | 10.000.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.240.000,00 |
| 381 | 46000817 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 382 | 46001018 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 383 | 46001009 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 384 | 46001010 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 385 | 46001011 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 386 | 46001012 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 387 | 46000912 | 79.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 121.344.000,00 |
| 388 | 46000913 | 16.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 18.432.000,00 |

Halaman 52 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|-----|-------------|---------------|------|--------------|
| 389 | 46001008 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 390 | 1240/IX/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 391 | 1239/IX/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 392 | 1238/IX/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 393 | 0797/VI/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 394 | 0966/VI/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 395 | 0224/VI/2006 | 6.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 396 | 46000285 | 6.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 397 | 46000404 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 398 | 46000865 | 6.000.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 399 | 46000866 | 6.000.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 400 | 46000588 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 401 | 0511/X/2006 | 6.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.992.000,00 |
| 402 | 46000719 | 3.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.112.000,00 |
| 403 | 46000809 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 404 | 46000807 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 405 | 46000808 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 406 | 1604/X/BPR/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 407 | 1661/X/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 408 | 46000989 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 409 | 1732/XII/2004 | 6.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.486.400,00 |
| 410 | 1734/XII/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 411 | 020/I/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 412 | 0294/III/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.958.400,00 |
| 413 | 0295/III/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.958.400,00 |
| 414 | 0482/III/2006 | 4.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.454.400,00 |
| 415 | 215/VI/2006 | 1.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.670.400,00 |
| 416 | 0393/VIII/2006 | 3.500.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 417 | 0394/VIII/2006 | 1.000.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.024.000,00 |
| 418 | 0554/X/2006 | 1.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.152.000,00 |
| 419 | 46000767 | 2.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.920.000,00 |
| 420 | 46000768 | 4.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.456.000,00 |
| 421 | 46000769 | 4.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.456.000,00 |
| 422 | 46000857 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 423 | 460001071 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 424 | 46000703 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 425 | 1141/VII/BPR/05 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 426 | 46000074 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 427 | 1509/IX/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 428 | 46001190 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |

Halaman 53 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|
| 429 | 46001189 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 430 | 46001163 | 2.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.536.000,00 |
| 431 | 46000488 | 7.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.064.000,00 |
| 432 | 46000497 | 4.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.608.000,00 |
| 433 | 46001060 | 3.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.456.000,00 |
| 434 | 46001079 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 435 | 46001080 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 436 | 46001081 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 437 | 46001078 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 438 | 46001228 | 6.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.224.000,00 |
| 439 | 46001229 | 5.500.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.872.000,00 |
| 440 | 0443/III/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 441 | 0155/II/2006 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 442 | 0103/II/2006 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 443 | 0356/VII/2006 | 2.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.176.000,00 |
| 444 | 46000057 | 5.000.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.800.000,00 |
| 445 | 46000058 | 5.000.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.800.000,00 |
| 446 | 46000059 | 7.500.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.200.000,00 |
| 447 | 0270/VI/2006 | 3.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 448 | 46001122 | 3.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.304.000,00 |
| 449 | 0389/VII/2006 | 3.000.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.072.000,00 |
| 450 | 0315/III/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 451 | 0622/IV/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 452 | 46000511 | 3.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.112.000,00 |
| 453 | 0241/II/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 454 | 1136/VII/BPR/05 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 455 | 0316/III/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 456 | 460000773 | 1.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 768.000,00 |
| 457 | 1905/XI/2002 | 10.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.360.000,00 |
| 458 | 0595/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 459 | 0594/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 460 | 2130/XII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 461 | 0597/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 462 | 0596/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.792.000,00 |
| 463 | 46000590 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 464 | 46000589 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 465 | 0511/IX/2006 | 6.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.992.000,00 |
| 466 | 46000719 | 3.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.112.000,00 |
| 467 | 0632/IV/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 468 | 0681/V/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |

Halaman 54 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|-----|-------------|---------------|------|--------------|
| 469 | 0708/IV/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 470 | 1174/VII/2003 | 2.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 471 | 1336/VIII/2005 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.958.400,00 |
| 472 | 0784/V/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 473 | 1644/XI/2004 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 474 | 1131/VII/BPR/05 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 475 | 46001125 | 3.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.112.000,00 |
| 476 | 1399/VIII/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 477 | 0357/II/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 478 | 0358/II/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 479 | 0360/II/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 480 | 0554/III/2005 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 481 | 0937/V/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 482 | 1772/X/2005 | 3.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.569.600,00 |
| 483 | 0100/II/2006 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 484 | 0245/II/2006 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.222.400,00 |
| 485 | 0246/II/2006 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.222.400,00 |
| 486 | 0291/II/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 487 | 0238/VI/2006 | 4.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.352.000,00 |
| 488 | 0543/X/2006 | 3.000.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.072.000,00 |
| 489 | 48000237 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 490 | 46000585 | 2.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.240.000,00 |
| 491 | 46000499 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 492 | 0199/II/2006 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 493 | 46000596 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 494 | 46000597 | 1.400.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.254.400,00 |
| 495 | 46000856 | 2.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.536.000,00 |
| 496 | 0138/V/2006 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 497 | - | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.139.200,00 |
| 498 | 1561/X/2003 | 3.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.608.000,00 |
| 499 | 0011/II/2004 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.958.400,00 |
| 500 | 1561/X/2004 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 501 | 0927/V/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 502 | 0178/II/2004 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 503 | 1674/X/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.833.600,00 |
| 504 | 0328/III/2006 | 1.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.305.600,00 |
| 505 | 1322/VIII/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.916.800,00 |
| 506 | 46001050 | 3.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.456.000,00 |
| 507 | 46001109 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |

Halaman 55 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



| | | | | | | |
|--------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| JUMLAH | 3.599.300.000,00 | | | | | 4.585.360.640,00 |
|--------|------------------|--|--|--|--|------------------|

13. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tabungan dan deposito/simpanan berjangka tersebut telah berupaya dan berusaha sebaik-baiknya dan dibenarkan secara hukum untuk menuntut dan mengambil haknya serta menyelesaikan masalah tersebut diatas secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi hasilnya sia-sia/tidak berhasil, maka oleh karenanya untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum, Para Penggugat berpaling ke Pengadilan melalui kuasanya untuk diselesaikan secara hukum, dan melalui gugatan ini, Para Penggugat berharap keadilan;
14. Mengenai mekanisme pembayaran adalah pihak pemilik membayar/mengembalikan atau menyerahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut kemudian kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing ketua kelompok yang terlebih dahulu para ketua kelompok membuka rekening disalah satu bank di Garut dan selanjutnya para ketua kelompok mendistribusikan atau menyerahkan uang tersebut kepada para pemilik tabungan dan deposito nasabah PD BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut (*vide* Pasal 3 ayat 1 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok);
15. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai atau tidak mentaati putusan dalam perkara ini, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut, *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara perdata ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus;
16. Oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, dan karenanya memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, sehingga gugatan ini patut untuk dikabulkan dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Garut agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

Menetapkan dan mengesahkan gugatan Para Penggugat *a quo* sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class actions*);

B. Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perwakilan kelompok (*class actions*) Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas buku-buku tabungan dan seluruh bilyet deposito/simpanan berjangka atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar \pm Rp478.923.227,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka kepada Para Penggugat adalah \pm Rp3.599.300.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
6. Menyatakan mekanisme pembayaran adalah pihak pemilik membayar atau menyerahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut kemudian kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing ketua kelompok yang terlebih dahulu para ketua kelompok membuka rekening disalah satu bank di Garut dan selanjutnya para ketua kelompok mendistribusikan atau menyerahkan uang tersebut kepada para pemilik tabungan dan bilyet deposito nasabah PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar atau melunasi atas seluruh simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar \pm Rp478.923.227,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) baik

Halaman 57 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar atau melunasi atas seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan berjangka kepada Para Penggugat adalah sebesar \pm Rp3.599.300.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat dan/atau sesuai dengan rumusan ganti kerugian Para Penggugat sebagai patokan penghitungan pembayaran kerugian kepada anggota-anggota kelompok, atas bunga yang diperjanjikan, dengan rincian adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian atas bunga tabungan adalah \pm Rp1.218.990,32 (satu juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh dua sen);
 - b. Kerugian atas bunga deposito/simpanan berjangka adalah \pm Rp1.081.175.601,10 (satu miliar delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus satu rupiah sepuluh sen);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada anggota kelompok-anggota kelompok yang terwakili oleh Para Penggugat adalah:
 - a. Kerugian immateril atas tabungan adalah sebesar \pm Rp182.686.356,42 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah empat puluh dua sen);
 - b. Kerugian immateril atas deposito adalah sebesar \pm Rp4.585.360.640,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian, terhitung semenjak putusan ini dibacakan sampai dengan melaunasi seluruh kewajibannya atau dilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus;
12. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

A. Tambahan simpanan dalam bentuk tabungan, yaitu:

| No | Nama | Alamat | No. Rekening | Jumlah Tabungan Rp. |
|--------|------------------|--|--------------|---------------------|
| 41 | Saadah/Yanto | Jln. Aster II, RT/RW. 02/14 Tarogong Kidul Garut. | 21006221 | 214.280,00 |
| 42 | Mariah/Nunung | Kp. Tipar Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21060193 | 1.264.241,00 |
| 43 | Muji Slamet | Kp. Karamat Desa Panyindangan Kab. Garut | 21060113 | 1.652.402,00 |
| 44 | Ara Irawan/Titim | Kp. Cicatur Desa dan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 21105457 | 1.450.000,00 |
| 45 | Lilis | Kp. Rajawali, Desa dan Kecamatan Bungbulang Kab. Garut | 21160224 | 300.000,00 |
| 46 | Lina | Kp. Sawah Bera, Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21160043 | 2.085.000,00 |
| 47 | Meumeun | Kp. Bojong, Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut | T.2105419 | 362.000,00 |
| 48 | Ayu | Kp. Bojong, Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut | T.2105420 | 264.000,00 |
| 49 | Ropidin | Kp. Sawahlimus, Desa Mekarmukti Kec. Mekarmukti Kab. Garut | 21060222 | 652.830,00 |
| 50 | Nana | Kp. Cigebang, Desa Karang Sari Kec. Pakeneng Kab. Garut | T.21006101 | 500.000,00 |
| 51 | Een | Kp. Puncakarjani, Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21105151 | 168.158,00 |
| 52 | Suminar | Kp. Cijangkar, Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut | 21005317 | 1.541.367,00 |
| JUMLAH | | | | 489.377.505,00 |

B. Tambahan simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka, yaitu :

| No | Nama | Alamat | No. Rekening | Jumlah Deposito Rp. |
|-----|----------------|--|--------------|---------------------|
| 508 | Narji | Kp. Sawah Lega Desa Sukajaya Kec. Cisewu Kab. Garut. | 0963/V/2005 | 5.000.000,00 |
| 509 | Ratijah/Narji | Kp. Sawah Lega Desa Sukajaya Kec. Cisewu Kab. Garut. | 0964/V/2005 | 5.000.000,00 |
| 510 | Ihjan W/Sumdi | Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000858 | 2.500.000,00 |
| 511 | Ihjan W/Sumdi | Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001161 | 1.000.000,00 |
| 512 | Ihjan W/Sumdi | Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000201 | 2.000.000,00 |
| 513 | Sumdi | Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001191 | 3.000.000,00 |
| 514 | M. Rifqi/Sumdi | Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut | 194/V/2006 | 3.000.000,00 |
| 515 | Hotim | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001203 | 4.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------------|--|-------------------|---------------|
| 512 | Ihjan W/Sumdi | Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000201 | 2.000.000,00 |
| 513 | Sumdi | Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001191 | 3.000.000,00 |
| 514 | M. Rifqi/Sumdi | Kp. Cibungur Desa Mekarbakti Kec. Bungbulang Kab. Garut | 194/V/2006 | 3.000.000,00 |
| 515 | Hotim | Kp. Pasantren Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001203 | 4.000.000,00 |
| 516 | Artika | Kp. Cikalong Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000533 | 2.000.000,00 |
| 517 | Mariyam | Kp. Sempur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 460000765 | 5.000.000,00 |
| 518 | Irin | Kp. Ciburial Desa Sinarjaya Kec. Bungbulang | 1532/IX/2005 | 5.000.000,00 |
| 519 | Irin /Ade Iman | Kp. Ciburial Desa Sinarjaya Kabupaten Garut | 0178/II/2006 | 3.200.000,00 |
| 520 | Lilis /Meumeun | Kp. Bojong Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0528/IX/2006 | 1.500.000,00 |
| 521 | Meumeun | Kp. Bojong Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001073 | 5.000.000,00 |
| 522 | Meumeun | Kp. Bojong Desa Bojong Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001134 | 5.000.000,00 |
| 523 | Solihin | Kp. Pangadegan Desa Gunamekar Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1721/XII/2004 | 2.500.000,00 |
| 524 | Omar | Kp. Pangadegan Desa Gunamekar Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0736/IV/2005 | 5.000.000,00 |
| 525 | Eem Supriatin | Kp. Pangadegan Desa Gunamekar Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1110/VI/2005 | 2.000.000,00 |
| 526 | Solihin | Kp. Pangadegan Desa Gunamekar Kec. Bungbulang Kab. Garut | 1128/VII/BPR/2005 | 2.500.000,00 |
| 527 | Omar | Kp. Pangadegan Desa Gunamekar Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0269/VI/2006 | 2.000.000,00 |
| 528 | Yeni | Kp. Tegal Panjang Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001187 | 4.000.000,00 |
| 529 | Suherman | Kp. Gupitan Desa Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut | 46001045 | 7.500.000,00 |
| 530 | Ernasari | Kp. Ketot Desa Cisaat Kecamatan Kadungora Kab. Garut | 0415/VIII/2006 | 1.000.000,00 |
| 531 | Muslim Mulyadi | Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut | 0301/II/2005 | 2.500.000,00 |
| 532 | Muslim Mulyadi | Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut | 0047/I/2006 | 4.500.000,00 |
| 533 | Muslim | Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut | 46001245 | 1.400.000,00 |
| 534 | Yanto Apandi | Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut | 1823/XI/2003 | 2.000.000,00 |
| 535 | Yanto S/Saadah | Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut | 599/III/2002 | 12.500.000,00 |
| 536 | Saadah/Yanto | Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut | 0303/II/2004 | 2.000.000,00 |
| 537 | Saadah | Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut | 0203/I/2005 | 3.500.000,00 |
| 538 | Saadah | Jl. Aster II Desa Jayaraga Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut | 46000178 | 3.000.000,00 |
| 539 | H. Djuman | Kp. Cibalubur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0133/V/2006 | 2.000.000,00 |
| 540 | Ara Irawan/Titim | Kp. Cicatur Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 0460/VIII/2006 | 2.500.000,00 |
| 541 | Endoh | Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 460000763 | 1.500.000,00 |
| 542 | Didi Apud/Heni | Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000944 | 7.500.000,00 |
| 543 | Heni/Didi Apud | Kp. Cikolotok Desa Hanjuang Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000945 | 7.500.000,00 |
| 544 | Hadian Supiar G. | Kp. Sukagalih Desa Margalaksana Kec. Bungbulang Kab. Garut | 031/IV/2006 | 40.000.000,00 |
| 545 | Ranti | Kp. Pamungguan Ds. Gunamekar Kec. Bungbulang Kab. Garut | 460000775 | 1.000.000,00 |



| | | | | |
|--------|--------------------|--|----------------|------------------|
| 546 | Elis Suryati | Kp. Cihikeu Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000872 | 5.000.000,00 |
| 547 | Mamur / Elis S | Kp. Cihikeu Desa Cihikeu Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46000873 | 5.000.000,00 |
| 548 | Opang | Kp. Ranca Kujang Desa Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut | 1226/IX/2004 | 10.000.000,00 |
| 549 | Ningrum | Kp. Cikalapa Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut | 46000964 | 3.000.000,00 |
| 550 | Hj. Lilis Komariah | Kp. Sarkanjut Desa Lewigoong Banyuresmi Garut | 46001138 | 20.000.000,00 |
| 551 | Toto | Kp. Pasir Muncang Desa Caringin Kec. Caringin Kab. Garut | 46000637 | 2.000.000,00 |
| 552 | Hayati/Ropidin | Kp. Cisawer Desa Cijayana Kab. Garut | 46000724 | 6.000.000,00 |
| 553 | Amin | Kp. Joho Desa Wangunjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut | 46000634 | 5.000.000,00 |
| 554 | Dahyu | Kp. Cihurip Desa Cisewu Kec. Cisewu Kab. Garut | 1349/VIII/2003 | 1.000.000,00 |
| 555 | Saepudin | Kp. Sukamulya Bandung | 46000106 | 4.000.000,00 |
| 556 | Cucu Hj. | Kp. Puncakarjani Ds. Bungbulang Kec. Bungbulang Garut | 1203/VIII/2004 | 1.500.000,00 |
| JUMLAH | | | | 3.833.900.000,00 |

Jadi jumlah keseluruhan atas simpanan dalam bentuk tabungan dan simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka adalah sebesar \pm Rp4.323.277.505,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah);

Mengingat jumlah nasabah PD.BPR Bungbulang baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito ada penambahan jumlah nasabah dan jumlah nominal tabungan dan deposito, maka jumlah pokok, jumlah bunga dan jumlah kerugian imateril baik tabungan maupun deposito dalam *posita* dan *petitum* gugatan perwakilan kelompok berubah menjadi:

Pada bagian *posita* poin 9, 11, 12, dan bagian *petitum* poin 3, 4, 7, 8, 9, dan 10 menjadi, adalah sebagai berikut:

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan yang ingkar janji (wanprestasi) sehingga Para Tergugat dinyatakan mempunyai kewajiban pokok berupa simpanan dalam bentuk tabungan adalah sebesar \pm Rp489.377.505,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) dan kewajiban pokok berupa simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka sebesar \pm Rp3.833.900.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat, sehingga Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan/membayar atas seluruh kewajibannya tersebut kepada Para Penggugat yaitu sebesar \pm Rp4.323.277.505,00 (empat miliar



tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah); baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

11. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu telah melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian materil kepada Para Tergugat tersebut baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus berupa bunga atau jasa pinjaman yang telah diperjanjikan, (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1239 KUHPerdara *juncto* Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf f dan g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999), yaitu dengan perincian adalah sebagai berikut:

- a. Tambahan kerugian atas bunga tabungan sejumlah 12 nasabah, yaitu sejak disimpannya uang hingga PD BPR Bungbulang dinyatakan dicabut izinnya oleh Bank Indonesia yaitu pada tanggal 20 September 2007, dengan perincian:

| NO | REKENING | POKOK | SUKU BUNGA (%) | LAMA SIMPANAN | | Jml. Hari | JUMLAH BUNGA (Rp) |
|--------|------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | Tgl. Awal | Tgl. Akhir | | |
| 41 | 21006221 | 214.280,00 | 6,00% | 12 September 2007 | 20 November 2007 | 69 | 2.430,46 |
| 42 | 21060193 | 1.264.241,00 | 6,00% | 11 November 2007 | 20 November 2007 | 9 | 1.870,38 |
| 43 | 21060113 | 1.652.402,00 | 6,00% | 10 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 41 | 11.136,74 |
| 44 | 21105457 | 1.450.000,00 | 6,00% | 15 November 2007 | 20 November 2007 | 5 | 1.191,78 |
| 45 | 21160224 | 300.000,00 | 6,00% | 18 November 2007 | 20 November 2007 | 2 | 98,63 |
| 46 | 21160043 | 2.085.000,00 | 6,00% | 18 November 2007 | 20 November 2007 | 2 | 685,48 |
| 47 | T.2105419 | 362.000,00 | 6,00% | 11 November 2007 | 20 November 2007 | 9 | 535,56 |
| 48 | T.2105420 | 264.000,00 | 6,00% | 11 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 40 | 1.735,89 |
| 49 | 21060222 | 652.830,00 | 6,00% | 19 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 32 | 3.434,06 |
| 50 | T.21006101 | 500.000,00 | 6,00% | 01 September 2007 | 20 November 2007 | 80 | 6.575,34 |
| 51 | 21105151 | 168.158,00 | 6,00% | 28 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 23 | 635,78 |
| 52 | 21005317 | 1.541.367,00 | 6,00% | 10 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 41 | 10.388,39 |
| JUMLAH | | | | | | | 1.259.708,82 |

- b. Tambahan kerugian atas bunga deposito/simpanan berjangka sejumlah 49 nasabah yaitu sejak disimpannya uang hingga PD. BPR Bungbulang Kab. Garut dinyatakan dicabut izinnya oleh Bank Indonesia yaitu pada tanggal 20 September 2007, dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | REKENING | POKOK DEPOSITO (Rp) | BUNG A/TH (% p.a.) | LAMA SIMPANAN | | Jml. Hari | JUMLAH BUNGA (Rp) |
|-----|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|
| | | | | Tgl. Awal | Tgl. Akhir | | |
| 508 | 0963/V/2005 | 5.000.000,00 | 20,40% | 2 Juni 2005 | 20 November 2007 | 901 | 2.517.863,01 |
| 509 | 0964/V/2005 | 5.000.000,00 | 20,40% | 2 Juni 2005 | 20 November 2007 | 901 | 2.517.863,01 |
| 510 | 46000858 | 2.500.000,00 | 14,00% | 2 Juli 2007 | 20 November 2007 | 141 | 135.205,48 |
| 511 | 46001161 | 1.000.000,00 | 14,00% | 17 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 34 | 13.041,10 |
| 512 | 46000201 | 2.000.000,00 | 14,00% | 4 Desember 2006 | 20 November 2007 | 351 | 269.260,27 |
| 513 | 46001191 | 3.000.000,00 | 14,00% | 25 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 26 | 29.917,81 |
| 514 | 194/V/2006 | 3.000.000,00 | 17,40% | 22 Mei 2006 | 20 November 2007 | 547 | 782.284,93 |
| 515 | 46001203 | 4.000.000,00 | 11,00% | 31 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 20 | 24.109,59 |
| 516 | 46000533 | 2.000.000,00 | 12,00% | 11 Maret 2007 | 20 November 2007 | 254 | 167.013,70 |
| 517 | 460000765 | 5.000.000,00 | 14,00% | 31 Mei 2007 | 20 November 2007 | 173 | 331.780,82 |
| 518 | 1532/IX/2005 | 5.000.000,00 | 20,40% | 15 September 2005 | 20 November 2007 | 796 | 2.224.438,36 |
| 519 | 0178/II/2006 | 3.200.000,00 | 20,40% | 6 Februari 2006 | 20 November 2007 | 652 | 1.166.097,53 |
| 520 | 0528/IX/2006 | 1.500.000,00 | 12,00% | 20 September 2006 | 20 November 2007 | 426 | 210.082,19 |
| 521 | 46001073 | 5.000.000,00 | 14,00% | 02 September 2007 | 20 November 2007 | 79 | 151.506,85 |
| 522 | 46001134 | 5.000.000,00 | 14,00% | 26 September 2007 | 20 November 2007 | 55 | 105.479,45 |
| 523 | 1721/XII/2004 | 2.500.000,00 | 20,40% | 2 Desember 2004 | 20 November 2007 | 1083 | 1.513.232,88 |
| 524 | 0736/IV/2005 | 5.000.000,00 | 20,40% | 20 April 2005 | 20 November 2007 | 944 | 2.638.027,40 |
| 525 | 1110/VI/2005 | 2.000.000,00 | 20,40% | 29 Juni 2005 | 20 November 2007 | 874 | 976.964,38 |
| 526 | 1128/VII/BPR/2005 | 2.500.000,00 | 20,40% | 3 Juli 2005 | 20 November 2007 | 870 | 1.215.616,44 |
| 527 | 0269/VI/2006 | 2.000.000,00 | 17,00% | 19 Juni 2006 | 20 November 2007 | 519 | 483.452,05 |
| 528 | 46001187 | 4.000.000,00 | 12,00% | 21 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 30 | 39.452,05 |
| 529 | 46001045 | 7.500.000,00 | 12,00% | 22 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 90 | 221.917,81 |
| 530 | 0415/VIII/2006 | 1.000.000,00 | 16,00% | 9 Agustus 2006 | 20 November 2007 | 468 | 205.150,68 |
| 531 | 0301/II/2005 | 2.500.000,00 | 20,40% | 7 Februari 2005 | 20 November 2007 | 1016 | 1.419.616,44 |
| 532 | 0047/I/2006 | 4.500.000,00 | 20,40% | 7 Januari 2006 | 20 November 2007 | 682 | 1.715.276,71 |
| 533 | 46001245 | 1.400.000,00 | 14,00% | 14 November 2007 | 20 November 2007 | 6 | 3.221,92 |
| 534 | 1823/XI/2003 | 2.000.000,00 | 20,50% | 19 November 2003 | 20 November 2007 | 1462 | 1.642.246,58 |
| 535 | 599/III/2002 | 12.500.000,00 | 24,00% | 20 Maret 2002 | 20 November 2007 | 2071 | 17.021.917,81 |
| 536 | 0303/II/2004 | 2.000.000,00 | 20,40% | 20 Februari 2004 | 20 November 2007 | 1369 | 1.530.279,45 |
| 537 | 0203/I/2005 | 3.500.000,00 | 20,40% | 24 Januari 2005 | 20 November 2007 | 1030 | 2.014.849,32 |
| 358 | 46000178 | 3.000.000,00 | 15,00% | 26 November 2006 | 20 November 2007 | 359 | 442.602,74 |
| 539 | 0133/V/2006 | 2.000.000,00 | 12,00% | 3 Mei 2006 | 20 November 2007 | 566 | 372.164,38 |
| 540 | 0460/VIII/2006 | 2.500.000,00 | 16,00% | 25 Agustus 2006 | 20 November 2007 | 452 | 495.342,47 |
| 541 | 460000763 | 1.500.000,00 | 14,00% | 30 Mei 2007 | 20 November 2007 | 174 | 100.109,59 |
| 542 | 46000944 | 7.500.000,00 | 14,00% | 23 Juli 2007 | 20 November 2007 | 120 | 345.205,48 |
| 543 | 46000945 | 7.500.000,00 | 14,00% | 23 Juli 2007 | 20 November 2007 | 120 | 345.205,48 |

Halaman 63 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



| | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|------------------|------------------|------|------------------|
| 544 | 031/IV/2006 | 40.000.000,00 | 17,40% | 7 April 2006 | 20 November 2007 | 592 | 11.288.547,95 |
| 545 | 460000775 | 1.000.000,00 | 14,00% | 3 Juni 2007 | 20 November 2007 | 170 | 65.205,48 |
| 546 | 46000872 | 5.000.000,00 | 12,00% | 6 Juli 2007 | 20 November 2007 | 137 | 225.205,48 |
| 547 | 46000873 | 5.000.000,00 | 12,00% | 6 Juli 2007 | 20 November 2007 | 137 | 225.205,48 |
| 548 | 1226/IX/2004 | 10.000.000,00 | 20,40% | 1 September 2004 | 20 November 2007 | 1175 | 6.567.123,29 |
| 549 | 46000964 | 3.000.000,00 | 14,00% | 1 Agustus 2007 | 20 November 2007 | 111 | 127.726,03 |
| 550 | 46001138 | 20.000.000,00 | 24,00% | 3 Oktober 2007 | 20 November 2007 | 48 | 631.232,88 |
| 551 | 46000637 | 2.000.000,00 | 16,00% | 18 April 2007 | 20 November 2007 | 216 | 89.369,86 |
| 552 | 46000724 | 6.000.000,00 | 14,00% | 16 Mei 2007 | 20 November 2007 | 188 | 432.657,53 |
| 553 | 46000634 | 5.000.000,00 | 14,00% | 18 April 2007 | 20 November 2007 | 216 | 414.246,58 |
| 554 | 1349/VIII/2003 | 1.000.000,00 | 24,00% | 24 Agustus 2003 | 20 November 2007 | 1549 | 1.018.520,55 |
| 555 | 46000106 | 4.000.000,00 | 15,00% | 1 November 2006 | 20 November 2007 | 384 | 631.232,88 |
| 556 | 1203/VIII/2004 | 1.500.000,00 | 20,40% | 26 Agustus 2004 | 20 November 2007 | 1181 | 990.098,63 |
| JUMLAH | | | | | | | 1.149.369.769,87 |

12. Bahwa lagi pula akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu telah melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian immateril kepada Para Tergugat tersebut baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus, yang mana Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya usaha Para Penggugat karena Para Penggugat tersebut adalah seorang petani dan pedagang, yang mana petani dan pedagang tersebut tidak bisa bertani dan berdagang karena modalnya tertahan di PD BPR Bungbulang, serta nasabah yang ingin berangkat ke tanah suci yang pada akhirnya tidak jadi berangkat karena uangnya tertahan di PD BPR Bungbulang, dan banyak anak-anak Para Penggugat yang putus sekolah karena tidak bisa membayar biaya sekolah tersebut sehubungan uangnya tertahan di PD BPR Bungbulang, dimana kerugian tersebut yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Para Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu apabila dinilai dengan uang (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1239 KUHPerdara *juncto* Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf f dan g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999) yaitu dengan perincian adalah sebagai berikut:

12.1 Tambahan perhitungan kerugian immateril berdasarkan tabungan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | REKENING | POKOK | SUKU BUNGA (%) | LAMA SIMPANAN | | Jml. Hari | JUMLAH BUNGA (Rp) |
|--------|------------|--------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | Tgl. Awal | Tgl. Akhir | | |
| 41 | 21006221 | 214.280,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 82.283,52 |
| 42 | 21060193 | 1.264.241,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 485.468,54 |
| 43 | 21060113 | 1.652.402,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 634.522,37 |
| 44 | 21105457 | 1.450.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 556.800,00 |
| 45 | 21160224 | 300.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 115.200,00 |
| 46 | 21160043 | 2.085.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 800.640,00 |
| 47 | T.2105419 | 362.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 139.008,00 |
| 48 | T.2105420 | 264.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 101.376,00 |
| 49 | 21060222 | 652.830,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 250.686,72 |
| 50 | T.21006101 | 500.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 192.000,00 |
| 51 | 21105151 | 168.158,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 64.572,67 |
| 52 | 21005317 | 1.541.367,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 591.884,93 |
| JUMLAH | | | | | | | 186.700.799,17 |

12.2 Tambahan Perhitungan kerugian immateril berdasarkan deposito /simpanan berjangka adalah:

| NO | REKENING | POKOK DEPOSITO (Rp) | BUNG A /THN (% p.a.) | LAMA SIMPANAN | | Jml. Hari | JUMLAH BUNGA (Rp) |
|-----|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | | Tgl. Awal | Tgl. Akhir | | |
| 508 | 0963/V/2005 | 5.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 509 | 0964/V/2005 | 5.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 510 | 46000858 | 2.500.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.240.000,00 |
| 511 | 46001161 | 1.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 896.000,00 |
| 512 | 46000201 | 2.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 513 | 46001191 | 3.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.688.000,00 |
| 514 | 194/V/2006 | 3.000.000,00 | 17,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.340.800,00 |
| 515 | 46001203 | 4.000.000,00 | 11,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.816.000,00 |
| 516 | 46000533 | 2.000.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.536.000,00 |
| 517 | 460000765 | 5.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 518 | 1532/IX/2005 | 5.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 519 | 0178/II/2006 | 3.200.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.177.920,00 |
| 520 | 0528/IX/2006 | 1.500.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.152.000,00 |
| 521 | 46001073 | 5.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 522 | 46001134 | 5.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 523 | 1721/XII/2004 | 2.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 524 | 0736/IV/2005 | 5.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 525 | 1110/VI/2005 | 2.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 526 | 1128/VII/BPR/ 2005 | 2.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 527 | 0269/VI/2006 | 2.000.000,00 | 17,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.176.000,00 |
| 528 | 46001187 | 4.000.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.072.000,00 |

Halaman 65 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|-------------|---------------|------|------------------|
| 529 | 46001045 | 7.500.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 530 | 0415/VIII/2006 | 1.000.000,00 | 16,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.024.000,00 |
| 531 | 0301/II/2005 | 2.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 532 | 0047/I/2006 | 4.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.875.200,00 |
| 533 | 46001245 | 1.400.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.254.400,00 |
| 534 | 1823/XI/2003 | 2.000.000,00 | 20,50% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.624.000,00 |
| 535 | 599/III/2002 | 12.500.000,00 | 24,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 19.200.000,00 |
| 536 | 0303/II/2004 | 2.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 537 | 0203/I/2005 | 3.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.569.600,00 |
| 538 | 46000178 | 3.000.000,00 | 15,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.880.000,00 |
| 539 | 0133/V/2006 | 2.000.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.536.000,00 |
| 540 | 0460/VIII/2006 | 2.500.000,00 | 16,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 541 | 460000763 | 1.500.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.344.000,00 |
| 542 | 46000944 | 7.500.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 543 | 46000945 | 7.500.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 544 | 031/IV/2006 | 40.000.000,00 | 17,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 44.544.000,00 |
| 545 | 460000775 | 1.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 896.000,00 |
| 546 | 46000872 | 5.000.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 547 | 46000873 | 5.000.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 548 | 1226/IX/2004 | 10.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 13.056.000,00 |
| 549 | 46000964 | 3.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.688.000,00 |
| 550 | 46001138 | 20.000.000,00 | 24,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 30.720.000,00 |
| 551 | 46000637 | 2.000.000,00 | 16,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.048.000,00 |
| 552 | 46000724 | 6.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 553 | 46000634 | 5.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 554 | 1349/VIII/2003 | 1.000.000,00 | 24,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.536.000,00 |
| 555 | 46000106 | 4.000.000,00 | 15,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 556 | 1203/VIII/2004 | 1.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.958.400,00 |
| JUMLAH | | | | | | | 4.846.703.360,00 |

Bahwa, sehubungan pada bagian uraian fakta-fakta hukum poin enam ada perubahan dan atau penambahan, yaitu simpanan dalam bentuk tabungan asalnya berjumlah 40 (empat puluh) nasabah ditambah 12 (dua belas) nasabah sehingga jumlah keseluruhannya adalah menjadi 52 (lima puluh dua) nasabah dan simpanan dalam bentuk deposito asalnya berjumlah 507 (lima ratus tujuh) nasabah ditambah 49 (empat puluh sembilan) nasabah sehingga jumlah keseluruhannya adalah menjadi 556 (lima ratus lima puluh enam) nasabah, maka surat gugatan pada halaman satu tentang kelompok nasabah baik dalam bentuk tabungan maupun deposito, adalah menjadi yaitu kelompok I dalam bentuk tabungan sebanyak 52 (lima puluh dua) orang/nasabah dan Kelompok II dalam bentuk deposito/simpanan berjangka sebanyak 556 (lima ratus lima puluh enam) orang/nasabah;

Halaman 66 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Dan selanjutnya tentang kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat selaku wakil kelompok dalam kaitan prosedural gugatan perwakilan kelompok (*class actions*), sebagaimana dalam surat gugatan pada poin empat dan lima halaman tiga, ada perbaikan juga sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut:

4. Bahwa korban/yang dirugikan sebagai akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat diperkirakan berjumlah 608 (enam ratus delapan) orang/nasabah, yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) orang/nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, dan 556 (lima ratus lima puluh enam) orang/nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito/simpanan berjangka;
5. Bahwa oleh karena ada kesamaan fakta dan dasar hukum serta kerugian yang sama dari para nasabah dengan jumlah kurang lebih 608 (enam ratus delapan) orang/nasabah yang mengalami kerugian, maka dalam mengajukan gugatan digunakan prosedur gugatan perwakilan kelompok dengan maksud agar pelaksanaan gugatan atau penyelenggaraan peradilan menjadi sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;

Mengingat pada bagian uraian fakta-fakta hukum poin enam ada perubahan dan atau penambahan, tentang jumlah simpanan dalam bentuk tabungan dan jumlah simpanan dalam bentuk deposito, maka *petitum* poin 3, 4, 7, 8, 9 dan 10 adalah diperbaiki, sehingga *petitum* selengkapnya adalah sebagai berikut:

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar + Rp489.377.505,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah);
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka kepada Para Penggugat adalah ± Rp3.833.900.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar atau melunasi atas seluruh simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar ± Rp489.377.505,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga



ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar atau melunasi atas seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan berjangka kepada Para Penggugat adalah sebesar \pm Rp3.833.900.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat dan/atau sesuai dengan rumusan ganti kerugian Para Penggugat sebagai patokan penghitungan pembayaran kerugian kepada anggota-anggota kelompok, atas bunga yang diperjanjikan, dengan rincian adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian atas bunga tabungan adalah \pm Rp1.259.708,82 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen);
 - b. Kerugian atas bunga deposito/simpanan berjangka adalah \pm Rp1.149.369.769,87 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateril kepada anggota kelompok-anggota kelompok yang terwakili oleh Para Penggugat adalah:
 - c. Kerugian imateril atas tabungan adalah sebesar \pm Rp186.700.799,17 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen);
 - d. Kerugian imateril atas deposito adalah sebesar \pm Rp4.846.703.360,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Menimbang bahwa atas perubahan gugatan tersebut oleh karena secara substansi tidak menyimpang dari pokok gugatan dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 823.K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 dan Nomor 434.K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971, maka Majelis mengijinkan perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan dalil-dalilnya didalam surat gugatan didasarkan adanya hubungan hukum ikatan perjanjian dalam bentuk



tabungan, bentuk deposito/simpanan berjangka, dan berupa bunga atau jasa pinjaman yang telah diperjanjikan antara Para Penggugat dengan PD BPR Bungbulang (sekarang dalam likuidasi)/Tergugat IV, padahal di dalam tabungan, deposito/simpanan berjangka tersebut tidak terdapat sama sekali tulisan berupa kata atau kalimat yang menunjukkan keterlibatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak terkait dan tidak dikenal dalam hubungan perjanjian tersebut;

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak pernah membuat ikatan perjanjian yang menjanjikan untuk memenuhi suatu prestasi apapun dengan Para Penggugat sehingga gugatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut telah secara keliru apabila ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III *qq* Pemerintah Daerah Kabupaten Garut adalah Lembaga Publik, bukan merupakan Pelaku Usaha dalam kegiatan bidang ekonomi sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas suatu jasa berupa prestasi tertentu sebagaimana dalil Para Penggugat adalah tidak beralasan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta tidak mempunyai dasar hukum yang dapat diterima sebagai dasar melakukan tuntutan hak;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang diajukan belakangan (untuk kedua kalinya) dan merupakan gugatan yang mengandung cacat *nebis in idem*, karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkaranya yang telah mendapat keputusan dari Pengadilan Negeri Garut (Putusan Nomor 12/PDT/G/2013/PN GRT. tanggal 17 Oktober 2013);
6. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*
Bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 April 2014 telah memenuhi syarat sebagai gugatan yang cacat formal karena *error in persona* dengan alasan sebagai berikut:
 - Gugatan Para Penggugat mengandung diskualifikasi *In Person (Gemis Aan Hoedanigheid)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kapasitas (*legal standing*) Para Penggugat di dalam mengajukan gugatan *a quo* melalui surat gugatannya tertanggal 17 April 2014 adalah patut ditolak, karena kedudukan Para Penggugat sebagai nasabah di PD BPR Bungbulang diragukan kebenarannya apabila Para Penggugat memang benar merupakan nasabah PD BPR Bungbulang, setidaknya Para Penggugat pernah menerima pemberitahuan mengenai pencabutan izin usaha PD BPR Bungbulang sebagaimana Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD Bank Perkreditan Rakyat Bungbulang dan adanya pengangkatan tim likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-074/KE/XI/2007 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR. Bungbulang (DL) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-252/KE/XII/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-074/KE/XI/2007 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL), serta pernah menerima pembayaran dari hasil pencairan aset PD BPR Bungbulang (DL) atas bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah yang tidak dijamin, yang telah dilaksanakan oleh LPS, dalam hal ini Tim Likuidasi PD. BPR Bungbulang (DL) melalui PD BPR Garut sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor PKS-01/TL-PD BPR-BBL/X/2011 dan Nomor B09-/PKS/BPR-GRT/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tahap I Hasil Pencairan Aset PD BPR Bungbulang (DL) atas bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah yang tidak dijamin, serta Perjanjian Kerjasama Nomor PKS-02/TL-PD BPR-BBL/XI/2011, dan Nomor B-031/PKS/BPR-GRT/X/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tahap II Hasil Pencairan Aset PD BPR Bungbulang (DL) atas bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah yang tidak dijamin tertanggal 17 November 2011. Namun faktanya dalam gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah menerima pembayaran tersebut, hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai nasabah PD BPR Bungbulang diragukan kebenarannya sehingga kedudukan Para Penggugat yang tidak

Halaman 70 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kapasitas (*legal standing*) ini patut untuk dikualifikasikan sebagai cacat *error in persona*, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111 bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, hal tersebut karena Para Penggugat sebagai nasabah resmi dari PD BPR Bungbulang diragukan kebenarannya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal karena mengandung diskualifikasi *in person*;

Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (*legal standing*) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkat menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 November 1970 *juncto* PNI Bandung Nomor 215/1967/Sipil tanggal 4 Juni 1968 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatinya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Para Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan atas perkara *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Tentang *Legal Standing* Wakil Kelompok

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampaikan di atas bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai nasabah di PD BPR Bungbulang diragukan kebenarannya karena apabila Para Penggugat memang benar merupakan Nasabah PD BPR Bungbulang, setidaknya Para Penggugat pernah menerima pemberitahuan mengenai pencabutan Izin Usaha PD. BPR Bungbulang sebagaimana Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD Bank Perkreditan Rakyat Bungbulang dan adanya pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-074/KE/XI/2007 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR. Bungbulang (DL) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-252/KE/XII/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-074/KE/XI/2007 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL), serta pernah menerima pembayaran dari hasil pencairan aset PD BPR Bungbulang (DL) atas bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah yang tidak dijamin, yang telah dilaksanakan oleh LPS, dalam hal ini Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) melalui PD BPR Garut sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor PKS-01/TL-PD BPR-BBL/X/2011 dan Nomor B09-/PKS/BPR-GRT/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tahap I Hasil Pencairan Aset PD BPR Bungbulang (DL) atas bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah yang tidak dijamin, serta Perjanjian Kerjasama Nomor PKS-02/TL-PD BPR-BBL/XI/2011, dan Nomor B-031/PKS/BPR-GRT/X/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tahap II Hasil Pencairan Aset PD BPR Bungbulang (DL) atas bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah yang tidak dijamin tertanggal 17 November 2011. Namun faktanya dalam gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah menerima pembayaran tersebut, termasuk kedudukan Saudara Drs. H. Adin Burhanudin, M.Pd., dan Saudara Ny Hj Enung Maria. Sehingga dengan demikian tidak ada kapasitas keduanya untuk menjadi wakil kelompok, karena sesuai Pasal 1 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, syarat untuk menjadi wakil kelompok adalah harus menderita kerugian sementara kedudukan Saudara Drs. H. Adin Burhanudin, M.Pd., dan Saudara Ny Hj Enung Maria sebagai nasabah di PD BPR Bungbulang diragukan kebenarannya; Atas dasar hal tersebut sudah jelas bahwa Saudara Drs. H. Adin Burhanudin, M.Pd., dan Saudara Ny Hj Enung Maria tidak layak menjadi

Halaman 72 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil kelompok sehingga dengan demikian kiranya sudah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Garut untuk menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yakni kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yakni dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 November 2007 izin usaha PD BPR Bungbulang telah dicabut sebagaimana Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD Bank Perkreditan Rakyat Bungbulang;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank, pemerintah telah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009;
- Bahwa setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membentuk Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-074/KE/XI/2007 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR. Bungbulang (DL) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-252/KE/XII/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan Nomor KEP-074/KE/XI/2007 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi PD BPR

Halaman 73 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungbulang (DL), guna melakukan likuidasi terhadap PD BPR Bungbulang (DL);

- Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004, LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank gagal dengan kewenangan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- Bahwa untuk menjadikan terang perkara ini yaitu mengenai kebenaran dan validitas dokumen yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, serta adanya keseimbangan antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dengan pihak Para Penggugat dalam mengemukakan bukti-bukti dan fakta maka Lembaga Penjamin Simpanan seharusnya dimasukkan sebagai Tergugat dalam Perkara ini, karena yang melakukan hubungan hukum antara Para Penggugat adalah BPR Bungbulang (DL) dan yang selanjutnya diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tersebut dan peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian seharusnya gugatan ditujukan kepada keduanya, bukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam gugatan Para Penggugat maka gugatan *a quo* menjadi tidak sempurna sebagaimana diisyaratkan di dalam putusan MARI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 bahwa dengan tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki relevansi dan kewenangan di dalam suatu perkara maka dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terlihat bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru karena Para Penggugat tidak menarik pihak yang merupakan kunci penyelesaian permasalahan ini yakni dalam hal ini LPS sehingga dengan sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); Bahwa terkait dengan kurang pihak, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengutip sebagian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2011/PN Cj dengan para pihak Haryani, cs, sebagai Penggugat melawan Bank Pekreditan Rakyat LPK Bojong

Halaman 74 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Picung, dkk, sebagai Tergugat, dengan objek gugatan likuidasi BPR Bojongpicung, Kabupaten Cianjur pada alinea 6 halaman 98 sd halaman 100 dan putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2014/PN SBG. dengan para pihak Hj Yoyoh, dkk sebagai Penggugat melawan Pemerintah Kabupaten Subang, dkk sebagai Para Tergugat, dengan pertimbangan, sbb:

Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2011/PN Cj:

Menimbang, bahwa dari bukti T.I.IV-1, T.I.IV-21, T.III-8 dan T.III-9, diperoleh fakta hukum bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD BPR LPK) Bojongpicung telah dicabut izin usahanya (*vide* bukti T.I.IV-1 dan T.III-8), dan berdasarkan bukti T.I.IV-21 yang sama dengan bukti T.III-9 berupa *press release* Nomor Press-019/LPS/IX/2011 antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka likuidasi PD BPR LPK Bojongpicung, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;

Menimbang, bahwa sekalipun T.I.IV-1 yang sama dengan bukti T.III-8 berupa fotocopy dari salinan, namun hemat majelis tetap mempunyai nilai pembuktian apalagi hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Aris Suseno dan Yudha Ramelan serta keterangan saksi Dadang Mukarom. Bukti surat tersebut dengan dihubungkan dengan keterangan ahli Aris Suseno dan Yudha Ramelan serta saksi Achmad Mukarom yang antara lain menyatakan status PD BPR LPK Bojongpicung telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia dan sekarang dalam proses likuidasi oleh LPS, serta pihak Para Penggugat tidak mengajukan keberatan ataupun menunjukan fakta yang sebaliknya, lagi pula pencabutan izin usaha terhadap PD BPR LPK Bojongpicung sudah menjadi fakta *notoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terbukti bahwa PD BPR LPK Bojongpicung telah dicabut izin usahanya, yang berakibat hukum BPR tersebut menutup kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya izin usaha PD BPR LPK Bojongpicung oleh Bank Indonesia berdasarkan SK Gubernur Indonesia Nomor 13/88/KEP.GBI/2011 tanggal 4 Oktober 2011, maka izin usaha badan hukum PD BPR LPK Bojongpicung telah dicabut persetujuan izinnya oleh pemerintah "*approval*" atau "*consensus of the government*" yang mengakibatkan keberadaan badan hukum PD BPR LPK Bojongpicung berada dalam proses pembubaran perseroan/likuidasi (*vide*

Halaman 75 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 142 ayat 1 huruf f Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Bahwa dengan demikian, maka berlakulah ketentuan hukum publik atas keberadaan PD BPR LPK Bojongpicung, yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berwenang melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset Bank sebelum proses likuidasi;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah berlaku efektif (dengan beberapa perubahan) dengan beberapa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, antara lain Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank khususnya dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Terhitung sejak izin Usaha Bank dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak wewenang RUPS dalam rangka likuidasi Bank”;

Selanjutnya dalam Pasal 9 huruf c dinyatakan, bahwa:

“Tim Likuidasi mempunyai tugas melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank”;

Tentang jangka waktu pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak terbentuknya Tim Likuidasi, yang dapat diperpanjang paling banyak dua kali masing-masing paling lama satu tahun (*vide* pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah dicabutnya izin usaha bank dan memasuki proses likuidasi, maka dalam rangka mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan, Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS dapat menggunakan jasa pengacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*vide* Pasal 31 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank). Dalam ketentuan tersebut tersirat bahwa yang berwenang mewakili bank dalam likudasi adalah Lembaga Penjamin Simpanan. Bahwa dengan demikian Bank Dalam Likuidasi tidak mempunyai *persona stand in judicio* dan kedudukannya harus diwakili oleh Lembaga Penjamin Simpanan;

Menimbang, berkaitan dengan dalil Para Penggugat bahwa karena telah dianutnya *prinsip piercing the corporate veil* maka sepatutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII bertanggung jawab atas kerugian yang

Halaman 76 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diderita oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat V (periksa replik Penggugat halaman 14 dan 15 poin 21, 22 dan 23), Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan mengenai *prinsip piercing the corporate veil* ditemukan dalam rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara tegas menyatakan bahwa pertanggungjawaban terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak berlaku dalam hal:

- Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- Pemegang saham yang bersangkutan terlihat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau;
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dinyatakan perlindungan melalui prinsip *prinsip piercing the corporate veil* diberikan kepada kreditor perseroan, namun dalam perkara ini perseroan berupa PD BPR LPK Bojongpicung dalam status likuidasi, sehingga pemegang saham, direksi, maupun komisaris perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sedangkan apabila hal tersebut dalam kapasitas pribadi-pribadi, maka tuntutan tersebut dilakukan setelah berakhirnya proses likuidasi dan harta perseroan tidak cukup untuk menutup kewajibannya terhadap para kreditor;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Para tergugat tanpa menyertakan Lembaga Penjamin Simpanan selaku Tim Likuidasi PD Bank Perkreditan Rakyat LPK Bojongpicung sebagai pihak menyebabkan gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka sepanjang *posita* maupun *petitum* lainnya menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat I, II, III, IV dan V sebagai pihak yang kalah beralasan hukum untuk dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan dalam *herzine island reglement* (HIR) serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

Putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2014/PN SBG.:

Menimbang bahwa Tergugat I dalam eksepsi ke-1 menyatakan pada pokoknya gugatan *error in persona* berupa kurang pihak karena selaku pemilik BPR LPK Pabuaran ijin usahanya telah dicabut dan tanggungjawab selaku pemilik saham telah beralih kepada LPS, sehingga seharusnya LPS turut digugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat menuntut agar uangnya simpanannya di BPR LPK Pabuaran yang telah dinyatakan tidak layak bayar oleh LPS dibayarkan kembali kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menentukan jika nasabah penyimpan yang simpanannya dinyatakan tidak layak bayar merasa dirugikan maka upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah tersebut yaitu:

- a. Mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas, atau;
- b. Melakukan upaya hukum melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pembahasan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bank dimana Para Penggugat menyimpan uangnya telah dilikuidasi sedangkan uang simpanan Para Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak layak bayar oleh LPS maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 terhadap kerugian tersebut Para Penggugat yang melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan seharusnya menyertakan LPS sebagai pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I beralasan menurut hukum sehingga eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1566/K/Pdt/1983 bahwa amar putusan perkara Nomor 78/1979

Halaman 78 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* (kurangnya pihak yang ditarik sebagai tergugat, sehingga terhadap gugatan yang tidak jelas atau kabur dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Gugatan Para Penggugat salah sasaran

Bahwa apabila Para Penggugat memang benar merupakan nasabah dari PD BPR Bungbulang, maka sejak tanggal 20 November 2007 atau lebih tepatnya sejak terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR Bungbulang, seharusnya Para Penggugat sudah menerima pemberitahuan secara resmi dari Lembaga Penjamin Simpanan atau setidaknya dari pengurus PD BPR Bungbulang bahwa sejak tanggal tersebut secara institusional/sebagai badan hukum secara resmi telah dan atau dalam proses dilikuidasi;

Bahwa dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya dan secara hukum atas wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya maka segala hak dan kewenangan dari pengelolaan PD BPR Bungbulang termasuk diantaranya adalah pemilik saham (Tergugat I) telah dicabut dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Apalagi posisi Tergugat II dan Tergugat III (baik secara struktural maupun fungsional) tidak mempunyai kewenangan apapun dalam pengelolaan PD BPR Bungbulang baik sebelum atau setelah izin usaha PD BPR Bungbulang dicabut sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut adalah salah sasaran;

Berkenaan dengan gugatan salah sasaran ini telah menjadi yurisprudensi sebagaimana ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang salah sasaran atau salah pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian pula halnya dengan apa yang disampaikan oleh M.

Halaman 79 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yahya Harahap, S.H., (2005: 439) dengan merujuk kepada yurisprudensi yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa seseorang/pihak yang ditarik sebagai tergugat haruslah orang yang tepat, karena dengan salah menarik pihak yang digugat maka akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi *error in persona*;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

8. Objek Sengketa tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*)

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III uraikan di atas bahwa setelah dicabutnya izin usaha PD BPR Bungbulang oleh Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 20 November 2007, maka secara hukum atas wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, maka segala hak dan kewenangan serta kewajiban dari PD BPR Bungbulang termasuk diantaranya adalah pemilik saham (Tergugat I) telah dicabut dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan sendirinya objek gugatan tersebut telah hapus, sehingga gugatan dari Para Penggugat khususnya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak berdasar dan mengandung cacat *exceptio peremptoria*. Oleh karenanya sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sangat tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

9. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa dasar gugatan Para Penggugat terdapat kontradiksi yaitu di satu sisi dasar gugatan Para Penggugat yang digunakan adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), di sisi lain padahal dalam uraian fakta-fakta hukum poin lima halaman lima Para Penggugat juga



mendaliikan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan Pelanggaran Hukum sehingga menurut Tergugat tuduhan dan tuntutan atas pelanggaran hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah sesuatu hal yang berbeda padahal perihal gugatan perkara ini hanyalah sebatas tentang Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi), dan tidak termasuk tuntutan pelanggaran hukum yang dapat digambarkan sebagai perbuatan melanggar hukum/perbuatan melawan hukum, hal ini menunjukan Para Penggugat tidak paham akan gugatan Para Penggugat sendiri;

- Bahwa adanya kontradiksi antara *posita* gugatan Para Penggugat pada angka empat halaman lima dengan *posita* gugatan Para Penggugat pada angka enam halaman lima sebagaimana perbaikan gugatan tanggal 17 Juni 2014 yakni mengenai jumlah simpanan Para Penggugat pada angka empat halaman lima sebesar Rp4.078.233.227,00 (empat miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), sedangkan jumlah simpanan Para Penggugat pada angka enam halaman lima sebesar Rp4.323.277.505,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah);

Dari uraian diatas tersebut ditarik kesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak konsisten yaitu adanya kontradiksi dalam gugatan antara dalil pelanggaran hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan adanya kontradiksi antara *posita* gugatan Para Penggugat pada angka empat dengan *posita* gugatan Para Penggugat pada angka enam sebagaimana perbaikan gugatan tanggal 17 Juni 2014 yakni mengenai jumlah simpanan Para Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan kabur (*obscuur libel*). Atas dasar hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. tanggal 29 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menguatkan Penetapan Sertifikasi Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt.;

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum buku-buku tabungan dan seluruh bilyet deposito/simpanan berjangka atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut;
- 3) Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen);
- 4) Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito kepada Para Penggugat adalah Rp3.074.147.220,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- 5) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 6) Menyatakan mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut kemudian kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing ketua kelompok yang terlebih dahulu para ketua kelompok membuka rekening disalah satu bank di Garut dan selanjutnya para ketua kelompok mendistribusikan atau menyerahkan uang tersebut kepada para pemilik tabungan dan bilyet deposito nasabah PD BPR Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut;
- 7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat sebesar Rp399.341.276.9,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan sen) secara tunai, seketika dan sekaligus;
- 8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan kepada Para Penggugat sebesar Rp3.074.147.220,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus;
- 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 82 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian bunga tabungan sebesar Rp1.259.708.82,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen);
 - b. Kerugian bunga deposito/simpanan sebesar Rp1.149.369.769.87,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen)
- 10) Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;
- 11) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 12) Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan III/Para Pembanding/Para Penggugat/Para Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/Pembanding I,II,III pada tanggal 9 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I,II,III/ Pembanding I,II,III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 22 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/PDT/G/2014/PN Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi III/Tergugat I/Pembanding I dan Para Pemohon Kasasi II/ para Termohon Kasasi III/ II, III/ Pembanding II,III tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi I,II/Pemohon kasasi III/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi I,II/Pemohon kasasi III /Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 9 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2015 sebagaimana

Halaman 83 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/PDT/G/2014/PN Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi III/Para Termohon Kasasi I,II/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I /Termohon Kasasi III/Tergugat I/pembanding I dan Para Pemohon Kasasi II/ para Termohon Kasasi III/ II, III/ Pembanding II,III masing masing pada tanggal 5 Agustus 2015

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi I /Termohon Kasasi III/Tergugat I/pembanding I dan Para Pemohon Kasasi II/ para Termohon Kasasi III/ II, III/ Pembanding II,III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa pemohon kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon I Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut:

A. Dalam Provisi

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. tanggal 29 Januari 2015 atas putusan provisi karena *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan apapun dan tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana dikehendaki oleh undang undang, sehingga putusan *a quo* dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara atau *vormverzuim* sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor M.A./Pemb.1154/74 tanggal 25 November 1974 yang menyatakan bahwa "keputusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang

Halaman 84 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



sebagai suatu kelalaian dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya suatu keputusan”;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila “wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”;

Adapun sehubungan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, perlu Pemohon Kasasi semula Pemanding/Terbanding/Tergugat I sampaikan bahwa apabila memperhatikan dalil Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pemanding/Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2014, tak ada satupun dalil Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pemanding/Para Penggugat di dalam gugatannya yang telah mendalilkan/atau mengakui adanya pelaksanaan pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada sebagian nasabah PD BPR Bungbulang Garut oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui PD BPR Garut yang pembayarannya dilaksanakan dalam dua tahap, padahal pada kenyataannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan pembayaran kepada sebagian nasabah PD BPR Bungbulang melalui PD BPR Garut yang pembayarannya dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap I pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011 sebesar Rp1.961.888.570.59,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah lima puluh sembilan sen) dan Tahap II pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp382.033.988.49,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh sembilan sen). Hal tersebut juga terungkap dalam fakta persidangan dimana Pemohon Kasasi semula Pemanding/Terbanding/Tergugat I dapat membuktikannya dihadapan persidangan berdasarkan bukti T-10 dan bukti T-13 serta telah diakui kebenarannya berdasarkan kesaksian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Asep Bahrul Anwar yang pada pokoknya telah menyebutkan bahwa saudara saksi "pernah melakukan pembayaran simpanan nasabah PD BPR Bungbulang berupa tabungan dan deposito melalui PD BPR Garut Tahap ke I dan Tahap ke II" (*vide* hal. 154 salinan putusan Nomor 09/PDT.G/2014/PN Grt.), dimana hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 181 putusan *a quo*. sehingga dengan demikian, atas dasar dalil tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pemanding/Para Penggugat yaitu sdr. Drs. H. Adin Burhanudin, M.Pd.,/Wakil Kelompok I, Hj Enung Maria/Wakil Kelompok II, sangat tidak layak dan pantas sebagai wakil kelompok, karena Para Penggugat selaku wakil kelompok telah terbukti tidak jujur dan tidak memiliki kredibilitas;

Sehingga dengan demikian, sudah sangat jelas terbukti bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) sehingga sudah seharusnya gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tersebut dinyatakan tidak sah dengan dinyatakan di dalam suatu putusan hakim, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (5) yaitu "apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan keberatan Pemohon Kasasi semula Pemanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pemanding/Terbanding/Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat agar dalil-dalil yang telah diuraikan oleh

Halaman 86 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I pada bagian provisi tersebut diatas secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula diuraikan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I yang akan diuraikan pada bagian dalam eksepsi ini:

1. Bahwa *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah keliru dalam menafsirkan asas *nebis in idem* dalam perkara *a quo* sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 1917 KUHPdata yang menyatakan “kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusnya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”;

Sehingga berdasarkan dalil tersebut, maka telah jelas sekali bahwa yang termasuk pada unsur-unsur *nebis in idem* adalah sebagai berikut:

- 1) Objek yang sama;
- 2) Pihak yang sama;
- 3) Alasan/dalil gugatan yang sama;

Namun faktanya gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat dalam perkara Nomor 09/PDT.G/2014/PN Grt. merupakan gugatan yang diajukan belakangan (untuk kedua kalinya) karena pada kenyataannya perkara ini sama dengan perkara terdahulu (yaitu Putusan Nomor 12/PDT/G/2013/PN GRT. tanggal 17 Oktober 2013), baik mengenai objeknya, pihaknya, serta alasan/dalil yang menjadi dasar gugatannya pun sama sehingga sudah sangat terbukti sekali apabila gugatan dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan yang *nebis in idem*;

Perlu Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I ingatkan juga bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Para Penggugat merupakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok bahwa “gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya

Halaman 87 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud". Artinya bahwa gugatan tersebut diajukan atas dasar kepentingan kelompok yang mengatas namakan sebagai nasabah PD BPR Bungbulang baik dalam bentuk tabungan ataupun dalam bentuk deposito;

Selanjutnya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi semula Pemanding/Terbanding/ Tergugat I sampaikan dalam duplik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tertanggal 7 Oktober 2014 bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor 12/PDT/G/2013/PN GRT. khususnya pada agenda pemberitahuan kepada anggota kelompok, tidak ada satupun anggota kelompok yang menyatakan keluar (*option out*), sehingga putusan pengadilan tersebut mengikat dan berkekuatan kepada seluruh anggota kelompok tersebut dan oleh karena Putusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadapnya melekat asas *nebis in idem*. Hal ini sebagaimana disampaikan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 167, agar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui proses GPK mengikat (*binding*) dan berkekuatan kepada anggota kelompok, tergantung pada faktor sah atau tidak pemberitahuan yang dilakukan wakil kelompok (Penggugat) dengan patokan dan acuan:

- 1) Apabila pemberitahuan sah, putusan langsung mengikat dan berkekuatan (*binding and enforceable*) kepada seluruh anggota kelompok, tanpa memerlukan penegasan penerimaan (*without recognition*) atas putusan. Dalam hal yang seperti ini, kepada mereka melekat asas *nebis in idem* apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) Jika pemberitahuan tidak sah, tetapi yang bersangkutan menyatakan menerima putusan, putusan mengikat, dan berkekuatan kepada anggota yang bersangkutan. Oleh karena itu, terhadap dirinya melekat asas *nebis in idem*;
- 3) Pemberitahuan tidak sah, dan anggota bersangkutan tidak menyatakan menerima putusan:
 - Putusan tidak mengikat dan berkekuatan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian kepadanya tidak melekat *nebis in idem*, dan masih dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai objek dan dasar hukum yang sama;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

2. Bahwa *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang pada intinya menyatakan bahwa “terhadap gugatan yang salah sasaran atau salah pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut juga telah dipertegas oleh M. Yahya Harahap, S.H., (2005:439) dengan merujuk kepada yurisprudensi yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa seseorang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat, karena dengan salah menarik pihak yang digugat maka akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi *error in persona*”;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sampaikan, faktanya sejak tanggal 20 November 2007 PD BPR Bungbulang telah dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/Kep.GBI/DpG/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR Bungbulang, sehingga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya dan secara hukum atas wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya maka segala hak dan kewenangan dari

Halaman 89 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan PD BPR Bungbulang termasuk diantaranya adalah pemilik saham (Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I) telah dicabut dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Apalagi posisi Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding /Pembanding/Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding /Pembanding/Tergugat III (baik secara struktural maupun fungsional) tidak mempunyai kewenangan apapun dalam pengelolaan PD BPR Bungbulang baik sebelum atau setelah izin usaha PD BPR Bungbulang dicabut sehingga dengan demikian gugatan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat tersebut adalah salah sasaran;

Selanjutnya, sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa berdasarkan Putusan MA-RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 "yang mengandung kaidah hukum bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", akan tetapi bukan berarti Majelis Hakim dapat secara serta merta memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya, melainkan harus tetap memperhatikan ketentuan lainnya seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang pada intinya menyatakan bahwa "terhadap gugatan yang salah sasaran atau salah pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, dimana telah dipertegas juga oleh M. Yahya Harahap, S.H., (2005:439) dengan merujuk kepada yurisprudensi yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa seseorang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat, karena dengan salah menarik pihak yang digugat maka akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi *error in persona*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg tanggal 30 Juni 2015 *juncto*

Halaman 90 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT.
tanggal 29 Januari 2015;

3. Bahwa *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621K/Sip/1975. Yang menyatakan bahwa "oleh karena ternyata sebagai objek harta terperkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibat dalam perkara itu musti ikut di gugat. Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut di tarik sebagai Tergugat, gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*", juga telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan "bahwa karena yang berutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan diajukan kepada dua orang tersebut", serta telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan MA RI Nomor 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang pada pokoknya dapat ditarik suatu kaidah hukum bahwa dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam suatu perkara, maka gugatan perdata tersebut oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I sampaikan faktanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tersebut tidak lengkap/kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak ditariknya LPS sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*, karena pada kenyataannya meskipun berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor Kep-159/KE/XI/2011 tentang Pembubaran Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL), pelaksanaan likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) telah berakhir sejak tanggal 25 Februari 2011, namun demikian meskipun tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah dinyatakan berakhir, bukan berarti LPS tidak perlu di tarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, karena pada kenyataannya semenjak izin usaha PD BPR Bungbulang dicabut, berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, status PD BPR Bungbulang dinyatakan sebagai bank dalam likuidasi dan sebagai tindak lanjutnya, dibentuk Tim Likuidasi berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 43 dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004, segala hak dan kewenangan pemegang saham (pemilik) diambil alih dan dijalankan oleh LPS, termasuk penguasaan dan pengelolaan aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang,

Halaman 91 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tanggung jawab dan kepengurusan bank dilaksanakan oleh Tim Likuidasi tersebut. Sehingga dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Garut selaku pemilik bank tidak mempunyai hak dan kewenangan apapun terhadap PD BPR Bungbulang, karena faktanya sampai proses likuidasi dinyatakan telah selesai oleh LPS, Pemerintah Kabupaten Garut tidak pernah menerima penyerahan aset dan kewajiban eks. PD BPR Bungbulang tersebut, maka atas dasar tersebut meskipun pelaksanaan likuidasi telah dinyatakan berakhir namun bukan berarti tidak perlu menarik LPS sebagai pihak kedalam perkara a quo, karena faktanya penguasaan aset dan kewajiban eks. PD BPR Bungbulang ada pada Lembaga Penjamin Simpanan dan sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah melanggar ketentuan Pasal 1340 KUHPdata karena sebagaimana diketahui sebagai suatu fakta bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat adalah perihal gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), artinya bahwa gugatan ini dilandaskan pada suatu perjanjian. Pada kenyataannya Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I Tidak pernah sekalipun membuat perjanjian dengan para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat. Padahal sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHPdata disebutkan sebagai berikut:
"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga";
Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I telah dianggap melakukan suatu perbuatan wanprestasi terhadap Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat padahal nyata-nyata tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pun bukti dan fakta yang menunjukkan bahwa antara Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat dan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I telah mengikatkan diri dalam satu perjanjian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

5. Bahwa Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya". Bahwa sebagaimana diketahui sebagai suatu fakta, Para Termohon Kasasi semula Terbanding /Pembanding/Para Penggugat telah salah menarik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I selaku pihak dalam perkara *a quo*, karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sama sekali tidak pernah membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat, karena pada faktanya, Para Termohon Kasasi Semula Para Terbanding/Pembanding/Para Penggugat telah menyimpan dana dalam bentuk tabungan dan deposito di PD BPR Bungbulang berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Pimpinan/Pengelola PD BPR Bungbulang dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat (sebagai nasabah baik yang tergabung dalam Kelompok I maupun Kelompok II). Sehingga segala akibat hukum yang terjadi hanya mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dalam hal ini adalah Pimpinan/Pengelola PD BPR Bungbulang dan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat (sebagai nasabah yang terdiri dari Kelompok I dan kelompok II);
- Bahwa apabila Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat tetap bersikukuh hendak mengajukan suatu

Halaman 93 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan wanprestasi dengan mendasarkan kepada Pasal 1243 KUHPdata bahwa bukankah Pasal 1243 tersebut timbul dari persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata yang berarti bahwa:

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPdata, namun faktanya Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tidak pernah sekalipun membuat perjanjian apapun dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*, sehingga apabila Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding/Para Penggugat merasa apa yang disepakati tidak dipenuhi maka bukankah seharusnya Para Termohon semula Para Terbanding /Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Para Termohon semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, bukannya malah menarik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I yang tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dan tidak memiliki keterkaitan hukum sama sekali dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding /Para Penggugat di dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tidak ada satu pun perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I di dalam perkara *a quo*, hal tersebut sangat mustahil karena bagaimana mungkin terjadi wanprestasi sementara tidak ada satu perjanjian pun yang pernah dilakukan antara Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat I dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga merupakan sebuah kekeliruan besar apabila Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat menarik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/ Tergugat I di dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut

Halaman 94 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

6. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang antara lain menjelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, sehingga gugatan harus dikategorikan sebagai *obscur libels*. Di samping itu putusan *Judex Facti* tersebut juga terbukti melanggar putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 bahwa dua buah gugatan yang berkaitan satu sama lain, namun masing-masing gugatan ini ternyata diatur oleh dua sistem hukum acara yang berbeda, meskipun kedua gugatan tersebut berkaitan satu sama lain maka hakim tidak dapat menggabungkan kedua gugatan tersebut; Bahwa sebagaimana diketahui sebagai suatu fakta, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Termohon semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat terdapat kontradiksi yaitu di satu sisi dasar gugatan yang digunakan adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), di sisi lain padahal dalam uraian fakta-fakta hukum poin lima halaman lima dalam gugatannya, Para Termohon semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat juga mendalilkan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I melakukan pelanggaran hukum sehingga menurut Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tuduhan dan tuntutan atas pelanggaran hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah sesuatu hal yang berbeda padahal perihal gugatan perkara ini hanyalah sebatas tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan tidak termasuk tuntutan pelanggaran hukum yang dapat digambarkan sebagai perbuatan melanggar hukum; Bahwa terhadap fakta tersebut, tidak dapat disangkal lagi bahwa Para Termohon semula Para Terbanding/Pembanding/Para Penggugat telah mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum di dalam *posita* surat gugatannya. Padahal gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat tersebut adalah gugatan ingkar janji (wanprestasi), bukankah kedua jenis tuntutan tersebut satu dan lainnya sangat berbeda akan sifat dan hakikatnya;

Halaman 95 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. Tanggal 29 Januari 2015;

7. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena bertentangan dengan asas hukum *unus testis nullus testis* dengan alasan bahwa sebagaimana yang telah ditemukan di persidangan dalam perkara *a quo*, bahwa saksi yang bernama Sdr. H. Heri Hermawan, S.H., telah terbukti sebagai salah satu Penggugat (anggota kelompok II/Nasabah PD BPR Bungbulang dalam bentuk deposito/simpanan berjangka) dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada halaman 8 Nomor urut 39 dengan Nomor rekening 125/IV/2006 yang jumlahnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut juga telah dibantah oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I baik dalam agenda persidangan tanggal 9 Desember 2014 maupun dalam kesimpulan yang telah disampaikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2013, sehingga harus dinyatakan sebagai orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dalam persidangan ini, sehingga dengan demikian Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi saja yaitu atas nama Sdr. Ridwan Samsul Rijal. Adapun sehubungan dengan keterangan satu orang saksi menurut hukum dapat dianggap tidak dapat membuktikan suatu peristiwa (*vide* Pasal 169 HIR atau Pasal 306 Rbg) hal tersebut juga selaras dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga berdasarkan dalil/argumentasi tersebut diatas dapat disimpulkan secara pasti bahwa menurut hukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dalam persidangan perkara *a quo* dapat dianggap tidak mengajukan saksi karena tidak adanya kesaksian dari Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat. Atas dasar tersebut maka seluruh dalil Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para

Halaman 96 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Para Penggugat dalam surat gugatannya haruslah dianggap tidak dapat dibuktikan kebenarannya, namun faktanya hal tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. Tanggal 29 Januari 2015;

A. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Para Pemohon Kasasi dengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat agar dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi di bagian dalam provisi dan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap telah pula diuraikan secara *mutatis mutandis* di dalam bagian dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Para Pemohon Kasasi yang akan diuraikan di bagian dalam pokok perkara ini;

Adapun alasan dari keberatan serta penolakan Para Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015 dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 RV yang menyatakan “bahwa batasan yang dapat dilakukan Penggugat dalam mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan.”dimana hal tersebut juga telah diperkuat dengan adanya pendapat ahli hukum Subekti yang menyatakan yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan dan pendapat ahli hukum Soepomo yang menyatakan bahwa “perkataan “pokok gugatan” berasal dari *onderwerp van den eis*, beliau mengakuiperkataan ini, tidak terang artinya, kita sependapat dengan penegasan, sehingga perkataan itu dalam pengkajian yurisprudensi tergolong penggarisan kabur (*vague*



outline) atau mengandung pengertian luas (*broad term*) namun demikian, beliau mengemukakan dalam praktik *onderwerp* memuat juga arti *middelen* berupa hal-hal yang menjadi dasar tuntutan”. Serta menurut pendapat ahli hukum Soedikno yang menyatakan “menurut praktik selain juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan”;

Karena faktanya putusan *Judex Facti* yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. tanggal 29 Januari 2015 yang telah dimohonkan banding sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut terbukti dengan adanya Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. tertanggal 29 Januari 2015 yang telah mengabulkan perbaikan/perubahan gugatan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat. Selanjutnya perlu Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I sampaikan pula bahwa faktanya, dalam gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat disebutkan bahwa jumlah nasabah PD BPR. Bungbulang dalam bentuk tabungan berjumlah 40 (empat puluh) nasabah dengan total jumlah tabungan sebesar Rp478.923.227,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan jumlah nasabah dalam bentuk deposito/simpanan berjangka berjumlah 507 (lima ratus tujuh) nasabah dengan total jumlah deposito sebesar Rp4.585.360.640,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Adapun dalam perbaikan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat tertanggal 17 Juni 2014, jumlah nasabah serta jumlah simpanan nasabah PD BPR Bungbulang/Para Terbanding/semula Para Penggugat mengalami penambahan yaitu jumlah nasabah dalam bentuk tabungan ditambah 12 (dua belas) nasabah dengan penambahan total jumlah tabungan sebesar Rp1.259.708.82,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen) dan jumlah nasabah dalam bentuk deposito/simpanan berjangka ditambah 49 (empat puluh sembilan) nasabah dengan penambahan total jumlah deposito sebesar Rp1.149.369.769,87 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma delapan puluh tujuh sen), sehingga total Jumlah nasabah PD BPR Bungbulang yang mengajukan gugatan perwakilan kelompok



(*class action*) dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. dalam bentuk tabungan bertambah menjadi 52 (lima puluh dua) nasabah dan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka bertambah menjadi 556 (lima ratus lima puluh enam) nasabah dengan total jumlah tabungan sebesar Rp480.182.935,82 (empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan puluh dua sen) dan total jumlah deposito/simpanan berjangka bertambah menjadi sebesar Rp5.734.730.409,87 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan koma delapan puluh tujuh sen); Bahwa atas dasar tersebut, perubahan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat jelas sangat merugikan Pembanding/semula Tergugat I, disamping perubahan gugatan tersebut merupakan perubahan yang menyangkut pada pokok gugatan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penambahan jumlah nasabah dalam bentuk tabungan yang dalam gugatan awal hanya berjumlah 40 (empat puluh) nasabah diperbaiki dengan menambah jumlah nasabah sebanyak 12 (dua belas) nasabah sehingga jumlah keseluruhannya adalah menjadi 52 (lima puluh dua) nasabah, sementara jumlah nasabah dalam bentuk deposito/simpanan berjangka dalam gugatan awal berjumlah 507 (lima ratus tujuh) nasabah diperbaiki dengan menambah 49 (empat puluh sembilan) nasabah sehingga jumlah keseluruhannya adalah menjadi 556 (lima ratus lima puluh enam) nasabah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, karena putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan/tidak menghiraukan mengenai perubahan gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah bertentangan dengan Pasal 169 HIR atau Pasal 306 Rbg yang menyatakan bahwa "keterangan satu orang saksi menurut hukum dapat dianggap tidak dapat membuktikan suatu peristiwa" hal tersebut juga selaras dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), karena faktanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015, pertimbangan hukumnya sangat keliru dan menyesatkan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan diadikannya saksi atas nama Heri Hermawan, S.H., oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat yang terbukti sebagai salah satu Penggugat (anggota kelompok II/Nasabah PD BPR Bungbulang dalam bentuk deposito/simpanan berjangka) dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada halaman 8 Nomor Urut 39 dengan Nomor Rekening 125/IV/2006 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut juga telah di bantah oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I pada tanggal 9 Desember 2014 maupun dalam kesimpulan yang telah disampaikan pada tanggal 23 Desember 2014, sehingga atas dasar tersebut Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi saja yaitu atas nama Sdr. Ridwan Samsul Rijal;

Sehingga atas dasar tersebut, dikarenakan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015. Telah memberikan pertimbangan yang keliru dan menyesatkan, akibatnya putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi (*vide* Putusan MARI Nomor 443 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988 dan Putusan MARI Nomor 2461 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Desember 1985);

3. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, yang selengkapnyanya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-599 dan P-602 sampai dengan bukti P-616 berupa fotocopy buku tabungan simpanan dan buku bilyet deposito telah membuktikan bahwa ada sebuah perjanjian dimana pihak nasabah (Para Penggugat) menyetorkan sejumlah uang kepada pihak BPR dengan sebuah imbal prestasi berupa bunga baik dalam bentuk bunga simpanan maupun bunga deposito terhadap bunga atas simpanan tabungan dan deposito tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak baik oleh nasabah sebagai pihak yang menyimpan uangnya

Halaman 100 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun BPR sebagai pihak yang menerima uang dan memberikan imbal prestasi berupa bunga atas simpanan para nasabahnya”;

“Bahwa perjanjian antara penggugat sebagai nasabah dengan Tergugat sebagai BPR melahirkan perikatan sebagai berikut :

- a) Pihak Penggugat sebagai nasabah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak BPR, baik untuk simpanan tabungan maupun deposito dan berhak untuk menerima bunga dari simpanan tabungan dan depositonya;
- b) Pihak BPR berhak menerima penyerahan sejumlah uang pokok (tabungan/deposito) dan berkewajiban untuk membayar bunga sesuai dengan yang telah diperjanjikan”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang selanjutnya diambil alih dan dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti*, merupakan bukti bahwa pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah antara Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat dengan Tergugat IV (Pimpinan Perusahaan Daerah BPR Bungbulang) sehingga perjanjian tersebut hanya mengikat antara dua pihak yang telah bersepakat untuk saling mengikatkan dirinya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1315 KUHPdata yang menyatakan bahwa “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Selanjutnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah hanya berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata. Dikarenakan pihak yang membuat perjanjian tersebut hanya dua pihak yaitu antara Para Terbanding/semula Para Penggugat dengan pihak Tergugat IV (Pimpinan PD BPR Bungbulang) bukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I, maka segala konsekuensi atas perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang telah ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dan suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga.”Sehingga dengan demikian dari argumentasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktanya Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tidak pernah mengikatkan diri untuk membuat suatu hubungan hukum perjanjian dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat,



sehingga atas dasar tersebut dan sesuai Pasal 1340 KUHPerdara sangat menyesatkan sekali apabila Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding /Tergugat I harus menanggung akibat dari perjanjian tersebut;

Selanjutnya, perlu Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I sampaikan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 yang telah menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam putusan Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015 pada halaman 176, yang menyatakan:

"Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi :

- a. Adanya kesepakatan para pihak;
- b. Orang yang membuat perjanjian adalah orang yang dianggap cakap bertindak menurut hukum;
- c. Adanya sesuatu hal sebagai objek perjanjian;
- d. Perjanjian tersebut tidak melanggar kepatutan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan";

Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-599 dan P-602 sampai dengan bukti P-616, rata-rata suku bunga per bulan yang tercantum dalam bilyet deposito adalah 2 % (dua) persen perbulan atau pertahunnya mencapai 24 % (dua puluh empat) persen, hal ini sangat keterlaluan karena bagaimana mungkin suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila suku bunga depositonya sedemikian besar hingga mencapai 24% (dua puluh empat) persen per tahun? sementara itu tingkat suku bunga BPR yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu, per tahunnya hanya dikisaran 8 % (delapan) persen, artinya bahwa suku bunga yang diklaim Terbandoing semula Para Penggugat jauh di atas tingkat kewajaran atau mencapai 3 x lebih besar dari suku bunga wajar yang sudah ditetapkan. Penetapan bunga tersebut bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan yang menyatakan penentuan suku bunga bank tidak boleh melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang telah ditentukan oleh LPS. Sehingga atas dasar hal tersebut, maka perjanjian sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Pasal 42 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

4. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dalam setiap perjanjian utang piutang melahirkan hutang (*schuld*) dan kewajiban pembayaran (*haftung*) dimana antara *schuld* dan *haftung* tidak selalu melekat pada seorang debitur saja namun ada kalanya seseorang yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian utang piutang ia berkewajiban untuk melakukan pembayaran manakala si debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya misalnya dalam hal penanggungan, garasi, penjaminan utang, asuransi availis yang kesemuanya merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban prestasi debitur pada saat debitur cidera janji”;

“Bahwa selain itu Pasal 1367 Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam pertimbangan hukumnya telah menganalogikan perkara *a quo* dengan penanggungan, garasi, penjaminan utang, asuransi, availis. sebagaimana tersebut di atas dan menganalogikan kedudukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sebagai penanggung, penjamin, dan availis. Namun demikian, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Pengadilan Negeri Garut dalam pertimbangan hukumnya

Halaman 103 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menganalogikan perkara *a quo* dengan penanggungan, garasi, penjaminan utang, asuransi, avails maka seharusnya yang mempunyai kedudukan sebagai penanggung, penjaminan, dan avalis adalah LPS bukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I, karena sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I jelaskan baik dalam Jawaban tertanggal 16 September 2014, maupun dalam duplik tertanggal 7 Oktober 2014, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan program penjaminan terhadap nasabah Bank telah dibentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009; Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 4 huruf a dikatakan pula bahwa "fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan" dan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 bahwa "setiap Bank yang melakukan kegiatan di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan" tidak terkecuali PD BPR Bungbulang yang merupakan Bank yang menjadi peserta penjaminan LPS;

Selanjutnya, sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR Bungbulang bahwa sejak tanggal tersebut secara institusional/sebagai badan hukum secara resmi telah dan atau dalam proses dilikuidasi. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya dan secara hukum atas wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya maka segala hak dan kewenangan dari pengelolaan PD BPR Bungbulang termasuk diantaranya

Halaman 104 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



adalah pemilik saham (Tergugat I) telah dicabut dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai kedudukan sebagai penanggung atau penjamin tersebut adalah LPS bukanlah Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I, pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Garut tersebut adalah pertimbangan yang cacat hukum dan sepenuhnya harus ditolak dan dikesampingkan;

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* mendasarkan pada ketentuan Pasal 1367 KUHPdata, seharusnya pasal tersebut lebih tepat diterapkan pada gugatan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 128 "Pasal 1367 KUHPdata menggariskan prinsip pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan. Menurut prinsip ini, majikan atau atasan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan pegawai atau bawahan. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *vicarious liability*";

Namun demikian sebagaimana diketahui bahwa teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) hanya berlaku pada gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, faktanya bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah gugatan wanprestasi atau cidera janji atau ingkar janji hal tersebut semakin ditegaskan di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut halaman 172, 180-182 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan wanprestasi atau ingkar janji bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang cacat hukum dan sepenuhnya harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

5. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti*, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dalam perkara *a quo* meskipun Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Garut) tidak turut menjadi pihak dalam perjanjian penyimpanan uang dengan pemberian bunga namun bukan berarti bahwa tanggung jawab pengembalian uang dan pembayaran bunga hanya menjadi tanggung jawab BPR sebagai pihak yang membuat perjanjian tersebut karena berdasarkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan “apabila seluruh aset Bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban Bank terhadap pihak lain maka kewajiban tersebut wajib di bayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan Bank menjadi Bank gagal”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena perlu kami sampaikan kembali secara tegas sekaligus menjadi bukti bahwa secara nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut telah mengakui bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tidak turut menjadi pihak dalam perjanjian tersebut;

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”;

Selanjutnya “suatu perjanjian yang dibuat secara sah hanya berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Dikarenakan pihak yang membuat perjanjian tersebut hanya dua pihak yaitu antara para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dengan pihak Tergugat IV (Pimpinan PD BPR Bungbulang) bukan Pembanding semula Tergugat I, maka segala konsekuensi atas perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang telah ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Halaman 106 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dan suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga”;

Sehingga tidak terdapat satu alasan yang dapat dibenarkan secara hukum terhadap apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I harus bertanggung jawab atas pengembalian uang dan pembayaran bunga. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang cacat hukum dan sepenuhnya harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

6. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 178-180, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pengalihan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada pihak pemegang saham berdasarkan Pasal 54 ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah jika terbukti pihak pemegang saham menyebabkan bank menjadi bank gagal, sehingga majelis berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah benar ada keterlibatan pemegang saham atau pemilik modal yang menyebabkan PD BPR Bungbulang menjadi bank gagal;

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai pemilik modal tunggal dari BPR Bungbulang memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang diangkat dan diberikan tanggung jawab sebagai direksi yang akan memimpin kegiatan usaha perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga wewenang untuk menentukan direksi tersebut secara bersamaan juga melekat tanggung jawab untuk benar-benar memilih dan mengangkat orang-orang yang kredibel dan professional untuk melaksanakan tugas tersebut sehingga jika ternyata direksi dan jajarannya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan malah justru merugikan pihak nasabah maka Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah selaku pihak yang memilih dan mengangkat direksi tersebut harus turut pula bertanggung jawab;

“Bahwa secara yuridis direksi bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang dalam hal ini BPR Bungbulang sedangkan perusahaan adalah manifestasi dari si pemilik modal sehingga garis tanggung jawab antara direksi dan pemilik modal tidak bisa terputus begitu saja, namun tetap melekat secara otomatis”;

Bahwa pemilik modal dst;

Bahwa Peraturan Daerah dst;

Bahwa tata cara dan tata tertib dst;

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 diatas maka nyata Pemerintah Daerah selaku pemilik modal telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para jajaran direksinya maka dengan demikian telah terbukti bahwa secara tidak langsung pihak Pemerintah Daerah juga sebagai penyebab BPR Bungbulang menjadi bank yang gagal”;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Garut yang putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah bertindak melebihi kewenangannya, karena Majelis Hakim dengan sangat mudah dan tanpa didukung alat bukti menyatakan bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I merupakan pihak yang menyebabkan BPR Bungbulang menjadi bank gagal. Sehubungan dengan hal tersebut juga perlu kami tegaskan kembali bahwa tugas dan peran Hakim dalam perkara perdata harus bersifat pasif, dimana Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut juga telah sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan pada halaman 499, yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas;

- Mencari dan menemukan kebenaran formil;
- Kebenaran tersebut hanya diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Halaman 108 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, perlu kami tegaskan kembali bahwa tak ada satupun data/dokumen yang diterbitkan oleh LPS yang menyatakan atau membuktikan bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I telah terbukti menyebabkan BPR Bungbulang menjadi bank gagal, karena faktanya terjadinya pencabutan izin usaha dan likuidasi PD BPR Bungbulang bukan disebabkan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I, melainkan disebabkan oleh pengelolaan perusahaan yang tidak benar yang dilakukan oleh pengurus, apalagi kalau memperhatikan rata-rata suku bunga per bulan yang tercantum dalam bilyet deposito (bukti P 48-P 616) adalah rata-rata 2 % (dua) persen perbulan atau pertahunnya mencapai 24 % (dua puluh empat) persen, hal ini sangat keterlaluan karena bagaimana mungkin suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila suku bunga depositonya sedemikian besar hingga mencapai 24% dua puluh empat) persen per tahun? sementara itu tingkat suku bunga BPR yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu, per tahunnya hanya dikisaran 8 % (delapan) persen artinya bahwa suku bunga yang diklaim Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat jauh di atas tingkat kewajaran atau mencapai 3x lebih besar dari suku bunga wajar yang sudah ditetapkan. Hal tersebut jelas sekali tampak adanya ketidakberesan dan ketidak-wajaran terhadap apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat tersebut, terlepas bahwa apa yang didalilkan tersebut, faktanya telah diperjanjikan antara Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding /Para Penggugat dengan Pengurus (Direksi dan Karyawan) PD BPR Bungbulang, terlebih lagi berdasarkan dalil Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatannya bahwa sebagian besar Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat menyimpan dananya diPD BPR Bungbulang dilakukan pada Tahun 2006 dan Tahun 2007, padahal pada saat itu PD BPR Bungbulang berada dalam status "Dalam Pengawasan Khusus (DPK)", dimana bank dilarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat;

Ini berarti bahwa ketidakberesan dalam pengelolaan PD BPR Bungbulang dilakukan oleh pengurus bukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I. Hal ini terbukti dengan telah dihukumnya Sdr. Dedi Rustandi serta Yuyan Turyana selaku Direksi PD

Halaman 109 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Bungbulang karena telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang merugikan PD BPR Bungbulang. Sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), mereka yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi PD BPR Bungbulang yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut, bukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I maka dengan dinyatakan Sdr. Dedi Rustandi serta Yuyan Turyana selaku Direksi PD BPR Bungbulang bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sangat jelas sekali bahwa yang menyebabkan bank gagal itu bukan disebabkan oleh pemilik saham melainkan disebabkan oleh pengelola yang tidak benar dalam menjalankan usaha PD BPR Bungbulang;

Atas dasar tersebut diatas, maka sudah sangat jelas sekali bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Garut yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, sudah melampaui batas kewenangannya sehingga menentukan Pemerintah Daerah sebagai penyebab BPR Bungbulang menjadi bank yang gagal, karena dalam memberikan pertimbangan dalam perkara *a quo* tidak didukung dengan fakta dan bukti dipersidangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

7. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 180, yang selengkapny menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum perjanjian penyimpanan uang dengan imbal prestasi berupa bunga dan

Halaman 110 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut telah dibuat atas dasar kesepakatan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya mengikat kedua belah pihak sebagai undang undang”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena Majelis Hakim menyamakan kedudukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I dengan Tergugat IV. Perlu diketahui bahwa pada kenyataannya Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat I tidak pernah sekalipun membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat;

Sehubungan dengan ketentuan pasal tersebut, bagaimana mungkin antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dapat dikatakan mempunyai hubungan hukum perjanjian padahal nyata-nyata tidak ada satu pun bukti dan fakta yang menunjukkan bahwa antara Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I telah mengikatkan diri dalam satu perjanjian. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang terdapat pada buku tabungan, deposito/simpanan berjangka tersebut dimana yang melakukan hubungan perjanjian dalam perkara *a quo* adalah Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dan Tergugat IV/PD BPR Bungbulang (DL) yang telah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), artinya bahwa hubungan perjanjian tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut akan tetapi tidak berlaku bagi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I karena sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHperdata bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I termasuk pihak yang tidak dapat dikaitkan dalam perjanjian tersebut. Sehingga dengan demikian sudah sangatlah jelas bahwa antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I dengan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Tergugat tidak pernah terjadi suatu hubungan hukum perjanjian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung

Halaman 111 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

8. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 181, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena aset-aset yang dikumpulkan dalam proses likuidasi tidak mencukupi untuk melakukan kewajiban pembayaran kepda para nasabahnya baik dalam bentuk pokok tabungan/deposito maupun bunga yang diperjanjikan, maka kewajiban pembayaran menjadi tanggung jawab pihak pemilik modal yaitu Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan hasil perincian sisa kewajiban yang belum terbayarkan dalam proses likuidasi; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dalil yang diajukan Para Penggugat mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat telah terbukti, sehingga dirasa cukup adil bila Para Tergugat harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Para Penggugat”;

Sehubungan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada, tidak berdasar, maka harus ditolak dengan alasan bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I dinyatakan harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan wanprestasi sementara faktanya tidak satupun dapat membuktikan bahwa antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan hukum perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I diatas yang menyatakan bahwa apabila para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tetap bersikukuh hendak mengajukan suatu gugatan wanprestasi dengan mendasarkan kepada Pasal 1243 KUHPerdato bahwa bukankah Pasal 1243 tersebut timbul dari persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato yang berarti bahwa:

Halaman 112 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata, namun faktanya Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I tidak pernah sekalipun membuat perjanjian apapun dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*, sehingga apabila Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding /Para Penggugat merasa apa yang disepakati tidak dipenuhi maka bukankah seharusnya Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat bukannya malah menarik Pemohon Kasasi/Pembanding /Terbanding/Tergugat I yang tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dan tidak memiliki keterkaitan hukum sama sekali dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat di dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tidak ada satu pun perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I di dalam perkara *a quo*, hal tersebut sangat mustahil karena bagaimana mungkin terjadi *wanprestasi* sementara tidak ada satu perjanjian pun yang pernah dilakukan antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga merupakan sebuah kekeliruan besar apabila Para Termohon Kasasi/Para Terbanding semula Para Penggugat menarik Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding /Tergugat I di dalam perkara *a quo*, namun faktanya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tetap mengabulkan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi*, sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 113 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

9. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat I sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 182-223, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, dan jawaban dari Tergugat I, II dan III adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan/*petitum* dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka dua, yang memohon agar Majelis menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas bilyet deposito/simpanan berjangka dan buku-buku tabungan atas nama masing-masing Para Penggugat dan *petitum* angka lima perihal bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tersebut haruslah dikabulkan; Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka tiga, yang memohon agar Majelis menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk membayar seluruh simpanan dalam bentuk tabungan sebesar Rp478.923.277,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan *petitum* angka empat, yang memohon agar Majelis menetapkan Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok membayar seluruh simpanan dalam bentuk deposito kepada Para Penggugat sebesar Rp3.599.300.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara memikul beban pembuktian untuk diajukan di depan persidangan mengenai kebenaran yang seutuhnya. Akan tetapi, setelah Hakim dalam persidangan menampung dan menerima segala sesuatu kebenaran tersebut, dia harus menetapkan kebenaran itu. Sejauh mana dan dalam bentuk serta wujud kebenaran yang bagaimana yang harus dikemukakan dan ditegakakan; Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan dengan mencocokkan terhadap bukti-bukti kepemilikan rekening tabungan Para Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 114 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa bukti-bukti surat berupa buku tabungan ditandai dengan P-01 sampai dengan P-47 dan, P-613 sampai dengan P-616 yang telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya;
- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti surat kepemilikan tabungan yang diajukan ke persidangan, yang telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) rekening;
- c. Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan secara rinci dari simpanan tabungan para nasabah (Para Penggugat) dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima berdasarkan bukti T-14, T-15 tentang form pembayaran dari hasil proses likuidasi maka didapatkan nilai simpanan tabungan yang masih tersisa dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka sisa dari simpanan pokok tabungan yang belum terbayar kepada Para Penggugat sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan dengan mencocokkan terhadap bukti-bukti kepemilikan deposito Para Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti surat berupa bilyet deposito ditandai dengan P-48 sampai dengan P-612 adalah sama dan sesuai dengan aslinya;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti surat kepemilikan deposito yang diajukan ke persidangan, yang telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya adalah sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima) rekening;
- Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan secara rinci dari simpanan deposito para nasabah (Para Penggugat) dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima berdasarkan bukti T-14, T-15 dan T-15 tentang form pembayaran dari hasil proses likuidasi maka didapatkan nilai simpanan tabungan yang masih tersisa dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka sisa simpanan pokok deposito yang belum terbayar kepada Para Penggugat sebesar Rp3.074.147.220 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa menyangkut petitum angka enam, oleh karena permohonan tentang mekanisme pembayaran tersebut tidak bertentangan



dengan hukum dan dipandang akan lebih memudahkan dalam penyaluran pembayaran tersebut, maka *petitum* pada angka enam tersebut patut untuk dikabulkan dengan ketentuan pada saat pembayaran dilakukan semua bukti buku tabungan dan bilyet deposito yang asli diberikan kepada pihak Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti di persidangan sisa simpanan pokok tabungan Para Penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen), maka patut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kekurangan simpanan pokok tabungan kepada Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh ketua kelompok sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen), baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus; sehingga dengan demikian *petitum* angka tujuh harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* angka delapan, oleh karena yang terbukti di persidangan sisa simpanan pokok deposito Para Penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp3.074.147.220 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), maka patut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban pembayaran simpanan pokok deposito kepada Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh ketua kelompok sebesar Rp3.074.147.220 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa *petitum* angka sembilan, agar menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil atas bunga diperjanjikan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya terkait dengan simpanan pokok yang berupa tabungan maupun deposito, maka cukup adil apabila menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas bunga kepada Para Penggugat sesuai yang dimohonkan Para Penggugat yaitu 6 % (enam) persen pertahun dipandang cukup adil sehingga berdasarkan perhitungan dari seluruh total simpanan tabungan, maka kewajiban bunga simpanan tabungan yang harus dibayar oleh Para Tergugat



adalah sebesar Rp1.259.708,82 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah koma delapan puluh dua sen);

- b. Bahwa kerugian atas bunga deposito yaitu jumlah pokok deposito dikalikan suku bunga yang diperjanjikan oleh para pihak sebagaimana tertera dalam bilyet giro dikalikan dengan lamanya tahun menyimpan deposito masing-masing sampai dengan PD BPR Bungbulang dinyatakan likuidasi (Tahun 2007), sehingga dengan penghitungan demikian maka bunga deposito Para Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp1.149.369,87 (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh sen);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka *petitum* pada angka sembilan harus dikabulkan”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada, tidak berdasar, maka harus ditolak, karena sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat I sampaikan di dalam keberatan-keberatan sebelumnya berkenaan dengan apa yang menjadi pokok persoalan sebagaimana diajukan sebagai gugatan adalah perihal gugatan wanprestasi. Sementara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I bukanlah pihak di dalam perjanjian yang dilakukan oleh pimpinan PD BPR Bungbulang dengan para nasabah PD BPR Bungbulang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara *juncto* Pasal 1315 KUHPerdara maka tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menyertakan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat I didalam *petitum-petitum* yaitu *petitum* angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 angka 7, angka 8 dan angka 9 sebagaimana dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut di dalam pertimbangannya 182–223 yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung;

Selanjutnya, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I akan menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai suku bunga dikabulkan oleh Majelis Hakim, pertimbangan hukum tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya harus ditolak, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Penjaminan Simpanan yang menyatakan penentuan suku bunga bank tidak boleh melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang telah ditentukan oleh LPS. Sementara, apabila memperhatikan rata-rata suku bunga per bulan yang tercantum dalam bilyet deposito (bukti P 48-P 616) adalah rata-rata s.d 2 % (dua) persen perbulan atau pertahunnya mencapai 24 % (dua puluh empat) persen, hal ini sangat keterlaluan karena bagaimana mungkin suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila suku bunga depositonya sedemikian besar hingga mencapai 24 % (dua puluh empat) persen per tahun? sementara itu tingkat suku bunga BPR yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu, per tahunnya hanya dikisaran 8 % (delapan) persen artinya bahwa suku bunga yang diklaim Para Termohon Kasasi semula Terbanding /Pembanding/Para Penggugat jauh di atas tingkat kewajaran atau mencapai 3x lebih besar dari suku bunga wajar yang sudah ditetapkan. Hal tersebut jelas sekali tampak adanya ketidak-beresan dan ketidak-wajaran terhadap apa yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding semula Para Penggugat tersebut, terlepas bahwa apa yang didalilkan tersebut, faktanya telah diperjanjikan antara Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat dengan Pengurus (Direksi dan Karyawan) PD BPR Bungbulang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II III/Pembanding II,III dalam memori kasasinya tersebut:

A. Dalam Provisi

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN GRT. tanggal

Halaman 118 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Januari 2015 atas putusan provisi karena *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan apapun dan tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, sehingga putusan *a quo* dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara atau *vormverzuim* sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor M.A./Pemb.1154/74 tanggal 25 November 1974 yang menyatakan bahwa “keputusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya suatu keputusan”;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila “wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”;

Adapun sehubungan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, perlu Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sampaikan bahwa apabila memperhatikan dalil Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2014, tak ada satupun dalil Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat di dalam gugatannya yang telah mendalilkan/atau mengakui adanya pelaksanaan pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada sebagian nasabah PD BPR Bungbulang Garut oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui PD BPR Garut yang pembayarannya dilaksanakan dalam dua tahap, padahal pada kenyataannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan pembayaran kepada sebagian nasabah PD BPR Bungbulang melalui PD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Garut yang pembayarannya dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap I pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011 sebesar Rp1.961.888.570,59 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah koma lima puluh sembilan sen) dan tahap II pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp382.033.988,49 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh sembilan sen). Hal tersebut juga terungkap dalam fakta persidangan dimana Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dapat membuktikannya dihadapan persidangan berdasarkan bukti T-10 dan bukti T-13 serta telah diakui kebenarannya berdasarkan kesaksian saudara Asep Bahrul Anwar yang pada pokoknya telah menyebutkan bahwa saudara saksi "pernah melakukan pembayaran simpanan nasabah PD BPR Bungbulang berupa tabungan dan deposito melalui PD BPR Garut tahap ke I dan tahap ke II"(vide hal. 154 salinan Putusan Nomor 09/PDT.G/2014/PN Grt.),dimana hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 181 putusan *a quo*. Sehingga dengan demikian, atas dasar dalil tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat yaitu sdr. Drs. H. Adin Burhanudin, M.Pd./wakil kelompok I, Hj. Enung Maria/wakil kelompok II, sangat tidak layak dan pantas sebagai wakil kelompok, karena Para Penggugat selaku wakil kelompok telah terbukti tidak jujur dan tidak memiliki kredibilitas;

Sehingga dengan demikian, sudah sangat jelas terbukti bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) sehingga sudah seharusnya gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tersebut dinyatakan tidak sah dengan dinyatakan di dalam suatu putusan hakim, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (5) yaitu "apabila Hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak

Halaman 120 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan keberatan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

B. Dalam Eksepsi

Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat agar dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III pada bagian provisi tersebut diatas secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula diuraikan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III yang akan diuraikan pada bagian dalam eksepsi ini:

1. Bahwa *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah keliru dalam menafsirkan asas *nebis in idem* dalam perkara *a quo* sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 1917 KUHPdata yang menyatakan “kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”;

Sehingga berdasarkan dalil tersebut, maka telah jelas sekali bahwa yang termasuk pada unsur-unsur *nebis in idem* adalah sebagai berikut:

- 1) Objek yang sama;
- 2) Pihak yang sama;
- 3) Alasan/dalil gugatan yang sama;

Namun faktanya gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat dalam perkara Nomor

Halaman 121 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/PDT.G/2014/PN Grt. merupakan gugatan yang diajukan belakangan (untuk kedua kalinya) karena pada kenyataannya perkara ini sama dengan perkara terdahulu (yaitu Putusan Nomor 12/PDT/G/2013/PN GRT. tanggal 17 Oktober 2013), baik mengenai objeknya, pihaknya, serta alasan/dalil yang menjadi dasar gugatannya pun sama sehingga sudah sangat terbukti sekali apabila gugatan dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan yang *nebis in idem*;

Perlu Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III ingatkan juga bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding/ParaPenggugat merupakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok bahwa "Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud". Artinya bahwa gugatan tersebut diajukan atas dasar kepentingan kelompok yang mengatasnamakan sebagai nasabah PD BPR Bungbulang baik dalam bentuk tabungan ataupun dalam bentuk deposito;

Selanjutnya, sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sampaikan dalam duplik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tertanggal 7 Oktober 2014 bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor 12/PDT/G/2013/PN GRT. khususnya pada agenda pemberitahuan kepada anggota kelompok, tidak ada satupun anggota kelompok yang menyatakan keluar (*option out*), sehingga putusan pengadilan tersebut mengikat dan berkekuatan kepada seluruh anggota kelompok tersebut dan oleh karena putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) maka terhadapnya melekat asas *nebis in idem*. Hal ini sebagaimana disampaikan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 167. Agar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui proses GPK mengikat (*binding*) dan berkekuatan kepada anggota

Halaman 122 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok, tergantung pada faktor sah atau tidak pemberitahuan yang dilakukan wakil kelompok (Penggugat) dengan patokan dan acuan:

- 1) Apabila pemberitahuan sah, putusan langsung mengikat dan berkekuatan (*binding and enforceable*) kepada seluruh anggota kelompok, tanpa memerlukan penegasan penerimaan (*without recognition*) atas putusan. Dalam hal yang seperti ini, kepada mereka melekat asas *nebis in idem* apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) Jika pemberitahuan tidak sah, tetapi yang bersangkutan menyatakan menerima putusan, putusan mengikat, dan berkekuatan kepada anggota yang bersangkutan. Oleh karena itu, terhadap dirinya melekat asas *nebis in idem*;
- 3) Pemberitahuan tidak sah, dan anggota bersangkutan tidak menyatakan menerima putusan:
 - Putusan tidak mengikat dan berkekuatan kepadanya;
 - Dengan demikian kepadanya tidak melekat *nebis in idem*, dan masih dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai objek dan dasar hukum yang sama;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

2. Bahwa *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang pada intinya menyatakan bahwa “terhadap gugatan yang salah sasaran atau salah pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut juga telah dipertegas oleh M. Yahya Harahap, S.H., (2005:439) dengan merujuk kepada yurisprudensi yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa seseorang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang

Halaman 123 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat, karena dengan salah menarik pihak yang digugat maka akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi *error in persona*";

Bahwa perlu Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III sampaikan, faktanya sejak tanggal 20 November 2007 PD BPR Bungbulang telah dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/Kep. GBI/DpG/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR Bungbulang, sehingga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya dan secara hukum atas wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya maka segala hak dan kewenangan dari pengelolaan PD BPR Bungbulang termasuk diantaranya adalah pemilik saham (Pemohon Kasasi I dan II semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III) telah dicabut dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Apalagi posisi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III (baik secara struktural maupun fungsional) tidak mempunyai kewenangan apapun dalam pengelolaan PD BPR Bungbulang baik sebelum atau setelah izin usaha PD BPR Bungbulang dicabut sehingga dengan demikian gugatan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat tersebut adalah salah sasaran; Selanjutnya, sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya telah menyatakan bahwaberdasarkan Putusan MA-RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 "yang mengandung kaidah hukum bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", akan tetapi bukan berarti Majelis Hakim dapat secara serta merta memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat untuk menentukan siapa sajayang akan digugatnya, melainkan harus tetap memperhatikan ketentuan lainnya seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang

Halaman 124 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyatakan bahwa “terhadap gugatan yang salah sasaran atau salah pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, dimana telah dipertegas juga oleh M. Yahya Harahap, S.H., (2005:439) dengan merujuk kepada yurisprudensi yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa seseorang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat, karena dengan salah menarik pihak yang digugat maka akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi *error in persona*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

3. Bahwa *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa “oleh karena ternyata sebagai objek harta terperkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibat dalam perkara itu musti ikut di gugat. Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut di tarik sebagai Tergugat, gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*)”, juga telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan “bahwa karena yang berutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan diajukan kepada dua orang tersebut” serta telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan MA RI Nomor 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang pada pokoknya dapat ditarik suatu kaidah hukum bahwa dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam suatu perkara, maka gugatan perdata tersebut oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa perlu Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sampaikan, faktanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tersebut tidak lengkap/kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak

Halaman 125 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditariknya LPS sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*, karena pada kenyataannya meskipun berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor Kep-159/KE/XI/2011 tentang Pembubaran Tim Likuidasi PD BPR Bungbulang (DL), pelaksanaan likuidasi PD BPR Bungbulang (DL) telah berakhir sejak tanggal 25 Februari 2011, namun demikian meskipun tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah dinyatakan berakhir, bukan berarti LPS tidak perlu di tarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, karena pada kenyataannya semenjak izin usaha PD BPR Bungbulang dicabut, berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, status PD BPR Bungbulang dinyatakan sebagai bank dalam likuidasi dan sebagai tindak lanjutnya, dibentuk Tim Likuidasi berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 43 dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004, segala hak dan kewenangan pemegang saham (pemilik) diambil alih dan dijalankan oleh LPS, termasuk penguasaan dan pengelolaan aset dan kewajiban PD BPR Bungbulang, sedangkan tanggung jawab dan kepengurusan bank dilaksanakan oleh tim likuidasi tersebut. Sehingga dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Garut selaku pemilik bank tidak mempunyai hak dan kewenangan apapun terhadap PD BPR Bungbulang, karena faktanya sampai proses likuidasi dinyatakan telah selesai oleh LPS, Pemerintah Kabupaten Garut tidak pernah menerima penyerahan aset dan kewajiban eks. PD BPR Bungbulang tersebut, maka atas dasar tersebut meskipun pelaksanaan likuidasi telah dinyatakan berakhir namun bukan berarti tidak perlu menarik LPS sebagai pihak kedalam perkara *a quo*, karena faktanya penguasaan aset dan kewajiban eks. PD BPR Bungbulang ada pada Lembaga Penjamin Simpanan dan sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemohon Kasasi I dan II semula Pembanding /Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni

Halaman 126 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah melanggar ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara karena sebagaimana diketahui sebagai suatu fakta bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat adalah perihal gugatan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), artinya bahwa gugatan ini dilandaskan pada suatu perjanjian. Pada kenyataannya Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah sekalipun membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat. Padahal sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara disebutkan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga”;

Bahwa bagaimana mungkin Para Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III telah dianggap melakukan suatu perbuatan *wanprestasi* terhadap Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat padahal nyata-nyata tidak ada satu pun bukti dan fakta yang menunjukkan bahwa antara Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat dan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I telah mengikatkan diri dalam satu perjanjian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

5. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Bahwa sebagaimana diketahui sebagai suatu fakta, Para Termohon Kasasi semula Terbanding

Halaman 127 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding/Para Penggugat telah salah menarik Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III selaku pihak dalam perkara *a quo*, karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak pernah membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat, karena pada faktanya, para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding/Para Penggugat telah menyimpan dana dalam bentuk tabungan dan deposito di PD BPR Bungbulang berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Pimpinan/Pengelola PD BPR Bungbulang dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat (sebagai nasabah baik yang tergabung dalam Kelompok I maupun Kelompok II). Sehingga segala akibat hukum yang terjadi hanya mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dalam hal ini adalah Pimpinan/Pengelola PD BPR Bungbulang dan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat (sebagai nasabah yang terdiri dari Kelompok I dan kelompok II);

Bahwa apabila Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat tetap bersikukuh hendak mengajukan suatu gugatan wanprestasi dengan mendasarkan kepada Pasal 1243 KUHPdata bahwa bukankah Pasal 1243 tersebut timbul dari persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata yang berarti bahwa:

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPdata, namun faktanya Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah sekalipun membuat perjanjian apapun dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*, sehingga apabila Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat merasa apa yang disepakati tidak dipenuhi maka bukankah seharusnya Para Termohon semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Para Termohon semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, bukannya malah

Halaman 128 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III yang tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dan tidak memiliki keterkaitan hukum sama sekali dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat di dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tidak ada satu pun perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III di dalam perkara *a quo*, hal tersebut sangat mustahil karena bagaimana mungkin terjadi *wanprestasi* sementara tidak ada satu perjanjian pun yang pernah dilakukan antara Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga merupakan sebuah kekeliruan besar apabila Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat menarik Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III di dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

6. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang antara lain menjelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, sehingga gugatan harus dikategorikan sebagai *obscuur libels*. Di samping itu putusan *Judex Facti* tersebut juga terbukti melanggar Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 bahwa dua buah gugatan yang berkaitan satu sama lain, namun masing-masing gugatan ini ternyata diatur oleh dua sistem hukum acara yang



berbeda, meskipun kedua gugatan tersebut berkaitan satu sama lain maka Hakim tidak dapat menggabungkan kedua gugatan tersebut;

Bahwa sebagaimana diketahui sebagai suatu fakta, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Termohon semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat terdapat kontradiksi yaitu di satu sisi dasar gugatan yang digunakan adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), di sisi lain padahal dalam uraian fakta-fakta hukum poin lima halaman lima dalam gugatannya, Para Termohon semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat juga mendalilkan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III melakukan Pelanggaran Hukum sehingga menurut Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tuduhan dan tuntutan atas pelanggaran hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah sesuatu hal yang berbeda padahal perihal gugatan perkara ini hanyalah sebatas tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan tidak termasuk tuntutan pelanggaran hukum yang dapat digambarkan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Bahwa terhadap fakta tersebut, tidak dapat disangkal lagi bahwa Para Termohon semula Para Terbanding/Pembanding/Para Penggugat telah mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum di dalam *posita* surat gugatannya. Padahal gugatan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat tersebut adalah gugatan ingkar janji (wanprestasi), bukankah kedua jenis tuntutan tersebut satu dan lainnya sangat berbeda akan sifat dan hakikatnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

7. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena bertentangan dengan azas hukum *unus testis nullus testis* dengan alasan bahwa sebagaimana yang telah ditemukan di persidangan dalam perkara *a quo*, bahwa saksi yang bernama Sdr. H. Heri Hermawan, S.H., telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu Penggugat (anggota kelompok II/Nasabah PD BPR Bungbulang dalam bentuk deposito/simpanan berjangka) dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada halaman 8 Nomor urut 39 dengan Nomor rekening 125/IV/2006 yang jumlahnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut juga telah dibantah oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III baik dalam agenda persidangan tanggal 9 Desember 2014 maupun dalam kesimpulan yang telah disampaikan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 23 Desember 2013, sehingga harus dinyatakan sebagai orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dalam persidangan ini, sehingga dengan demikian Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi saja yaitu atas nama Sdr. Ridwan Samsul Rijal. Adapun sehubungan dengan keterangan satu orang saksi menurut hukum dapat dianggap tidak dapat membuktikan suatu peristiwa (*vide* Pasal 169 HIR atau Pasal 306 Rbg) hal tersebut juga selaras dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga berdasarkan dalil/argumentasi tersebut di atas dapat disimpulkan secara pasti bahwa menurut hukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dalam persidangan perkara *a quo* dapat dianggap tidak mengajukan saksi karena tidak adanya kesaksian dari Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat. Atas dasar tersebut maka seluruh dalil Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dalam surat gugatannya haruslah dianggap tidak dapat dibuktikan kebenarannya, namun faktanya hal tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tepat dan dapat diterima serta selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015;

Halaman 131 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat agar dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III di bagian dalam provisi dan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap telah pula diuraikan secara *mutatis mutandis* di dalam bagian dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III yang akan diuraikan di bagian dalam pokok perkara ini;

Adapun alasan dari keberatan serta penolakan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015 dapat Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 RV yang menyatakan “bahwa batasan yang dapat dilakukan Penggugat dalam mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan.”Dimana hal tersebut juga telah diperkuat dengan adanya pendapat ahli hukum Subekti yang menyatakan “yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan.”dan pendapat ahli hukum Soepomo yang menyatakan bahwa “perkataan “pokok gugatan” berasal dari *onderwerp van den eis*, beliau mengakui perkataan ini, tidak terang artinya, kita sependapat dengan penegasan, sehingga perkataan itu dalam pengkajian Yurisprudensi tergolong penggarisan kabur (*vague outline*) atau mengandung pengertian luas (*broad term*) namun demikian, beliau mengemukakan dalam praktik *onderwerp* memuat juga arti *middelen* berupa hal-hal yang menjadi dasar tuntutan”. Serta menurut pendapat ahli hukum Soedikno yang menyatakan “menurut praktik selain juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan”;

Karena faktanya putusan *Judex Facti* yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. tanggal 29

Halaman 132 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 yang telah dimohonkan banding sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut terbukti dengan adanya Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. tertanggal 29 Januari 2015 yang telah mengabulkan perbaikan/perubahan gugatan Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat; Selanjutnya perlu Para Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sampaikan pula bahwa faktanya, dalam gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat disebutkan bahwa jumlah nasabah PD BPR Bungbulang dalam bentuk tabungan berjumlah 40 (empat puluh) nasabah dengan total jumlah tabungan sebesar Rp478.923.227,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan jumlah nasabah dalam bentuk deposito/simpanan berjangka berjumlah 507 (lima ratus tujuh) nasabah dengan total jumlah deposito sebesar Rp4.585.360.640,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Adapun dalam perbaikan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat tertanggal 17 Juni 2014, jumlah nasabah serta jumlah simpanan nasabah PD BPR Bungbulang/Para Terbanding semula Para Penggugat mengalami penambahan yaitu jumlah nasabah dalam bentuk tabungan ditambah 12 (dua belas) nasabah dengan penambahan total jumlah tabungan sebesar Rp1.259.708.82 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah koma delapan puluh dua sen) dan jumlah nasabah dalam bentuk deposito/simpanan berjangka ditambah 49 (empat puluh sembilan) nasabah dengan penambahan total jumlah deposito sebesar Rp1.149.369.769,87 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh sen), sehingga total Jumlah nasabah PD BPR Bungbulang yang mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Grt. dalam bentuk tabungan bertambah menjadi 52 (lima puluh dua) nasabah dan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka bertambah menjadi 556 (lima ratus lima puluh enam) nasabah dengan total jumlah tabungan sebesar Rp480.182.935,82 (empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah koma delapan puluh dua sen) dan total jumlah deposito/simpanan berjangka bertambah menjadi sebesar Rp5.734.730.409,87 (lima miliar

Halaman 133 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh sen);

Bahwa atas dasar tersebut, perubahan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat jelas sangat merugikan Pembanding/semula Tergugat I, disamping perubahan gugatan tersebut merupakan perubahan yang menyangkut pada pokok gugatan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penambahan jumlah nasabah dalam bentuk tabungan yang dalam gugatan awal hanya berjumlah 40 (empat puluh) nasabah diperbaiki dengan menambah jumlah nasabah sebanyak 12 (dua belas) nasabah sehingga jumlah keseluruhannya adalah menjadi 52 (lima puluh dua) nasabah, sementara jumlah nasabah dalam bentuk deposito /simpanan berjangka dalam gugatan awal berjumlah 507 (lima ratus tujuh) nasabah diperbaiki dengan menambah 49 (empat puluh sembilan) nasabah sehingga jumlah keseluruhannya adalah menjadi 556 (lima ratus lima puluh enam) nasabah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, karena putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan/tidak menghiraukan mengenai perubahan gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 9 Januari 2015;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena telah bertentangan dengan Pasal 169 HIR atau Pasal 306 Rbg yang menyatakan bahwa “keterangan satu orang saksi menurut hukum dapat dianggap tidak dapat membuktikan suatu peristiwa” hal tersebut juga selaras dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), karena faktanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015, pertimbangan hukumnya sangat keliru dan menyesatkan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan diadikannya saksi atas nama Heri Hermawan, SH oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat yang terbukti sebagai salah satu Penggugat (anggota kelompok II/Nasabah PD BPR Bungbulang dalam bentuk deposito/simpanan



berjangka) dalam perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada halaman delapan Nomor Urut 39 dengan Nomor Rekening 125/IV/2006 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut juga telah di bantah oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 9 Desember 2014 maupun dalam kesimpulan yang telah disampaikan pada tanggal 23 Desember 2014, sehingga atas dasar tersebut Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding /Para Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi saja yaitu atas nama Sdr. Ridwan Samsul Rijal;

Sehingga atas dasar tersebut, dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tanggal 29 Januari 2015. Telah memberikan pertimbangan yang keliru dan menyesatkan, akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi (*vide* Putusan MA RI Nomor 443 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988 dan Putusan MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Desember 1985);

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, yang selengkapnyanya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-599 dan P-602 sampai dengan bukti P-616 berupa fotocopy buku tabungan simpanan dan buku bilyet deposito telah membuktikan bahwa ada sebuah perjanjian dimana pihak nasabah (Para Penggugat) menyetorkan sejumlah uang kepada pihak BPR dengan sebuah imbal prestasi berupa bunga baik dalam bentuk bunga simpanan maupun bunga deposito terhadap bunga atas simpanan tabungan dan deposito tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak baik oleh nasabah sebagai pihak yang menyimpan uangnya maupun BPR sebagai pihak yang menerima uang dan memberikan imbal prestasi berupa bunga atas simpanan para nasabahnya”.

“Bahwa perjanjian antara Penggugat sebagai nasabah dengan Tergugat sebagai BPR melahirkan perikatan sebagai berikut :

- a) Pihak Penggugat sebagai nasabah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak BPR, baik untuk simpanan tabungan maupun deposito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhak untuk menerima bunga dari simpanan tabungan dan depositonya;

- b) Pihak BPR berhak menerima penyerahan sejumlah uang pokok (tabungan/deposito) dan berkewajiban untuk membayar bunga sesuai dengan yang telah diperjanjikan”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang selanjutnya diambil alih dan dikuatkan oleh putusan *Judex Facti*, merupakan bukti bahwa pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah antara Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Pembanding /Para Penggugat dengan Tergugat IV (Pimpinan Perusahaan Daerah BPR Bungbulang) sehingga perjanjian tersebut hanya mengikat antara dua pihak yang telah bersepakat untuk saling mengikatkan dirinya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1315 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Selanjutnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah hanya berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata. Dikarenakan pihak yang membuat perjanjian tersebut hanya dua pihak yaitu antara Para Terbanding/semula Para Penggugat dengan pihak Tergugat IV (Pimpinan PD BPR Bungbulang) bukan Pemohon Kasasi I dan II semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III, maka segala konsekuensi atas perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang telah ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dan suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga.”Sehingga dengan demikian dari argumentasi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa faktanya Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengikatkan diri untuk membuat suatu hubungan hukum perjanjian dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga atas dasar tersebut dan sesuai Pasal 1340 KUHPdata sangat menyesatkan sekali apabila Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III harus menanggung akibat dari perjanjian tersebut;

Halaman 136 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, perlu Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sampaikan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 yang telah menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam Putusan Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015 pada halaman 176, yang menyatakan:

“Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi:

- a. Adanya kesepakatan para pihak;
- b. Orang yang membuat perjanjian adalah orang yang dianggap cakap bertindak menurut hukum;
- c. Adanya sesuatu hal sebagai objek perjanjian;
- d. Perjanjian tersebut tidak melanggar kepatutan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-599 dan P-602 sampai dengan bukti P-616, rata-rata suku bunga per bulan yang tercantum dalam bilyet deposito adalah 2 % (dua) persen perbulan atau pertahunnya mencapai 24 % (dua puluh empat) persen, hal ini sangat keterlaluan karena bagaimana mungkin suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila suku bunga depositonya sedemikian besar hingga mencapai 24% (dua puluh empat) persen per tahun? sementara itu tingkat suku bunga BPR yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu, per tahunnya hanya dikisaran 8 % (delapan) persen, artinya bahwa suku bunga yang diklaim Terbanding semula Para Penggugat jauh di atas tingkat kewajaran atau mencapai 3x lebih besar dari suku bunga wajar yang sudah ditetapkan. Penetapan bunga tersebut bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan yang menyatakan penentuan suku bunga bank tidak boleh melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang telah ditentukan oleh LPS. Sehingga atas dasar hal tersebut, maka perjanjian sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan;

Halaman 137 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

4. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa dalam setiap perjanjian utang piutang melahirkan hutang (*schuld*) dan kewajiban pembayaran (*haftung*) dimana antara *schuld* dan *haftung* tidak selalu melekat pada seorang debitur saja namun ada kalanya seseorang yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian utang piutang ia berkewajiban untuk melakukan pembayaran manakala si debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya misalnya dalam hal penanggungan, garasi, penjaminan utang, asuransi avails yang kesemuanya merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban prestasi debitur pada saat debitur cidera janji”;

“Bahwa selain itu Pasal 1367 Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam pertimbangan hukumnya telah menganalogikan perkara *a quo* dengan penanggungan, garasi, penjaminan utang, asuransi, avails. sebagaimana tersebut di atas dan menganalogikan kedudukan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sebagai penanggung, penjamin, dan avails. Namun demikian, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Pengadilan Negeri Garut dalam pertimbangan hukumnya telah menganalogikan perkara *a quo* dengan penanggungan, garansi, penjaminan utang, asuransi avails maka

Halaman 138 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yang mempunyai kedudukan sebagai penanggung, penjaminan, dan avalis adalah LPS bukan Pemohon Kasasi I dan II semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III, karena sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III jelaskan baik dalam jawaban tertanggal 16 September 2014, maupun dalam duplik tertanggal 7 Oktober 2014, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan program penjaminan terhadap nasabah Bank telah dibentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 4 huruf a dikatakan pula bahwa “fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan” dan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 2009 bahwa “setiap Bank yang melakukan kegiatan di Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan” tidak terkecuali PD BPR Bungbulang yang merupakan Bank yang menjadi peserta penjaminan LPS;

Selanjutnya, sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/61/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pencabutan Izin Usaha PD BPR Bungbulang bahwa sejak tanggal tersebut secara institusional/sebagai badan hukum secara resmi telah dan atau dalam proses dilikuidasi. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya dan secara hukum atas wewenang dan kuasa yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya maka segala hak dan kewenangan dari pengelolaan PD BPR Bungbulang termasuk diantaranya adalah pemilik saham (Tergugat I) telah dicabut dan diambil alih oleh

Halaman 139 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai kedudukan sebagai penanggung atau penjamin tersebut adalah LPS bukanlah Pemohon Kasasi I dan II semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III, Pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Garut tersebut adalah pertimbangan yang cacat hukum dan sepenuhnya harus ditolak dan dikesampingkan;

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* mendasarkan pada ketentuan Pasal 1367 KUHPdata, seharusnya Pasal tersebut lebih tepat diterapkan pada gugatan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 128 "Pasal 1367 KUHPdata menggariskan prinsip pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan. Menurut prinsip ini, majikan atau atasan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan pegawai atau bawahan.prinsip ini dikenal dengan sebutan *vicarios liability*";

Namun demikian sebagaimana diketahui bahwa teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) hanya berlaku pada gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, faktanya bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah gugatan wanprestasi atau cidera janji atau ingkar janji hal tersebut semakin ditegaskan di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut halaman 172, 180-182 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan wanprestasi atau ingkar janji bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang cacat hukum dan sepenuhnya harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 140 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

5. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti*, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dalam perkara *a quo* meskipun Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Garut) tidak turut menjadi pihak dalam perjanjian penyimpanan uang dengan pemberian bunga namun bukan berarti bahwa tanggung jawab pengembalian uang dan pembayaran bunga hanya menjadi tanggung jawab BPR sebagai pihak yang membuat perjanjian tersebut karena berdasarkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan “apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain maka kewajiban tersebut wajib di bayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal”;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena perlu kami sampaikan kembali secara tegas sekaligus menjadi bukti bahwa secara nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut telah mengakui bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tidak turut menjadi pihak dalam perjanjian tersebut;

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”;

Selanjutnya “suatu perjanjian yang dibuat secara sah hanya berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Dikarenakan pihak yang membuat perjanjian tersebut hanya dua pihak yaitu antara Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dengan pihak Tergugat IV (Pimpinan PD BPR Bungbulang) bukan Pembanding semula Tergugat I, maka segala konsekuensi atas perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang telah ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Halaman 141 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dan suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga”;

Sehingga tidak terdapat satu alasan yang dapat dibenarkan secara hukum terhadap apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III harus bertanggung jawab atas pengembalian uang dan pembayaran bunga. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang cacat hukum dan sepenuhnya harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

6. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 178-180, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pengalihan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada pihak pemegang saham berdasarkan Pasal 54 ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah jika terbukti pihak pemegang saham menyebabkan bank menjadi bank gagal, sehingga Majelis berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah benar ada keterlibatan pemegang saham atau pemilik modal yang menyebabkan PD BPR Bungbulang menjadi bank gagal;

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai pemilik modal tunggal dari BPR Bungbulang memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang diangkat dan diberikan tanggung jawab sebagai direksi yang akan memimpin kegiatan usaha perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga wewenang untuk menentukan direksi tersebut secara bersamaan juga melekat tanggung jawab untuk benar-benar memilih dan mengangkat orang-orang yang kredibel dan profesional untuk melaksanakan tugas tersebut sehingga

Halaman 142 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ternyata direksi dan jajarannya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan malah justru merugikan pihak nasabah maka Pemerintah Daerah selaku pihak yang memilih dan mengangkat direksi tersebut harus turut pula bertanggung jawab;

"Bahwa secara yuridis direksi bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang dalam hal ini BPR Bungbulang sedangkan perusahaan adalah manifestasi dari si pemilik modal sehingga garis tanggung jawab antara direksi dan pemilik modal tidak bisa terputus begitu saja, namun tetap melekat secara otomatis";

Bahwa pemilik modal dst;

Bahwa Peraturan Daerah dst;

Bahwa tata cara dan tata tertib dst;

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 di atas maka nyata Pemerintah Daerah selaku pemilik modal telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para jajaran direksinya maka dengan demikian telah terbukti bahwa secara tidak langsung pihak Pemerintah Daerah juga sebagai penyebab BPR Bungbulang menjadi bank yang gagal";

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Garut yang putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah bertindak melebihi kewenangannya, karena Majelis Hakim dengan sangat mudah dan tanpa didukung alat bukti menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III merupakan pihak yang menyebabkan BPR Bungbulang menjadi bank gagal. Sehubungan dengan hal tersebut juga perlu kami tegaskan kembali bahwa tugas dan peran hakim dalam perkara perdata harus bersifat pasif, dimana hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut juga telah sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan pada halaman 499, yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas:

a. Mencari dan menemukan kebenaran formil;

Halaman 143 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kebenaran tersebut hanya diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, perlu kami tegaskan kembali bahwa tak ada satupun data/dokumen yang diterbitkan oleh LPS yang menyatakan atau membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti menyebabkan BPR Bungbulang menjadi bank gagal, karena faktanya terjadinya pencabutan izin usaha dan likuidasi PD. BPR Bungbulang bukan disebabkan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I, melainkan disebabkan oleh pengelolaan perusahaan yang tidak benar yang dilakukan oleh pengurus, apalagi kalau memperhatikan rata-rata suku bunga per bulan yang tercantum dalam bilyet deposito (bukti P 48–P 616) adalah rata-rata s.d 2 % (dua) persen perbulan atau pertahunnya mencapai 24 % (dua puluh empat) persen, hal ini sangat keterlaluan karena bagaimana mungkin suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila suku bunga depositonya sedemikian besar hingga mencapai 24% (dua puluh empat) persen per tahun? sementara itu tingkat suku bunga BPR yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu, per tahunnya hanya dikisaran 8 % (delapan) persen artinya bahwa suku bunga yang diklaim Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat jauh di atas tingkat kewajaran atau mencapai 3x lebih besar dari suku bunga wajar yang sudah ditetapkan. Hal tersebut jelas sekali tampak adanya ketidak-beresan dan ketidak-wajaran terhadap apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat tersebut, terlepas bahwa apa yang didalilkan tersebut, faktanya telah diperjanjikan antara Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding /Para Penggugat dengan Pengurus (direksi dan karyawan) PD BPR Bungbulang, terlebih lagi berdasarkan dalil Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatannya bahwa sebagian besar Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat menyimpan dananya diPD. BPR Bungbulang dilakukan pada Tahun 2006 dan Tahun 2007, padahal pada saat itu PD BPR Bungbulang berada dalam status “Dalam Pengawasan Khusus (DPK)”, dimana bank dilarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini berarti bahwa ketidak beresan dalam pengelolaan PD BPR Bungbulang dilakukan oleh pengurus bukan oleh Pemohon Kasasi I dan II semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III. Hal ini terbukti dengan telah dihukumnya Sdr. Dedi Rustandi serta Yuyan Turyana selaku Direksi PD BPR Bungbulang karena telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang merugikan PD BPR Bungbulang. Sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), mereka yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi PD BPR Bungbulang yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut, bukan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III maka dengan dinyatakan Sdr. Dedi Rustandi serta Yuyan Turyana selaku Direksi PD BPR Bungbulang bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sangat jelas sekali bahwa yang menyebabkan bank gagal itu bukan disebabkan oleh pemilik saham melainkan disebabkan oleh pengelola yang tidak benar dalam menjalankan usaha PD BPR Bungbulang;

Atas dasar tersebut diatas, maka sudah sangat jelas sekali bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Garut yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung, sudah melampaui batas kewenangannya sehingga menentukan Pemerintah Daerah sebagai penyebab BPR Bungbulang menjadi bank yang gagal, karena dalam memberikan pertimbangan dalam perkara *a quo* tidak didukung dengan fakta dan bukti dipersidangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

7. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum

Halaman 145 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti pada halaman 180, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum perjanjian penyimpanan uang dengan imbal prestasi berupa bunga dan perjanjian tersebut telah dibuat atas dasar kesepakatan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya mengikat kedua belah pihak sebagai undang undang";

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena Majelis Hakim menyamakan kedudukan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV. Perlu diketahui bahwa pada kenyataannya Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding /Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah sekalipun membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat;

Sehubungan dengan ketentuan Pasal tersebut, bagaimana mungkin antara Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dapat dikatakan mempunyai hubungan hukum perjanjian padahal nyata-nyata tidak ada satu pun bukti dan fakta yang menunjukkan bahwa antara Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III telah mengikatkan diri dalam satu perjanjian. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang terdapat pada buku tabungan, deposito/simpanan berjangka tersebut dimana yang melakukan hubungan perjanjian dalam perkara *a quo* adalah Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat dan Tergugat IV/PD BPR Bungbulang (DL) yang telah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), artinya bahwa hubungan perjanjian tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut akan tetapi tidak berlaku bagi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III karena sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUHperdata bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III termasuk pihak yang tidak dapat dikaitkan dalam perjanjian tersebut,

Halaman 146 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian sudah sangatlah jelas bahwa antara Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan Para Termohon Kasasi semula Terbanding /Pembanding/Para Tergugat tidak pernah terjadi suatu hubungan hukum perjanjian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

8. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 181, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa oleh karena aset-aset yang dikumpulkan dalam proses likuidasi tidak mencukupi untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada para nasabahnya baik dalam bentuk pokok tabungan/deposito maupun bunga yang diperjanjikan, maka kewajiban pembayaran menjadi tanggung jawab pihak pemilik modal yaitu Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan hasil perincian sisa kewajiban yang belum terbayarkan dalam proses likuidasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dalil yang diajukan Para Penggugat mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat telah terbukti, sehingga dirasa cukup adil bila Para Tergugat harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Para Penggugat";

Sehubungan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada, tidak berdasar, maka harus ditolak dengan alasan bahwa bagaimana mungkin Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan wanprestasi sementara faktanya tidak satupun dapat membuktikan bahwa antara Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah memiliki hubungan hukum perjanjian dengan Para Termohon

Halaman 147 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat I diatas yang menyatakan bahwa apabila Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tetap bersikukuh hendak mengajukan suatu gugatan wanprestasi dengan mendasarkan kepada Pasal 1243 KUHPerdata bahwa bukankah Pasal 1243 tersebut timbul dari persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang berarti bahwa:

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata, namun faktanya Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah sekalipun membuat perjanjian apapun dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding /Para Penggugat;
- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*, sehingga apabila Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding /Para Penggugat merasa apa yang disepakati tidak dipenuhi maka bukankah seharusnya Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat bukannya malah menarik Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III yang tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dan tidak memiliki keterkaitan hukum sama sekali dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat di dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tidak ada satu pun perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III di dalam perkara *a quo*, hal tersebut sangat mustahil karena bagaimana mungkin terjadi wanprestasi sementara tidak ada satu perjanjian pun yang pernah dilakukan antara Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga merupakan sebuah kekeliruan besar apabila Para Termohon Kasasi/Para Terbanding semula Para Penggugat menarik Para

Halaman 148 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III di dalam perkara *a quo*, namun faktanya majelis hakim dalam perkara *a quo* tetap mengabulkan Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

9. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 182-223, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, dan jawaban dari Tegugat I, II dan III adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan/*petitum* dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka dua, yang memohon agar Majelis menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas bilyet deposito/simpanan berjangka dan buku-buku tabungan atas nama masing-masing Para Penggugat dan *petitum* angka lima perihal bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka tiga, yang memohon agar Majelis menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk membayar seluruh simpanan dalam bentuk tabungan sebesar Rp478.923.277,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan *petitum* angka empat, yang memohon agar Majelis menetapkan Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok membayar seluruh simpanan dalam bentuk deposito kepada Para Penggugat sebesar Rp3.599.300.000,00 (tiga miliar

Halaman 149 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara memikul beban pembuktian untuk diajukan di depan persidangan mengenai kebenaran yang seutuhnya. Akan tetapi, setelah hakim dalam persidangan menampung dan menerima segala sesuatu kebenaran tersebut, dia harus menetapkan kebenaran itu. Sejauh mana dan dalam bentuk serta wujud kebenaran yang bagaimana yang harus dikemukakan dan ditegakakan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan dengan mencocokkan terhadap bukti-bukti kepemilikan rekening tabungan Para Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa bukti-bukti surat berupa buku tabungan ditandai dengan P-01 sampai dengan P-47 dan, P-613 sampai dengan P-616 yang telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya;
- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti surat kepemilikan tabungan yang diajukan ke persidangan, yang telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) rekening;
- c. Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan secara rinci dari simpanan tabungan para nasabah (para penggugat) dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima berdasarkan bukti T-14, T-15 tentang form pembayaran dari hasil proses likuidasi maka didapatkan nilai simpanan tabungan yang masih tersisa dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka sisa dari simpanan pokok tabungan yang belum terbayar kepada Para Penggugat sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan dengan mencocokkan terhadap bukti-bukti kepemilikan deposito Para Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti surat berupa bilyet deposito ditandai dengan P-48 sampai dengan P-612 adalah sama dan sesuai dengan aslinya;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti surat kepemilikan deposito yang diajukan ke persidangan, yang telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya adalah sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima) rekening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan secara rinci dari simpanan deposito para nasabah (Para Penggugat) dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima berdasarkan bukti T-14, T-15 dan T-15 tentang form pembayaran dari hasil proses likuidasi maka didapatkan nilai simpanan tabungan yang masih tersisa dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka sisa simpanan pokok deposito yang belum terbayar kepada Para Penggugat sebesar Rp3.074.147.220 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa menyangkut petitum angka enam, oleh karena permohonan tentang mekanisme pembayaran tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dipandang akan lebih memudahkan dalam penyaluran pembayaran tersebut, maka *petitum* pada angka enam tersebut patut untuk dikabulkan dengan ketentuan pada saat pembayaran dilakukan semua bukti buku tabungan dan bilyet deposito yang asli diberikan kepada pihak Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti di persidangan sisa simpanan pokok tabungan Para Penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen), maka patut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kekurangan simpanan pokok tabungan kepada Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kelompok sebesar Rp399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen), baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus; sehingga dengan demikian petitum angka tujuh harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* angka delapan, oleh karena yang terbukti di persidangan sisa simpanan pokok deposito Para Penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp3.074.147.220 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), maka patut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban pembayaran simpanan pokok deposito kepada Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kelompok sebesar Rp3.074.147.220 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;

Halaman 151 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *petitum* angka sembilan, agar menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil atas bunga diperjanjikan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya terkait dengan simpanan pokok yang berupa tabungan maupun deposito, maka cukup adil apabila menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas bunga kepada Para Penggugat sesuai yang dimohonkan Para Penggugat yaitu 6 % (enam) persen pertahun dipandang cukup adil sehingga berdasarkan perhitungan dari seluruh total simpanan tabungan, maka kewajiban bunga simpanan tabungan yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp1.259.708,82 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen);
- b. Bahwa kerugian atas bunga deposito yaitu jumlah pokok deposito dikalikan suku bunga yang diperjanjikan oleh para pihak sebagaimana tertera dalam bilyet giro dikalikan dengan lamanya tahun menyimpan deposito masing-masing sampai dengan PD BPR Bungbulang dinyatakan likuidasi (Tahun 2007), sehingga dengan penghitungan demikian maka bunga deposito Para Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp1.149.369,87 (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh sen);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka *petitum* pada angka sembilan harus dikabulkan”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada, tidak berdasar, maka harus ditolak, karena sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi semula Pembanding /Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III sampaikan di dalam keberatan-keberatan sebelumnya berkenaan dengan apa yang menjadi pokok persoalan sebagaimana diajukan sebagai gugatan adalah perihal gugatan wanprestasi. Sementara Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III bukanlah pihak di dalam perjanjian yang dilakukan oleh Pimpinan PD BPR Bungbulang dengan para nasabah PD BPR Bungbulang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara *juncto* Pasal 1315 KUHPerdara maka tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menyertakan Para Pemohon Kasasi semula

Halaman 152 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III di dalam *petitum-petitum* yaitu *petitum* angka dua, angka tiga, angka empat, angka enam angka tujuh, angka delapan dan angka sembilan sebagaimana dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut di dalam pertimbangannya 182–223 yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung;

Selanjutnya, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai suku bunga dikabulkan oleh Majelis Hakim, pertimbangan hukum tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya harus ditolak, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan yang menyatakan penentuan suku bunga bank tidak boleh melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang telah ditentukan oleh LPS. Sementara, apabila memperhatikan rata-rata suku bunga per bulan yang tercantum dalam bilyet deposito (bukti P 48–P 616) adalah rata-rata s.d 2 % (dua) persen perbulan atau pertahunnya mencapai 24 % (dua puluh empat) persen, hal ini sangat keterlaluan karena bagaimana mungkin suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila suku bunga depositonya sedemikian besar hingga mencapai 24% dua puluh empat) persen per tahun? sementara itu tingkat suku bunga BPR yang wajar sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat itu, per tahunnya hanya dikisaran 8 % (delapan) persen artinya bahwa suku bunga yang diklaim para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat jauh di atas tingkat kewajaran atau mencapai 3x lebih besar dari suku bunga wajar yang sudah ditetapkan. Hal tersebut jelas sekali tampak adanya ketidak-beresan dan ketidak-wajaran terhadap apa yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi semula Terbanding semula Para Penggugat tersebut, terlepas bahwa apa yang didalilkan tersebut, faktanya telah diperjanjikan antara Para Termohon Kasasi semula Terbanding/Pembanding/Para Penggugat dengan Pengurus (direksi dan karyawan) PD BPR Bungbulang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengadili

Halaman 153 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT Bdg. tanggal 30 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/Para Penggugat /Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT BDG. tanggal 13 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015, yang pada intinya menyatakan “di dalam mencantumkan perhitungan sampai dengan nomor 556 atas nama Hj. Cucu...dst....dst” tersebut terdapat kekeliruan atau kelalaian, dimana pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang lainnya yaitu pada halaman 145-147, yang mana pertimbangan tersebut dengan tegas menyatakan “bukti-bukti tertulis pada poin 598 sampai dengan 616 asli dan potocopy tabungan/bilyet deposito atas nama dst....dst....dst dan pertimbangan selanjutnya bahwa semua bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai dengan cukup, dan untuk bukti P-600 dan P-601 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti-bukti selebihnya telah sama dan sesuai dengan aslinya”, sehingga putusan tersebut adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, dimana kaidah hukum Yurisprudensi tersebut dengan tegas menentukan “putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;
2. Dan lagi pula Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT BDG. tanggal 13 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana berdasarkan ketentuan tersebut Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT BDG. tanggal 13 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015

Halaman 154 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci atau putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat, telah membuktikan sebagaimana dalam bukti-bukti tertulis pada poin 598 sampai dengan 616 kecuali bukti P-600 dan P-601 tersebut, sebagaimana dalam putusan halaman 145 s/d 147 tersebut maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut seharusnya ditambah sehingga menjadi:

| No. | Nama | Alamat | No. Rekening | Jumlah Deposito/Tabungan | Telah Dibayarkan | Total yang belum dibayarkan |
|-----|--------------------|---|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 557 | Zamzam | Kp. Sempur Desa dan Kec. Bungbulang Kab. Garut | 60081 | 200,000.00 | 0% | 200,000.00 |
| 558 | Deni/H. Ishak Musa | Jalan Sinom II No. 10 Lengkong Kota Bandung | 0064/I/2006 | 7,500,000.00 | 4,92% | 7,131,000.00 |
| 559 | Sarip | Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut. | 46000647 | 4,000,000.00 | 21,43% | 3,142,800.00 |
| 560 | Amas | Kp. Cipeundeuy Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut. | 46001064 | 5,000,000.00 | 21,43% | 3,928,500.00 |
| 561 | Amas / Ondin | Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut. | 2111/XII/2005 | 1,000,000.00 | 21,43% | 785,700.00 |
| 562 | Amas | Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut. | 0423/II/2005 | 1,500,000.00 | 21,43% | 1,178,550.00 |
| 563 | Amas | Kp. Cipeundeuy Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut. | 1716/X/2003 | 3,000,000.00 | 21,43% | 2,357,100.00 |
| 564 | Sarip | Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut. | 46000838 | 2,500,000.00 | 21,43% | 1,964,250.00 |
| 565 | Mamah/Sarip | Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut. | 46000648 | 4,000,000.00 | 21,43% | 3,142,800.00 |
| 566 | Amas | Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut. | 1431/VIII/2005 | 2,500,000.00 | 21,43% | 1,964,250.00 |
| 567 | Masitoh/Maemunah | Kp. Cidomas Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut. | 0206/V/2006 | 5,000,000.00 | 0% | 5,000,000.00 |
| 568 | Supyadin Usup | Kp. Hegarmanah Ds. Wangunjaya Kec. Kec. Bungbulang Kab. Garut | 46001215 | 5,000,000.00 | 4,92% | 4,754,000.00 |
| 569 | H. Solihin | Kp. Cidomas Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut. | 1591/IX/2005 | 25,000,000.00 | 0% | 25,000,000.00 |
| 570 | Titin | Kp. Citalahab Ds. | T21004931 | 23,000,000.00 | 21,43% | 18,071,100.00 |



| | | | | | | |
|--------|---------------|---|----------|---------------|--------|---------------|
| | | Mekarjaya Kec. Bungbulang Garut | | | | |
| 571 | Usup Supyadin | Kp. Hegarmanah Ds. Wangunjaya Kec. Bungbulang Kab.Garut | 21005541 | 945,540.00 | 4, 92% | 899,019.00 |
| 572 | Amas | Kp. Cigarogol Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut. | 2100158 | 1,720,756.00 | 21,43% | 1,351,998.00 |
| 573 | Amas | Kp. Cipendeuy Ds. Sukarame Kec. Caringin Kab. Garut. | 46000753 | 5,500,000.00 | 21,43% | 4,321,350.00 |
| Jumlah | | | | 97,366,296,00 | | 80,871,067.00 |

- Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas maka *petitum* putusan poin empat dan poin delapan tersebut, harus berubah jumlahnya sehingga menjadi sebesar Rp3.155.018.287,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang mana jumlah tersebut dari *petitum* poin 4 atau poin 8 yaitu sebesar Rp3.074.147,220,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) ditambah kekurangan dari yang tidak dipertimbangan yaitu sebesar Rp80.871.067,00 (delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu eibu enam puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp3.155.018.287,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa kekeliruan selanjutnya dalam putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN GRT. halaman 223 yang pada intinya menyatakan “menimbang dst....dst....Para Penggugat didepan persidangan tidak pernah membuktikan dalilnya menyangkut adanya kerugian imateril sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya, maka Majelis memandang permohonan pada *petitum* ke sembilan tersebut harus dinyatakan ditolak”, karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan hukum pembuktian, karena pertimbangan tersebut tidak benar dan bertentangan dengan pertimbangan yang lainnya, yaitu:
- Dari pertimbangan tersebut diatas, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan/kesalahannya dalam membuat putusannya karena berdasarkan bukti saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat yaitu saksi Ridwan Samsu Rizal dan saksi Heri Hermawan, yang mana para saksi tersebut dengan tegas menyatakan dalam persidangan “bahwa dampak dari dana nasabah yang belum dikembalikan ada seperti banyak para nasabah yang

Halaman 156 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah karena merasa dirugikan seperti ada pedagang oleh karena tabungannya tidak bisa diambil jadi tidak bisa dagang lagi, dan ada pula nasabah yang menyimpan tabungannya untuk ongkos naik haji akhirnya tidak kesampaian karena tabungannya tidak bisa diambil”, (vide Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN GRT. halaman 149 dan 151);

- Dan lagi pula berdasarkan bukti P-600 = dalam halaman 105 dengan tegas menyatakan “menimbang, bahwa dengan besarnya dampak sosial yang terjadi terhadap nasabah BPR Bungbulang yang dilikuidasi, seperti adanya anak nasabah yang putus sekolah dan adanya usaha yang gulung tikar serta adanya nasabah BPR Bungbulang yang batal naik haji maka dampak sosial tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang saja, dengan demikian maka Majelis Hakim berketetapan tuntutan ganti rugi immateril dari Penggugat cukup beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan”, (vide Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN GRT. halaman 146 yaitu poin 600 = asli dan fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/Pdt.G/2013/PN GRT., selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-600);
- Dan lebih jauhnya lagi berdasarkan bukti tambahan yaitu bukti P-617 berupa berita acara penyerahan cek dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2013/PN GRT., dimana bukti tersebut menerangkan bahwa dahulu Para Tergugat telah menjalankan atas putusan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN GRT. tersebut, dan artinya perkara Nomor 12/Pdt.G/2013/PN GRT. telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti, dan bukti P-600 adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 BW;

Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1440 K/Sip/1996 tanggal 30 Juni 1998, dengan tegas menentukan “bukti tertulis berupa salinan putusan badan peradilan agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalam perkara perdata, maka bukti putusan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana belum maka tidak memiliki daya bukti sebagai alat bukti dalam perkara perdata”;

- Bahwa oleh karena berdasarkan bukti saksi yaitu Saksi Ridwan Samsu Rizal dan Saksi Heri Hermawan, serta bukti P-600 (dimana bukti

Halaman 157 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berupa putusan Pengadilan Negeri Garut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti) kemudian bukti tambahan P-617 tentang berita acara penyerahan cek dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2013/PN GRT., yang selanjutnya bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh dahulu Para Tergugat maka secara yuridis gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat tentang ganti rugi immateril telah cukup membuktikan sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan;

Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, dengan tegas menentukan "bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran *posita* gugatan Penggugat, sehingga gugatan tersebut, harus dikabulkan oleh hakim";

- Mengingat bukti-bukti dan kaidah-kaidah hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPerdata *juncto* Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf f dan g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1440 K/Sip/1996 tanggal 30 Juni 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, maka terdapat arti dan maksud yang sama dan dapat menghasilkan bukti yang sah dan penuh sehingga tuntutan ganti kerugian immateril harus dikabulkan, dengan perincian adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Kerugian immateril berdasarkan perhitungan tabungan adalah:

| NO | REKENING | POKOK | SUKU BUNGA (%) | LAMA SIMPANAN | | Jml. Hari | JUMLAH BUNGA (Rp) |
|----|-------------|----------------|----------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | | Tgl. Awal | Tgl. Akhir | | |
| 1 | 21006106 | 18.844.327,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.236.221, 57 |
| 2 | 21104924 | 201.010.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 77.187.840 ,00 |
| 3 | T.3213038 | 31.000.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.904.000 ,00 |
| 4 | 21160172 | 1.400.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 537.600,00 |
| 5 | 4824 | 6.750.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.592.000, 00 |
| 6 | 4823 | 9.400.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.609.600, 00 |
| 7 | T. 21060132 | 24.750.500,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.504.192, 00 |
| 8 | 4819 | 3.310.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.271.040, 00 |
| 9 | 21060219 | 1.000.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 384.000,00 |
| 10 | 21001620 | 17.271.382,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.632.210, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|----|------------------|---------------|------|----------------|
| | | | | | | | 69 |
| 11 | 21060220 | 6.025.748,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.313.887,23 |
| 12 | 2103839 | 25.106.101,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.640.742,78 |
| 13 | 21060082 | 5.043.047,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.936.530,05 |
| 14 | T. 3210.800 | 70.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 26.880,00 |
| 15 | 21105456 | 10.360.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.978.240,00 |
| 16 | 211060188 | 70.000.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 26.880.000,00 |
| 17 | T. 32104984 | 410.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 157.440,00 |
| 18 | T.32104985 | 46.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 17.664,00 |
| 19 | 21005105 | 3.349.291,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.286.127,74 |
| 20 | 60081 | 200.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 76.800,00 |
| 21 | 21104885 | 119.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 45.696,00 |
| 22 | 4887 | 347.500,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 133.440,00 |
| 23 | 21060250 | 300.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 115.200,00 |
| 24 | 5244 | 1.210.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 464.640,00 |
| 25 | 2100.60003 | 660.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 253.440,00 |
| 26 | 2160044 | 672.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 258.048,00 |
| 27 | 21060204 | 25.000.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 28 | 21060017 | 8.324.409,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.196.573,06 |
| 29 | 21005358 | 373.437,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 143.399,81 |
| 30 | 21060135 | 2.500.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 960.000,00 |
| 31 | 21105411 | 1.520.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 583.680,00 |
| 32 | 21004802 | 511.580,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 196.446,72 |
| 33 | T21006101 | 500.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 192.000,00 |
| 34 | 21105151 | 168.158,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 64.572,67 |
| 35 | 21005317 | 1.541.367,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 591.884,93 |
| 36 | 21160237 | 930.500,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 357.312,00 |
| 37 | 21006060 | 526.220,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 202.068,48 |
| 38 | 21060127 | 956.869,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 367.437,70 |
| 39 | 321800 | 70.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 26.880,00 |
| 40 | 21005105 | 118.289,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 45.422,98 |
| 41 | 21006221 | 214.280,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 82.283,52 |
| 42 | 21060193 | 1.264.241,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 485.468,54 |
| 43 | 21060113 | 1.652.402,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 634.522,37 |
| 44 | 21105457 | 1.450.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 556.800,00 |
| 45 | 21160224 | 300.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 115.200,00 |
| 46 | 21160043 | 2.085.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 800.640,00 |
| 47 | T.2105419 | 362.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 139.008,00 |
| 48 | T.2105420 | 264.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 101.376,00 |
| 49 | 21060222 | 652.830,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 250.686,72 |
| 50 | T.21006101 | 500.000,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 192.000,00 |
| 51 | 21105151 | 168.158,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 64.572,67 |
| 52 | 21005317 | 1.541.367,00 | 6% | 21 November 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 591.884,93 |
| Jumlah Total | | 492.150.003,00 | | | | | 188.985.601,15 |

2. Perhitungan kerugian immateril berdasarkan perhitungan deposito/simpanan berjangka adalah sebagai berikut:

Halaman 159 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | REKENING | POKOK DEPOSITO (Rp) | BUNGA /THN (% p.a.) | LAMA SIMPANAN | | Jml. Hari | JUMLAH BUNGA (Rp) |
|----|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | | Tgl. Awal | Tgl. Akhir | | |
| 1 | 0347/VII/2006 | 50.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 76.800.000,00 |
| 2 | 0281/VI/2006 | 5.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.440.000,00 |
| 3 | 05191/X/2006 | 7.500.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 4 | 46000349 | 4.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.032.000,00 |
| 5 | 46000693 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 6 | 46000956 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 7 | 46001199 | 1.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.152.000,00 |
| 8 | 0280/VI/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.160.000,00 |
| 9 | 46000881 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 10 | 0911/V/2005 | 80.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 122.880.000,00 |
| 11 | 01051/VI/2005 | 60.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 92.160.000,00 |
| 12 | 0300/III/2006 | 50.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 76.800.000,00 |
| 13 | 46000098 | 50.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 76.800.000,00 |
| 14 | 46000301 | 50.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 76.800.000,00 |
| 15 | 46000419 | 30.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 46.080.000,00 |
| 16 | 46000456 | 35.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 53.760.000,00 |
| 17 | 46000496 | 45.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 69.120.000,00 |
| 18 | 46000607 | 20.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 30.720.000,00 |
| 19 | 46000713 | 30.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 46.080.000,00 |
| 20 | 46000937 | 50.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 76.800.000,00 |
| 21 | 46000939 | 40.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 61.440.000,00 |
| 22 | 46001007 | 10.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.360.000,00 |
| 23 | 46001097 | 20.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 30.720.000,00 |
| 24 | 0059/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 25 | 0060/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 26 | 0061/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 27 | 0062/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |

Halaman 160 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-----|-------------|---------------|------|----------------|
| 28 | 0063/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 29 | 0065/I/2006 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 30 | 116/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.160.000,00 |
| 31 | 117/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.160.000,00 |
| 32 | 118/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.160.000,00 |
| 33 | 119/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.160.000,00 |
| 34 | 120/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.160.000,00 |
| 35 | 121/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.160.000,00 |
| 36 | 122/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.160.000,00 |
| 37 | 123/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.160.000,00 |
| 38 | 124/IV/2006 | 7.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.160.000,00 |
| 39 | 125/IV/2006 | 2.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.720.000,00 |
| 40 | 0412/II/2005 | 100.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 153.600.000,00 |
| 41 | 46001035 | 3.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.688.000,00 |
| 42 | 46000952 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 43 | 0936/VI/2003 | 1.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.304.000,00 |
| 44 | 46000905 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 45 | 46000906 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 46 | 46000907 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 47 | 46000908 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 48 | 46000909 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 49 | 46000910 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 50 | 46001154 | 50.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 64.000.000,00 |
| 51 | 0265/VI/2006 | 2.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.176.000,00 |
| 52 | 1114/VIII/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 53 | 1614/XI/2004 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 54 | 01095/VI/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 55 | 1545/IX/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 56 | 1837/XI/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.120.000,00 |

Halaman 161 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|
| 57 | 2109/XII/2005 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.920.000,00 |
| 58 | 0137/I/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.920.000,00 |
| 59 | 0277/II/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.920.000,00 |
| 60 | 46000376 | 1.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 896.000,00 |
| 61 | 0230/II/2006 | 15.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 23.040.000,00 |
| 62 | 46000592 | 10.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.360.000,00 |
| 63 | 01006/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 64 | 01007/VI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 65 | 01008/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 66 | 01009/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 67 | 01010/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 68 | 01011/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 69 | 01012/VI/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 70 | 1892/XI/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 71 | 0449/III/2006 | 3.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.456.000,00 |
| 72 | 46000484 | 6.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.912.000,00 |
| 73 | 46000652 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 74 | 46000853 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 75 | 46000911 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 76 | 1480/IX/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 77 | 1439/VIII/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.120.000,00 |
| 78 | 1669/X/2005 | 3.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 79 | 0381/III/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 80 | 0201/II/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.920.000,00 |
| 81 | 46001167 | 6.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 82 | 46001168 | 6.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 83 | 46000108 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 84 | 46000109 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 85 | 46000110 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |

Halaman 162 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-----|-------------|---------------|------|--------------|
| 86 | 46000253 | 6.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.912.000,00 |
| 87 | 46000254 | 3.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.456.000,00 |
| 88 | 46000342 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 89 | 46000377 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 90 | 46000382 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.120.000,00 |
| 91 | 46000383 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 92 | 46000384 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.120.000,00 |
| 93 | 46000671 | 1.900.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.432.000,00 |
| 94 | 46000679 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 95 | 46000680 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 96 | 46000681 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 97 | 46000793 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 98 | 46000852 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 99 | 46000914 | 5.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.040.000,00 |
| 100 | 46000915 | 5.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.040.000,00 |
| 101 | 46001039 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 102 | 46001040 | 6.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 103 | 46001041 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 104 | 46000890 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 105 | 46000891 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 106 | 46000634 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 107 | 46000635 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 108 | 46001251 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 109 | 46001250 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 110 | 46000975 | 5.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.928.000,00 |
| 111 | 193/I/2000 | 3.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.608.000,00 |
| 112 | 46001231 | 5.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.520.000,00 |
| 113 | 46000022 | 6.500.000,00 | 13% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.408.000,00 |
| 114 | 46000414 | 7.000.000,00 | 13% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.824.000,00 |

Halaman 163 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|
| 115 | 46000415 | 5.000.000,00 | 13% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.160.000,00 |
| 116 | 46000416 | 5.000.000,00 | 13% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.160.000,00 |
| 117 | 46000455 | 5.000.000,00 | 13% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.160.000,00 |
| 118 | 46000534 | 4.500.000,00 | 13% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.744.000,00 |
| 119 | 46000732 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 120 | 46000733 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 121 | 46000834 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 122 | 46000957 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 123 | 46000958 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 124 | 46000959 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 125 | 46000960 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 126 | 46000961 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 127 | 46000994 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 128 | 46001108 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 129 | 46001110 | 7.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 130 | 46001111 | 7.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 131 | 46001112 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 132 | 46001162 | 7.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 133 | 1278/VII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 134 | 46000040 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 135 | 46000039 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 136 | 027/II/2006 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.200.000,00 |
| 137 | 46000038 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 138 | 2077/XII/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 139 | 1826/XI/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.120.000,00 |
| 140 | 46000140 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 141 | 46000141 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 142 | 0720/IV/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 143 | 46000294 | 25.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 38.400.000,00 |

Halaman 164 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|
| 144 | 46000684 | 1.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.152.000,00 |
| 145 | 46001115 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 146 | 46001116 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 147 | 46001117 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 148 | 46001118 | 2.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.880.000,00 |
| 149 | 46001235 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 150 | 46001236 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 151 | 46001237 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 152 | 46000882 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 153 | 46000883 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 154 | 46000884 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 155 | 46000885 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 156 | 46000886 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 157 | 46000887 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 158 | 46001048 | 2.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.536.000,00 |
| 159 | 46001123 | 2.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.304.000,00 |
| 160 | 46000694 | 7.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.064.000,00 |
| 161 | 46001211 | 1.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.152.000,00 |
| 162 | 46001119 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 163 | 46001153 | 1.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.728.000,00 |
| 164 | 1666/X/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 165 | 46000668 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 166 | 1695/X/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 167 | 1696/X/2005 | 5.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.448.000,00 |
| 168 | 0097/II/2006 | 7.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.752.000,00 |
| 169 | 46000991 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 170 | 46000992 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 171 | 1203/VIII/2004 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.920.000,00 |
| 172 | 048/IV/2006 | 7.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.616.000,00 |

Halaman 165 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---------------|----------------|-----|-------------|---------------|------|----------------|
| 173 | 047/IV/2006 | 7.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.616.000,00 |
| 174 | 0392/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 175 | 46000840 | 100.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 153.600.000,00 |
| 176 | 0387/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 177 | 0389/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 178 | 46000656 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 179 | 1694/XI/2004 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 180 | 1614/X/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 181 | 1544/IX/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 182 | 0583/IV/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.752.000,00 |
| 183 | 0584/IV/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.752.000,00 |
| 184 | 46000230 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 185 | 1070/VII/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.752.000,00 |
| 186 | 0391/II/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 187 | 0585/IV/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.752.000,00 |
| 188 | 1907/XI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 189 | 1908/XI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 190 | 46000626 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 191 | 46000627 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 192 | 46000628 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 193 | 0386/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 194 | 0388/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 195 | 0390/II/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 196 | 1695/XI/2004 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 197 | 46000231 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 198 | 1071/VII/2004 | 7.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.752.000,00 |
| 199 | 1543/IX/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 200 | 1613/X/2005 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 201 | 46000657 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |

Halaman 166 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|
| 202 | 1074/IX/2003 | 10.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.360.000,00 |
| 203 | 1506/IX/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 204 | 1505/IX/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 205 | 1962/XI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 206 | 1963/XI/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 207 | 46001249 | 7.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.928.000,00 |
| 208 | 1835/XI/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 209 | 0290/II/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 210 | 46000517 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 211 | 1163/VII/BPR/05 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 212 | 46000889 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 213 | 46001088 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 214 | 46000692 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 215 | 46000990 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 216 | 1996/XII/2005 | 49.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 75.264.000,00 |
| 217 | 0347/III/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 218 | 0644/IV/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 219 | 1836/XI/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 220 | 0835/V/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.120.000,00 |
| 221 | 0172/II/2006 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 222 | 46000612 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 223 | 46001150 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 224 | 46000518 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 225 | 46001059 | 1.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 896.000,00 |
| 226 | 46001212 | 3.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.136.000,00 |
| 227 | 46001030 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 228 | 46000982 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 229 | 46001024 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 230 | 46000243 | 3.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.112.000,00 |

Halaman 167 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|
| 231 | 149/I/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 232 | 1333/IX/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 233 | 180/V/2006 | 2.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.176.000,00 |
| 234 | 46001093 | 5.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.520.000,00 |
| 235 | 1856/XII/2004 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 236 | 0467/III/2006 | 4.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.608.000,00 |
| 237 | 1560/X/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 238 | 46000563 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 239 | 1844/XI/2003 | 4.000.000,00 | 21% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 240 | 46000649 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 241 | 46000650 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 242 | 46000744 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 243 | 46000651 | 2.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.240.000,00 |
| 244 | 46000951 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 245 | 084/IV/2006 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 246 | 0283/II/2004 | 11.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 16.896.000,00 |
| 247 | 46001102 | 1.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 704.000,00 |
| 248 | 1821/XI/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 249 | 8004/XI/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 250 | 0098/I/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 251 | 0326/III/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 252 | 0343/III/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 253 | 144/V/2006 | 7.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 254 | 46000553 | 6.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.912.000,00 |
| 255 | 46000554 | 6.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.912.000,00 |
| 256 | 46000754 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 257 | 46000755 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 258 | 46001241 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 259 | 46001242 | 5.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |

Halaman 168 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|-----|-------------|---------------|------|--------------|
| 260 | 1824/XI/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 261 | 1825/XI/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 262 | 1859/XI/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 263 | 46000150 | 7.500.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.200.000,00 |
| 264 | 46000552 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 265 | 0819/V/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 266 | 2050/XII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 267 | 2051/XII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 268 | 2052/XII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 269 | 0092/I/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 270 | 0208/II/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 271 | 0209/II/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 272 | 2050/XII/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 273 | 0085/I/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 274 | 2048/XII/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 275 | 1595/X/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 276 | 053/IV/2006 | 3.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 277 | 0891/V/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 278 | 1309/IX/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 279 | 1677/X/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 280 | 1392/VIII/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 281 | 01100/VI/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 282 | 0395/II/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 283 | 1390/VIII/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 284 | 173/V/2006 | 3.000.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.880.000,00 |
| 285 | 1861/XI/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 286 | 1310/IX/2004 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 287 | 0613/IV/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 288 | 1391/VIII/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |

Halaman 169 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|-----|-------------|---------------|------|--------------|
| 289 | 46001171 | 7.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 290 | 1678/X/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 291 | 1389/VIII/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 292 | 0184/I/2005 | 3.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 293 | 1676/X/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 294 | 01213/VII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 295 | 1325/VIII/2003 | 1.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.304.000,00 |
| 296 | 1406/VIII/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 297 | 0188/II/2006 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.200.000,00 |
| 298 | 0359/III/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 299 | 176/IX/2005 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 300 | 46001234 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 301 | 0863/V/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 302 | 1860/XI/2005 | 1.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.280.000,00 |
| 303 | 46000153 | 1.000.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 960.000,00 |
| 304 | 46001152 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 305 | 0077/II/2006 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 306 | 0340/II/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 307 | 0255/II/2005 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.200.000,00 |
| 308 | 1654/XI/2004 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.200.000,00 |
| 309 | 46000604 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 310 | 46000599 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 311 | 46000602 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 312 | 46000603 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 313 | 46000605 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 314 | 46000600 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 315 | 46000601 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 316 | 4600126 | 7.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 317 | 0791/V/2005 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.120.000,00 |

Halaman 170 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|
| 318 | 0157/V/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 319 | 46000701 | 6.000.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.144.000,00 |
| 320 | 46001143 | 6.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.824.000,00 |
| 321 | 46000614 | 6.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.488.000,00 |
| 322 | 0475/IX/2006 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 323 | 0476/IX/2006 | 3.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.688.000,00 |
| 324 | 0349/II/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 325 | 0350/II/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 326 | 1476/IX/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 327 | 46000685 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 328 | 1522/VIII/2002 | 10.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.360.000,00 |
| 329 | 0359/VII/2006 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 330 | 46000728 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 331 | 46000502 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 332 | 131/V/2006 | 6.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 333 | 14/I/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 334 | 0796/V/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 335 | 0010/I/05 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 336 | 1390/X/2004 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 337 | 1802/XI/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 338 | 46000503 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 339 | 46000504 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 340 | 0467/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 341 | 0466/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 342 | 0319/III/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 343 | 0442/III/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 344 | 0412/III/2003 | 4.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.912.000,00 |
| 345 | 1595/X/2003 | 5.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 346 | 1755/XI/2003 | 7.000.000,00 | 21% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.408.000,00 |

Halaman 171 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|-----|-------------|---------------|------|--------------|
| 347 | 1892/XII/2003 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 348 | 023/I/2004 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 349 | 0432/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 350 | 0433/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 351 | 0434/III/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 352 | 0805/V/2005 | 4.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 353 | 1139/VII/BPR/03 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 354 | 46001205 | 6.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 355 | 46001206 | 6.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 356 | 46000509 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 357 | 46000508 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 358 | 46000510 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 359 | 46000701 | 3.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.304.000,00 |
| 360 | 46000324 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 361 | 46001101 | 1.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 704.000,00 |
| 362 | 46000810 | 1.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 768.000,00 |
| 363 | 46000155 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 364 | 46001259 | 5.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.520.000,00 |
| 365 | 2062/XII/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 366 | 0258/VI/2006 | 6.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 367 | 0457/III/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 368 | 0456/III/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 369 | 0505IX/2006 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 370 | 0187/V/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 371 | 188/V/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 372 | 189/V/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 373 | 190/V/2006 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 374 | 1309/VII/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 375 | 46001201 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |

Halaman 172 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|----------------|
| 376 | 0292/III/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 377 | 1014/VI/2003 | 10.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.360.000,00 |
| 378 | 0687/V/2004 | 10.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 12.800.000,00 |
| 379 | 1185/VIII/2004 | 12.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.360.000,00 |
| 380 | 0435/VIII/2006 | 10.000.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 10.240.000,00 |
| 381 | 46000817 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 382 | 46001018 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 383 | 46001009 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 384 | 46001010 | 7.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 385 | 46001011 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 386 | 46001012 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 387 | 46000912 | 79.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 121.344.000,00 |
| 388 | 46000913 | 16.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 18.432.000,00 |
| 389 | 46001008 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 390 | 1240/IX/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 391 | 1239/IX/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 392 | 1238/IX/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 393 | 0797/V/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 394 | 0966/V/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 395 | 0224/VI/2006 | 6.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 396 | 46000285 | 6.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 397 | 46000404 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 398 | 46000865 | 6.000.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 399 | 46000866 | 6.000.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 400 | 46000588 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 401 | 0511/X/2006 | 6.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.992.000,00 |
| 402 | 46000719 | 3.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.112.000,00 |
| 403 | 46000809 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 404 | 46000807 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |

Halaman 173 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|-----|-------------|---------------|------|--------------|
| 405 | 46000808 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 406 | 1604/X/BPR/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 407 | 1661/X/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 408 | 46000989 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 409 | 1732/XII/2004 | 6.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.320.000,00 |
| 410 | 1734/XII/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 411 | 020/I/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 412 | 0294/III/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.920.000,00 |
| 413 | 0295/III/2006 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.920.000,00 |
| 414 | 0482/III/2006 | 4.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.352.000,00 |
| 415 | 215/VI/2006 | 1.500.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.632.000,00 |
| 416 | 0393/VIII/2006 | 3.500.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 417 | 0394/VIII/2006 | 1.000.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.024.000,00 |
| 418 | 0554/X/2006 | 1.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.152.000,00 |
| 419 | 46000767 | 2.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.920.000,00 |
| 420 | 46000768 | 4.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.456.000,00 |
| 421 | 46000769 | 4.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.456.000,00 |
| 422 | 46000857 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 423 | 460001071 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 424 | 46000703 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 425 | 1141/VII/BPR/05 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 426 | 46000074 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 427 | 1509/IX/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 428 | 46001190 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 429 | 46001189 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 430 | 46001163 | 2.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.536.000,00 |
| 431 | 46000488 | 7.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.064.000,00 |
| 432 | 46000497 | 4.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.608.000,00 |
| 433 | 46001060 | 3.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.456.000,00 |

Halaman 174 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|---------------|
| 434 | 46001079 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 435 | 46001080 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 436 | 46001081 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 437 | 46001078 | 7.500.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.640.000,00 |
| 438 | 46001228 | 6.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.224.000,00 |
| 439 | 46001229 | 5.500.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.872.000,00 |
| 440 | 0443/III/2006 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 441 | 0155/II/2006 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 442 | 0103/II/2006 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 443 | 0356/VII/2006 | 2.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.176.000,00 |
| 444 | 46000057 | 5.000.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.800.000,00 |
| 445 | 46000058 | 5.000.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.800.000,00 |
| 446 | 46000059 | 7.500.000,00 | 15% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.200.000,00 |
| 447 | 0270/VI/2006 | 3.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 448 | 46001122 | 3.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.304.000,00 |
| 449 | 0389/VII/2006 | 3.000.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.072.000,00 |
| 450 | 0315/III/2006 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 451 | 0622/IV/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 452 | 46000511 | 3.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.112.000,00 |
| 453 | 0241/II/2005 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 454 | 1136/VII/BPR/05 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 455 | 0316/III/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 456 | 460000773 | 1.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 768.000,00 |
| 457 | 1905/XI/2002 | 10.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 15.360.000,00 |
| 458 | 0595/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 459 | 0594/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 460 | 2130/XII/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 461 | 0597/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 462 | 0596/III/2005 | 7.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 9.600.000,00 |
| 463 | 46000590 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |

Halaman 175 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|-----|-------------|---------------|------|--------------|
| 464 | 46000589 | 4.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.584.000,00 |
| 465 | 0511/IX/2006 | 6.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.992.000,00 |
| 466 | 46000719 | 3.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.112.000,00 |
| 467 | 0632/IV/2004 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 468 | 0681/V/2004 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 469 | 0708/IV/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 470 | 1174/VII/2003 | 2.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 471 | 1336/VIII/2005 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.920.000,00 |
| 472 | 0784/V/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 473 | 1644/XI/2004 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 474 | 1131/VII/BPR/05 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.200.000,00 |
| 475 | 46001125 | 3.000.000,00 | 11% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.112.000,00 |
| 476 | 1399/VIII/2005 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 477 | 0357/II/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 478 | 0358/II/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 479 | 0360/II/2005 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 480 | 0554/III/2005 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.200.000,00 |
| 481 | 0937/V/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 482 | 1772/X/2005 | 3.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 483 | 0100/II/2006 | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 484 | 0245/II/2006 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.120.000,00 |
| 485 | 0246/II/2006 | 4.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.120.000,00 |
| 486 | 0291/II/2006 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 487 | 0238/VI/2006 | 4.000.000,00 | 17% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.352.000,00 |
| 488 | 0543/X/2006 | 3.000.000,00 | 16% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.072.000,00 |
| 489 | 48000237 | 7.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.272.000,00 |
| 490 | 46000585 | 2.500.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.240.000,00 |
| 491 | 46000499 | 2.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 492 | 0199/II/2006 | 2.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.200.000,00 |

Halaman 176 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------|--------|-------------|---------------|------|--------------|
| 493 | 46000596 | 5.000.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 494 | 46000597 | 1.400.000,00 | 14% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.254.400,00 |
| 495 | 46000856 | 2.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.536.000,00 |
| 496 | 0138/V/2006 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 497 | - | 7.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.960.000,00 |
| 498 | 1561/X/2003 | 3.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.608.000,00 |
| 499 | 0011/II/2004 | 1.500.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.920.000,00 |
| 500 | 1561/X/2004 | 5.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.400.000,00 |
| 501 | 0927/V/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 502 | 0178/II/2004 | 2.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 503 | 1674/X/2005 | 6.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 7.680.000,00 |
| 504 | 0328/III/2006 | 1.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.280.000,00 |
| 505 | 1322/VIII/2005 | 3.000.000,00 | 20% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 506 | 46001050 | 3.000.000,00 | 18% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.456.000,00 |
| 507 | 46001109 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 508 | 0963/V/2005 | 5.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 509 | 0964/V/2005 | 5.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 510 | 46000858 | 2.500.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.240.000,00 |
| 511 | 46001161 | 1.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 896.000,00 |
| 512 | 46000201 | 2.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.792.000,00 |
| 513 | 46001191 | 3.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.688.000,00 |
| 514 | 194/V/2006 | 3.000.000,00 | 17,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.340.800,00 |
| 515 | 46001203 | 4.000.000,00 | 11,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.816.000,00 |
| 516 | 46000533 | 2.000.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.536.000,00 |
| 517 | 460000765 | 5.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 518 | 1532/IX/2005 | 5.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 519 | 0178/II/2006 | 3.200.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.177.920,00 |
| 520 | 0528/IX/2006 | 1.500.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.152.000,00 |
| 521 | 46001073 | 5.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |

Halaman 177 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------|--------|-------------|---------------|------|---------------|
| 522 | 46001134 | 5.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 523 | 1721/XII/2004 | 2.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 524 | 0736/IV/2005 | 5.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.528.000,00 |
| 525 | 1110/VI/2005 | 2.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 526 | 1128/VII/BPR/2005 | 2.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 527 | 0269/VI/2006 | 2.000.000,00 | 17,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.176.000,00 |
| 528 | 46001187 | 4.000.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.072.000,00 |
| 529 | 46001045 | 7.500.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.760.000,00 |
| 530 | 0415/VIII/2006 | 1.000.000,00 | 16,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.024.000,00 |
| 531 | 0301/II/2005 | 2.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 532 | 0047/I/2006 | 4.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.875.200,00 |
| 533 | 46001245 | 1.400.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.254.400,00 |
| 534 | 1823/XI/2003 | 2.000.000,00 | 20,50% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.624.000,00 |
| 535 | 599/III/2002 | 12.500.000,00 | 24,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 19.200.000,00 |
| 536 | 0303/II/2004 | 2.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.611.200,00 |
| 537 | 0203/I/2005 | 3.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.569.600,00 |
| 358 | 46000178 | 3.000.000,00 | 15,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.880.000,00 |
| 539 | 0133/V/2006 | 2.000.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.536.000,00 |
| 540 | 0460/VIII/2006 | 2.500.000,00 | 16,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.560.000,00 |
| 541 | 460000763 | 1.500.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.344.000,00 |
| 542 | 46000944 | 7.500.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 543 | 46000945 | 7.500.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 6.720.000,00 |
| 544 | 031/IV/2006 | 40.000.000,00 | 17,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 44.544.000,00 |
| 545 | 460000775 | 1.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 896.000,00 |
| 546 | 46000872 | 5.000.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 547 | 46000873 | 5.000.000,00 | 12,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 548 | 1226/IX/2004 | 10.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 13.056.000,00 |
| 549 | 46000964 | 3.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.688.000,00 |
| 550 | 46001138 | 20.000.000,00 | 24,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 30.720.000,00 |

Halaman 178 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



| | | | | | | | |
|--------|----------------|------------------|--------|-------------|---------------|------|------------------|
| 551 | 46000637 | 2.000.000,00 | 16,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 2.048.000,00 |
| 552 | 46000724 | 6.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 5.376.000,00 |
| 553 | 46000634 | 5.000.000,00 | 14,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.480.000,00 |
| 554 | 1349/VIII/2003 | 1.000.000,00 | 24,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.536.000,00 |
| 555 | 46000106 | 4.000.000,00 | 15,00% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 556 | 1203/VIII/2004 | 1.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.958.400,00 |
| 557 | 60081 | 200.000,00 | 6% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 76.800,00 |
| 558 | 0064/I/2006 | 7.500.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 11.520.000,00 |
| 559 | 46000647 | 4.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.072.000,00 |
| 560 | 46001064 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 561 | 2111/XII/2005 | 1.000.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.305.600,00 |
| 562 | 0423/II/2005 | 1.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.958.400,00 |
| 563 | 1716/X/2003 | 3.000.000,00 | 21% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.032.000,00 |
| 564 | 46000838 | 2.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 1.920.000,00 |
| 565 | 46000648 | 4.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.072.000,00 |
| 566 | 1431/VIII/2005 | 2.500.000,00 | 20,40% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.264.000,00 |
| 567 | 0206/V/2006 | 5.000.000,00 | 17,40 | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 556.800.000,00 |
| 568 | 46001215 | 5.000.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 3.840.000,00 |
| 569 | 1591/IX/2005 | 25.000.000,00 | 24% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 38.400.000,00 |
| 570 | T21004931 | 23.000.000,00 | 6% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 8.832.000,00 |
| 571 | 21005541 | 945.540,00 | 6% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 363.087,36 |
| 572 | 2100158 | 1.720.756,00 | 6% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 660.770,30 |
| 573 | 46000753 | 5.500.000,00 | 12% | 21-11- 2007 | 14 April 2014 | 2336 | 4.224.000,00 |
| Jumlah | | 3.931.266.296,00 | | | | | 5.474.801.777,66 |

3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak selain dan selebihnya atas pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 191/Pdt/2015/PT BDG. tanggal 13 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/PDT.G/2014/PN GRT. tertanggal 29 Januari 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata gugatan Para Penggugat tidak sinkron antara *posita* dan *petitum* dimana dalam *posita*, *petitum* dan amar, Para Tergugat dinyatakan ingkar janji sedangkan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat karena tidak pernah membuat perjanjian dengan Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT dan kawan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT.BDG Tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Grt tanggal 29 Januari 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, 2. **SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, dan **KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, 3. **Drs. H. ADIN BURHANUDIN, M.Pd.**, dan **Ny Hj ENUNG MARIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 191/Pdt/2015/PT.BDG Tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Grt tanggal 29 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi III/Para Termohon Kasasi I,II/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 180 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

| | | |
|---------------------------|----|-------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah..... | Rp | 500.000,00. |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 181 dari 181 hal. Put. Nomor 2659 K/Pdt/2015